

MENELUSURI NILAI-NILAI FILOSOFIS DOKTRIN EKONOMI ISLAM

**Dr. Iiz Izmuddin, M.A.
Loni Hendri, SELMEI.**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau memberi izin untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

**MENELUSURI
NILAI-NILAI FILOSOFIS
DOKTRIN EKONOMI
ISLAM**

MENELUSURI NILAI-NILAI FILOSOFIS DOKTRIN EKONOMI ISLAM

@ Dr. Iiz Izmuddin, M.A.
Loni Hendri, SEL.MEI.

Editor : Dr. Asyari, S.Ag., M.Si
Layout : Team WADE Publish
Design Cover : Team WADE Publish
Diterbitkan oleh :



Jln. Pos Barat Km. 1 Melikan Ngimput Purwosari
Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491

 buatbuku.com
 redaksi@buatbuku.com
 0821-3954-7339
 Penerbit Wade
 [buatbuku](https://www.instagram.com/buatbuku)

Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan Pertama, Maret 2019
ISBN: 978-623-7007-65-4

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

xiv+202 hlm. 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR PENULIS

Diawali dengan Syukur alhamdulillah, penulisan dan penerbitan buku dengan judul “Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam” telah diselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang memberikan petunjuk dan arahan dalam doktrin Ekonomi sehingga umatnya dapat mewarisi prinsip-prinsip dan doktrin itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam melintas tanpa batas teritorial dan melintas tanpa batas keyakinan, suku dan ras. Hal ini terbukti negara india yang mayoritas penduduknya beragama hindu dan Inggris yang mayoritas penduduknya beragama katolik dan greja katolik Anglo Saxon berpusat disana, telah menerima ekonomi islam sebagai bagian dari praktek ekonomi.

Dalam Petumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari dua permasalahan yang mendasar yang melatarbelaknginya. *Pertama*; permasalahan filosofis-doktrinal-paradigmatik yang merupakan tanggung jawab para ulama dan cendekiawan sebagai mujtahid ekonomi Islam yang membuat konsep-konsep paradigma dan landasan filosofis ekonomi Islam. *Kedua*; permasalahan impelmentasi-empirik yang merupakan tanggung jawab praktisi ekonom Muslim sebagai mujahid-mujahid ekonomi Islam. Mengedapkan dan menfokuskan aspek filosofis-doktrinal-paradigmatik semata tanpa ada usaha untuk mengimplementasikannya maka ekonomi Islam hanya sebagai khayalan dan utopis belaka. Begitu pula bila mengedapkan dan mengfokuskan pada aspek implementasi-empirik semata tanpa landasan *filosofis-doktrinal-paradigmatik* maka ekonomi Islam akan beridiri di atas puing-puing kehancuran. Pengembangan ekonomi Islam tanpa landasan *filosofis-paradigmatik* akan memunculkan kesemuan dan kerapuhan. Oleh karena itu keduanya harus ditempuh secara simultan.

Tulisan berupa Buku yang ada di hadapan pembaca dengan judul **“Menelusuri Nilai-nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam”** secara anilitis kritis menggambarkan dan mengkaji esensi ekonomi Islam. Kajian terhadap suatu esensi harus melibatkan analisi substansi bukan saja pada konsep-konsep yang tersurat namun harus mengkaji secara mendalam di balik konsep-konsep tersebut yang tersirat. Untuk hal ini dibutuhkan kajian analisis ontologis, epistemologis dan axiologis sebagai landasan filosofis doktrin-doktrin Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR EDITOR

Dr. Asyari, S.Ag, M.Si
(Dosen Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi)

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Ekonomi Islam baik dari sisi konsep-konsep maupun dari sisi praktik menunjukkan perkembangan yang signifikan. Secara kelembagaan di bidang akademik, Program Studi Ekonomi Islam tumbuh sangat pesat tidak saja di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik negeri maupun swasta namun juga di lingkungan Perguruan Tinggi Umum. Di Indonesia, Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), seperti; IAIN (kini UIN) Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Medan, Tazkia Bogor dan SEBI Jakarta adalah PT generasi awal dan *pioneer* pendidikan ekonomi Islam. Di luar negeri, di beberapa negara sekuler, perkembangan ekonomi syariah dengan *proxy* lembaga keuangan syariah berkembang lebih cepat meskipun *notabene* mayoritas mereka bukan penganut Islam.

Dari sisi praktis, pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan syariah dan bisnis Islam menunjukkan, *trend* menaik (*up*). Pertumbuhan dan perkembangan ini bukan sebatas pertumbuhan pembiayaan dan pendanaan yang kian terus meningkat serta kantor cabang yang terus semakin menjamur sampai ke masyarakat tingkat bawah. Seiring dengan itu juga tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan ekonomi syariah dalam setiap lini kehidupan.

Namun dalam perkembangan yang pesat tersebut harus diakui kegiatan lembaga keuangan syariah masih belum sesuai secara syariah meskipun telah banyak Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijadikan referensi bagi bank syariah. Dr.H. Syukri Iska, M.Ag (2010), dalam sebuah penelitiannya mengungkap beberapa persoalan yang berkaitan dengan kemurnian syariah di bank syariah, seperti perhitungan *margin/mark up* pada pembiayaan murabahah (jual beli) dari jumlah pembiayaan yang disalurkan

bank bukan dari harga barang di pasar, penerapan akad mudharabah pada sisi tabungan dimana nasabah dapat saja menarik dananya kapan saja (*on call*) padahal dananya belum diproduktifkan (*tasharruf*) oleh bank. Sementara Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, menilai dalam penerapan akad mudharabah dan murabahah pada kegiatan bank menimbulkan titik-titik kritis yang dapat menyeret kepada *syubhat* dan bahkan bisa terjebak pada praktek riba/rente.

Problematika syariah menjadi hal penting yang ditemui dalam implementasi ekonomi syariah. Jika dicermati secara dalam, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari, *pertama*, hampir semua akad-akad yang ada merupakan akad yang berkaitan dengan hubungan langsung *person to person*, seperti akad mudharabah, pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pekerja (*'amil*) dan akad murabahah penjual dan pembeli. Dalam implementasinya akad-akad tersebut di lembaga keuangan telah terjadi penambahan pelaku akad, yaitu bank sebagai intermedator. Dengan demikian hubungan langsung *person to person* tidak dapat dipertahankan secara murni. Inilah yang menjadi embrio munculnya problem syariah dalam implementasi akad-akad di bank syariah. *Kedua*, dari segi sejarah dan sosial budaya, akad merupakan produk budaya yang lahir dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian diformulasikan dan diberi filterisasi nilai-nilai Islam. Para ulama telah berupaya melakukan ijtihad, memahami, mengaji dan mengkontruksi akad-akad tersebut melalui *isyyarat al-nash* (al-Quran) dan petunjuk hadist.

Faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang melingkari kehidupan ulama waktu itu tentu merupakan variabel yang inheren yang tidak dapat dipisahkan dan sedikit banyaknya mempengaruhi hasil ijtihad para ulama. Artinya, akad-akad muamalat tersebut merupakan produk ijtihad ulama merespon sosial masyarakat di era ulama mujtahid hidup. Dengan demikian, penerapan akad-akad sebagai hasil ijtihad ulama masa lalu di tengah perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat yang kian pesat dengan segala dinamikanya termasuk kehidupan dalam dunia perbankan tentu

sangatlah logis jika menimbulkan beberapa masalah terutama masalah syariahnya. *Ketiga*, belum sejalannya keyakinan dan perbuatan di kalangan masyarakat kita. Keyakinan yang dianut tidak tembus ke perilaku. Dalam penelitian disertasi, penulis menemukan bahwa loyalitas Muslim Minangkabau terhadap ajaran agama Islam dan nilai-nilai adat Minang ternyata belum mempengaruhi perilaku ekonomi sesuai syariah. Kualitas Muslim Minangkabau dalam mengimplementasikan ajaran agama dan adat Minang khususnya dalam perilaku ekonomi tidak optimal dalam menjalankan perintah Allah tentang berperilaku di bidang ekonomi. Keimanan masyarakat Minang kepada Allah dan loyalitas kepada nilai-nilai adat tidak berdampak pada perilaku mereka dalam berekonomi.

Sementara dari sisi keilmuan, Ekonomi Islam dipertanyakan di sisi epistemologinya. Apakah ekonomi Islam bagian dari ilmu ekonomi atau bagian dari ilmu agama. Jika dikatakan ekonomi Islam bagian dari ilmu ekonomi maka metodologi keilmuannya akan mengikuti keilmuan ilmu ekonomi konvensional. Namun jika ekonomi Islam termasuk ilmu agama maka disini para pakar ekonom muslim belum ada kesepakatan apakah Ekonomi Islam hanya sebatas moral atau doktrin-doktrin dalam menginspirasi kegiatan ekonomi atau ekonomi Islam sama saja dengan ekonomi konvensional hanya bedanya ada plus zakat dan non-riba.

Ada juga sebagian pihak mengatakan bahwa ekonomi Islam bagian dari ajaran islam, maka ekonomi Islam harus mencari dan mengembangkan epistemologinya sendiri, karena dengan itu ekonomi Islam akan menjadi ekonomi yang mandiri dan berdiri sendiri. Buku yang ada di hadapan pembaca ini yang berjudul **“Menelusuri Nilai-nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam”**, memberikan sekelumit epistemologi ekonomi Islam dengan paparan dari sisi tauhid, hukum dan etika dalam prinsip-prinsip bisnis atau ekonomi Islam. Buku Ini juga memberikan argumen-argumen filosofis tentang ekonomi Islam, sehingga kita dapat merasakan misi yang akan dibawa oleh ekonomi Islam dan memberikan alasan kuat kenapa kita harus memilih ekonomi Islam sebagai jalan hidup. Oleh

karena itu buku ini layak untuk dibaca oleh para akademisi dan juga praktisi serta peminat kajian ekonomi Islam seperti para dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi serta para praktisi ekonomi syariah, bahkan para praktisi ekonomi non syariah pun.

Bukittinggi, Maret 2019.

Dr. Asyari, S.Ag, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penelitian Terdahulu	3
C. Konstruksi Teori.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II

DISKURUSUS FILSAFAT DAN EKONOMI ISLAM.....	9
A. Hubungan Filsafat, Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Agama	9
1. Pengertian Filsafat	9
2. Filsafat Ilmu	12
3. Objek Pembahasan Filsafat Ilmu	18
4. Hubungan Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Agama.....	21
B. Landasan Filsafat (Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)	35
1. Ontologi.....	35
2. Epistemologi	43
3. Aksiologi	46
C. Hubungan Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi dengan Ekonomi Islam	50
D. Hubungan Filsafat dan Ekonomi Islam.....	51
1. Filsafat Ekonomi Islam.....	51
2. Kajian Filosofi dan Keterkaitannya dengan Karakteristik Ekonomi Islam.	55

BAB III

ASPEK ONTOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM	57
A. Konsep Ekonomi Islam	59
B. Asas- asas Ekonomi Islam	66
C. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam	69

BAB IV

ASPEK EPISTEMOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM	71
A. Urgensi Ushul Fiqh dalam Ekonomi Islam.....	74
1. Pengertian Ushul Fiqh.....	74
2. Kaedah dan Kegunaan Ushul Fiqh Dalam Ekonomi Islam.....	78
3. Konsep Ushul Fiqh Tentang <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Ekonomi Islam.....	82
B. Urgensi Ushul Fiqh Dalam Ekonomi Islam.....	88
C. Urgensi Maqasid Syariah dan <i>Maslahah</i> dalam Ekonomi Islam.....	94
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	94
2. Urgensi <i>Maqâshid syarî'ah</i> dalam Pembaruan Hukum Ekonomi Islam.....	107
D. Urgensi Qawaid Fikhiyah dalam Ekonomi Islam	113

BAB V

ASPEK AKSIOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM	117
A. Tujuan, Kegunaan dan Sifat Ekonomi Islam	119
1. Konsep dan Sifat Ekonomi Islam	119
2. Tujuan dan Kegunaan Ekonomi Islam	124
B. Kesatuan Aspek Hukum, Etika dan Tauhid dalam Ekonomi Islam.....	128
1. Tauhid dan Etika dalam Ekonomi Islam	128
2. Hukum, Etika dan Tauhid yang Menjelma dalam Ekonomi Islam	132

BAB VI	
BEBERAPA CONTOH KASUS LETAK TITIK BEDA DALAM NILAI-NILAI FILOSOFIS EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL	135
A. Sumber Daya Alam Antara 3 Mazhab Ekonomi Islam dan Mazhab Konvensional	135
B. Tujuan Pembangunan Ekonomi	143
C. Konsep Keberhasilan Hidup	144
D. Tujuan Utama Aktivitas ekonomi	146
E. Uang Berbasis Komoditi (Emas dan Perak).....	147
F. Kekayaan, Kemiskinan dan Kefaqiran	165
G. Keadilan dan Kesejahteraan.....	175
H. Pasar vis a vis Tempat Ibadah.....	181
I. Penetapan Harga yang Adil.....	183

BAB VI	
PENUTUP.....	187

DAFTAR PUSTAKA.....	191
Biografi Penulis.....	201

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam menjadi bahasan penting di zaman sekarang. Di dunia keuangan, lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah dikembangkan sebagai salah satu bentuk dari ekonomi Islam.¹ Begitu juga dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat diarahkan berbasis syariah sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam. Tidak hanya itu, dunia pendidikan juga disibukkan dengan upaya-upaya untuk mengembangkan pengajaran tentang ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya jurusan ekonomi Islam, perbankan syariah, keuangan Islam, akuntansi syariah dan sebagainya di perguruan tinggi Islam, bahkan perguruan tinggi umum juga banyak yang sudah membuka jurusan atau mengajarkan muatan mata kuliah ekonomi Islam.²

¹Salah satu bentuk perkembangan ini adalah muncul dan berkembangnya Bank Syariah di seluruh dunia terutama di wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa dan Amerika Utara sejak tiga puluh tahun terakhir. Lihat pada, Loghod, "Do Islamic Banks Performs Better than Conventional Bank? Evidence from Gulf Cooperation Council Countries," 2010, www.arab-api.org, akses 04 April 2014. Di Indonesia sendiri, perkembangan lembaga keuangan syariah mulai muncul dan berkembang sejak tahun 1992. Lihat OJK, "Statistik Perbankan Syariah Juni 2013," www.ojk.go.id, akses 23 Februari 2014. Perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia ini tidak hanya dalam hal jumlah tapi juga terkait efisiensi model keuangan yang terus dikembangkan untuk masa depan. Lihat El-Ghattis, "Islamic Banking's Role in Economic Development: Future Outlook," 2010, www.cba.edu.kw, akses 05 April 2014.

²Berdasarkan data dari infosyariah.com, hingga tahun 2000-an masih sedikit perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi Islam atau ekonomi Syariah. Sejumlah perguruan tinggi yang membuka program studi tersebut kebanyakan adalah perguruan tinggi di bawah naungan kementerian agama. Namun, beberapa tahun belakangan, seiring tren lembaga keuangan syariah, banyak perguruan tinggi mulai membuka program studi ekonomi Islam seperti pada Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan lain sebagainya. Infosyariah, "6 Kampus

Euforia dan tren terkait ekonomi Islam ini jangan sampai menghilangkan muatan penting dan urgensi ekonomi Islam itu sendiri. Agar urgensi ekonomi Islam³ dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak hanya menjadi euforia, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa sebenarnya ekonomi Islam.⁴ Langkah pemahaman ini dapat dimulai dari lingkup universitas dengan mahasiswa sebagai objeknya. Pengetahuan tentang urgensi dan apa sebenarnya ekonomi Islam dapat dipahami lebih mendalam lewat pengenalan tentang Nilai-Nilai Filosofis yang terkandung dalam Ekonomi Islam. Berbicara tentang nilai-nilai filosofis Ekonomi Islam maka tidak terlepas dari filsafat sebagai alat bantu untuk memahami objek secara mendalam, sistematis dan komprehensif dalam hal ini objek kajiannya yaitu ekonomi Islam.

Belum banyak yang berbicara dan membahas tentang Filsafat Ekonomi Islam.⁵ Rata-rata, yang dibicarakan jika membahas ekonomi Islam adalah perbankan syariah dan rentetan lembaga

Negeri (PTN) Favorit di Indonesia yang Sudah Membuka Prodi Ekonomi Islam," *www.infosyariah.com*, akses 02 Mei 2017.

³Salah satu urgensi ekonomi Islam adalah memahami konsep kesejahteraan dalam Islam dan cara mencapainya. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan dapat diwujudkan lewat praktik ekonomi berbasis prinsip-prinsip hukum, distribusi yang adil dan berbasis sosial, kemakmuran yang merata, tidak ada tekanan serta keseimbangan dan kesederhanaan. Kemenag, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir al-Qur'an Tematik, Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), hlm.. 186-195.

⁴Konsep ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif merupakan ilmu yang secara eksklusif berhubungan dengan penjelasan ilmiah tentang perilaku manusia menghadapi kondisi kelangkaan. Sementara itu, ekonomi normatif atau ekonomi kesejahteraan yang biasa disebut juga ekonomi politis merupakan pembahasan ekonomi di mana setiap rekomendasi kebijakan harus melibatkan nilai-nilai tertentu. Ekonomi Islam merupakan ekonomi normatif yang membahas tentang pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menopang kehidupan masyarakat. Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (England: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 30.

⁵Salah satu buku yang membahas tema ini adalah buku Filsafat Ekonomi Islam karangan Prof. Musa Asy'arie. Buku ini lebih mengupas tentang konsep teologi, kosmologi dan antropologi ekonomi Islam. Buku lainnya yaitu karangan M. Anton Athoillah dan Bambang Qamaruzzaman yang pada dasarnya juga mengaitkan aktivitas ekonomi dengan aspek teologis, kosmologis dan antropologis yang dilengkapi dengan data-data dan ilustrasi.

keuangan lainnya yang beroperasi secara syariah.⁶ Padahal, ekonomi Islam tidaklah sesempit itu. Secara lebih luas, ekonomi Islam harus dilihat dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologinya agar dapat dipahami seperti apa ekonomi Islam itu sebenarnya.⁷

B. Penelitian Terdahulu

Buku yang membahas tentang doktrin dan falsafah ekonomi Islam belum ada namun ada beberapa buku yang membahas tentang Filsafat Ekonomi Islam yang sedikit berhubungan dengan doktrin dan nilai-nilai falsahnya. Sejauh yang penulis temukan ada dua. Pertama, Filsafat Ekonomi Islam karangan Prof. Musa Asy'arie yang lebih mengupas tentang konsep teologi, kosmologi dan antropologi ekonomi Islam. Kedua, karangan M. Anton Athoillah dan Bambang Qamaruzzaman yang pada dasarnya juga mengaitkan aktivitas ekonomi dengan aspek teologis, kosmologis dan antropologis yang dilengkapi dengan data-data dan ilustrasi.

Adapun beda buku yang akan ditulis ini dengan buku-buku yang sudah ada tentang Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Ekonomi

⁶ Sebagai contoh, buku *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis* karangan Abdullah Saeed. Buku ini membahas tentang riba dan praktek riba dalam bentuk bunga yang dilakukan oleh bank. Begitu juga dengan buku *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* karya Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin yang membahas tentang bank syariah mulai dari konsep bank syariah hingga aplikasi dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Sama juga halnya dengan Muhammad yang menulis tentang *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Adiwarmanto Karim menulis *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, dan masih banyak buku lain yang membicarakan tentang bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ada segelintir buku yang membicarakan tentang ekonomi Islam, namun masih dalam cakupan sejarah dan konsep dasar ekonomi Islam seperti karangan Ahmed el-Ashker dan Rodney Wilson berjudul *Islamic Economics: A Short History*. Di Indonesia misalnya Adiwarmanto Karim yang menulis tentang *Ekonomi Makro Islami* dan buku-buku lain tentang ekonomi Islam yang sebatas pada konsep dasar.

⁷ Sebagaimana halnya dalam pembahasan filsafat ekonomi umum, ekonomi Islam harusnya dikaji secara komprehensif mulai dari teori, metodologi dan etika sebagai fondasi kajian ekonominya (semuanya dapat dibahas dalam Filsafat Ekonomi Islam). Pertama, kerangka teori ekonomi didasarkan pada pilihan-pilihan rasional yang membahas kepastian situasi, risiko, ketidakpastian dan strategi. Kedua, metodologi mengacu pada metode-metode yang digunakan ekonom dalam menguji teori dan mengembangkan fakta. Ketiga, etika yang mana setiap kegiatan ekonomi melibatkan persoalan etika dari hal yang paling besar hingga hal terkecil. Reiss, *Philosophy of Economics: A Contemporary Introduction*, (New York: Routledge, 2013), hlm. 6-7.

Islam terletak dari aspek pendekatan kajian yang digunakan. Jika buku-buku yang sudah ada membahas Filsafat Ekonomi Islam menggunakan pendekatan teologis, kosmologis dan antropologis dalam mengkaji ekonomi Islam, maka buku ini akan mengkaji ekonomi Islam dari aspek epistemologis, ontologis dan aksiologisnya. Selain itu, buku-buku tentang Filsafat Ekonomi Islam yang sudah ada sebelumnya merupakan buku ilmiah yang kajiannya cukup luas dan berat, sementara buku yang akan penulis garap ini merupakan buku 'ilmiah sebagai rujukan panduan belajar mahasiswa baik untuk S1 dan S2 yang bahasa dan kontennya lebih ringan.

C. Konstruksi Teori

Ilmu, filsafat dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Dikatakan reflektif, karena ilmu, filsafat dan agama baru dapat dirasakan (diketahui) faedahnya manfaatnya dalam kehidupan manusia. Ilmu mendasarkan pada akal pikir lewat pengalaman dan indera dan filsafat mendasarkan pada otoritas akal murni secara bebas dalam penyelidikan terhadap kenyataan dan pengalaman terutama dikaitkan dengan kehidupan manusia. Sedangkan agama mendasarkan pada otoritas wahyu, tentu dalam Islam, filsafat dalam prakteknya termasuk bagian dari agama.⁸

Menurut Prof.Nasroen, S.H, mengemukakan bahwa filsafat yang sejati haruslah berdasarkan kepada agama. Malahan filsafat yang sejati itu terkandung dalam agama. Apabila filsafat tidak berdasarkan kepada agama dan filsafat hanya semata-mata berdasarkan atas akal pikir saja, maka filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran obyektif karena yang memberikan pandangan dan putusan adalah akal pikiran. Sedangkan kesanggupan akal pikiran itu terbatas, sehingga filsafat yang hanya berdasarkan kepada akal pikir semata-mata tidak akan sanggup memberi kepuasan bagi

⁸ Ahmad Syadali. *Filsafat Umum*. Bandung:CV Pustaka Setia.1997. Hal.37-38

manusia, terutama dalam tingkat pemahamannya terhadap yang ghaib.⁹

Ilmu pengetahuan terbukti telah membedakan martabat manusia dan derajatnya di mata Tuhan. Bagi orang Islam, Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Itu artinya, Ilmu pengetahuan benar-benar akan membedakan antara yang bodoh dengan yang pintar. Hajat manusia akan ilmu pengetahuan disebabkan oleh dua hal mendasar, yaitu:

1. Ilmu sebagai penunjuk kejalan yang lebih baik dalam kehidupan manusia disegala sektor dan aspek.
2. Ilmu sebagai alat untuk mempermudah jalan hidup manusia dalam menghadapi masalah.¹⁰

Hubungan antara filsafat dan agama diantaranya:

1. Dalam usaha manusia memahami wahyu Allah secara tepat filsafat dapat saja membantu. Karena jelas bahwa jawaban atas pertanyaan itu harus diberikan dengan memakai nalar (pertanyaan tentang arti wahyu tidak dapat dipecahkan dengan mencari jawabannya dalam wahyu saja, karena dengan demikian pertanyaan yang sama akan muncul kembali dan seterusnya). Karena filsafat adalah seni pemakaian nalar secara tepat dan bertanggung jawab, filsafat dapat membantu agama dalam memastikan arti wahyu tersebut.
2. Secara spesifik filsafat selalu dan sudah memberikan pelayanan itu kepada ilmu yang mencoba mensistematisasikan, membetulkan dan memastikan ajaran agama yang berdasarkan wahyu, yaitu ilmu theologi. Maka secara tradisional dengan sangat tidak disenangi oleh para filosof filsafat disebut ancilla theologiae (abdi teologi). Teologi dengan sendirinya memerlukan paham-paham dan metode-metode tertentu dan paham-

⁹ Asmoro Achmadi. *Filsafat Umum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.1995, Hal:17

¹⁰ Beni Ahmad Saebani. *FILSAFAT ILMU (Kontemplasi Filosofis tentang Seluk Beluk Sumber dan Tujuan Ilmu Pengetahuan)*.2009. Bandung: Pustaka Setia. Hal:172

paham serta metode itu dengan sendirinya diambil dari filsafat. Misalnya, masalah penentu Allah dan kebebasan manusia (masalah kehendak bebas) hanya dapat dibahas dengan memakai cara berpikir filsafat. Hal yang sama juga berlaku dalam masalah "*theodicea*", pertanyaan tentang bagaimana Allah yang sekaligus maha baik dan maha kuasa, dapat membiarkan penderitaan dan dosa berlangsung (padahal ia tentu dapat mencegahnya).

3. Filsafat dapat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru, artinya masalah-masalah yang pada waktu wahyu diturunkan belum ada dan tidak dibicarakan secara langsung dalam wahyu, seperti yang berhubungan dengan bidang moralitas. Misalnya masalah bayi tabung atau pengcangkakan ginjal. Bagaimana orang mengambil sikap terhadap dua kemungkinan itu: boleh atau tidak? Bagaimana dalam hal ini ia mendasarkan diri pada agamanya, padahal dalam kitab suci agamanya, dua masalah itu tidak pernah dibahas. Jawabannya hanya dapat ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip etika yang termuat dalam konteks lain dalam kitab suci pada masalah baru itu, dalam proses itu diperlukan pertimbangan filsafat moral.
4. Filsafat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mengunggah agama dengan mengacu pada hasil ilmu pengetahuan dan ideologi-ideologi masa kita, misalnya pada ajaran evolusi atau pada feminisme. Pelayanan keempat yang dapat diberikan oleh filsafat kepada agama diberikan melalui fungsi kritisnya. Salah satu tugas filsafat adalah kritik ideologi. Maksudnya adalah sebagai berikut: masyarakat terutama masyarakat pasca tradisional, berada dibawah semburan segala macam pandangan, kepercayaan, agama, aliran, ideologi dan keyakinan. Semua pandangan itu mengatakan kepada masyarakat bagaimana ia harus hidup, bersikap dan bertindak. Filsafat dapat menganalisa klaim-klaim ideologi itu secara kritis, mempertanyakan dasarnya, memperlihatkan implikasi-

nya, membuka kedok kepentingan yang barangkali ada dibelakangnya.¹¹

Islam mengajarkan kepada manusia, sebagai khalifah di muka bumi berkewajiban menuntut ilmu, namun bersamaan dengan itu manusia juga harus berserah diri kepada kekuasaan Allah dalam pengertian beriman. Manusia diwajibkan berusaha dengan segala kemampuannya, tetapi hasilnya tergantung pada izin Allah.

Filsafat ekonomi Islam merupakan perpaduan antara ilmu, filsafat dan agama yang secara komprehensif mengkaji filosofi ilmu ekonomi berbasis ajaran agama Islam.

D. Sistematika Penulisan

Buku yang berjudul Menelusuri Nilai-nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam ini akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan membahas latar belakang penulisan buku, telaah pustaka, konstruksi teori dan sistematika penulisan.

Kemudian, Bab kedua membahas filsafat dan ekonomi Islam dengan cakupan kajian tentang hubungan filsafat, ilmu, pengetahuan dan agama; landasan filsafat; serta hubungan filsafat dan ekonomi.

Selanjutnya, Bab ketiga membahas aspek ontologi ekonomi Islam yang mencakup konsep ekonomi Islam, asas-asas ekonomi Islam dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Bab keempat membahas aspek epistemologi ekonomi Islam mencakup sumber hukum dan pemikiran dalam ekonomi Islam, urgensi usul fiqih dalam ekonomi Islam dan urgensi maqasid syariah, urgensi qawaid fiqhiyyah dalam ekonomi Islam.

Sementara Bab kelima akan membahas aspek aksiologi dalam ekonomi Islam yang mencakup tujuan, kegunaan nilai-nilai dan sifat

¹¹Ilyas Supena, *Pengantar Filsafat Islam*, (semarang:Walisongo Press.2010.hal:24-26

ekonomi Islam; kesatuan aspek hukum, etika dan tauhid dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya Bab keenam akan memberikan beberapa contoh kasus yang mengungkap beberapa sisi filosofis dalam ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional.

Terakhir, Bab ketujuh merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

DISKURSUS FILSAFAT DAN EKONOMI ISLAM

A. Hubungan Filsafat, Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Agama

1. Pengertian Filsafat

Kata filsafat atau falsafah berasal dari perkataan Yunani *Philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan (*philein* = cinta dan *Sophia* = hikmah, kebijaksanaan). Jadi *Philosophia* berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran.¹ Ada yang mengatakan bahwa filsafat itu berasal dari kata *philos* (Keinginan) dan *Sophia* (hikmah, kebijaksanaan) dan ada juga yang mengatakan bersasal dari kata *phila* (mengutamakan, lebih suka) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan). Jadi kata filsafat berarti mencintai atau lebih suka atau keinginan kepada kebijaksanaan. Orangny disebut *Philosophos* yang dalam bahasa Arab disebut *Failasuf*.

Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dan pokok serta bertanggungjawab, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.²

Filsafat adalah suatu proses mencari kebenaran yang hakiki tentang Tuhan, alam dan manusia. Kebenaran tersebut diperoleh dengan jalan melakukan perenungan dan penyelidikan yang dilaksanakan melalui pengamatan, penyelidikan dan penelitian. Peng-

¹ Imam Barnadib. *Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Andi Offset. 1992. Hal:10

² Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1997. hal:1-2

amatan, penyelidikan dan penelitian dilakukan dengan pendekatan dan penalaran deduktif, induktif atau gabungan keduanya yang dilakukan secara kritis, terbuka, toleran, ditinjau dari berbagai sudut pandang tanpa prasangka, bebas dari mitos dan legenda.³

Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa arti filsafat yang sangat formal adalah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Sikap falsafi yang benar adalah sikap kritis yang merupakan sikap toleran dan terbuka dalam melihat persoalan dengan berbagai sudut pandang. Berfilsafat tidak hanya membaca, tetapi juga berargumentasi dengan teknik analisis, serta mengetahui bahan pengetahuan sehingga dirasakan dan dinikmati secara rasional filosofis. Filsafat mengantarkan orang yang mempelajarinya ke dalam refleksi pemikiran yang penuh dengan hikmah. Mencari jawaban masalah yang diragukan, tetapi jawaban yang ditemukan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi keyakinan absolut.

Sementara itu, Solomon dan Higgins menyatakan bahwa seseorang bisa dikatakan berpikir secara filsafat ketika prosesnya mencakup unsur-unsur berikut:⁴

- a. Ide yang diartikulasikan secara jelas.
- b. Berpikir secara kritis dimana ide yang tidak berkualitas dan kritis, tidak berkembang dan berargumen belumlah bisa dikatakan filsafat. Poin ini merupakan instrumen paling bernilai dalam filsafat, kemampuan membaca dan berpikir secara kritis.
- c. Argumentasi. Filsafat bukan sekedar menyampaikan pendapat, tapi juga memberikan argumentasi untuk mendukung pendapat dan argumen yang bertentangan dengan argumen yang dipunya.
- d. Masalah. Filsafat bukan sekedar spekulasi dan argumen acak tentang sebuah topik tertentu melainkan distimulasi oleh

³Aceng Rahmat, et al. *Filsafat Ilmu Lanjutan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. hal:106

⁴Solomon dan Higgins, *The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy*, (USA: Wadsworth, 2010), hlm. 13-14.

sebuah masalah, perhatian riil. Salah satu contoh persoalan filosofis adalah masalah kematian dan makna hidup karena semua orang peduli dengan pertanyaan tentang masalah hidup dan mati. Contoh lainnya adalah pengetahuan yang muncul sebagai akibat dari tantangan yang diberikan seseorang terhadap kemampuan kita untuk mengetahui dan filsuf sedari dulu mencoba menjawab tantangan tersebut.

- e. Imajinasi. Ide dengan kualifikasi dan argumen bisa dikatakan sudah masuk dalam kategori filsafat, namun terasa membosankan dan tidak menginspirasi. Oleh karena itu, diperlukan analogi dan metafora atau bentuk imajinatif lainnya.

Lebih lanjut, Solomon dan Higgins berpendapat bahwa secara sederhana, filsafat merupakan pengalaman mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, tentang apa yang kita ketahui, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita yakini. Pengajuan beragam pertanyaan semacam itu merupakan sebuah proses untuk memperoleh hakikat segala sesuatu. Respon atau jawaban masing-masing kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengungkap jaringan keyakinan dan doktrin yang selama ini barangkali belum bisa kita artikulasikan sebelum pertama-tama kita menemukan diri kita memperdebatkannya. Tidak heran jika seseorang untuk pertama kalinya berdebat tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terdengar aneh, kaku dan bahkan membuat frustrasi. Namun, itulah inti dari pertanyaan-pertanyaan filosofis secara umum, yakni mengajarkan kita bagaimana berpikir tentang, mengartikulasikan dan berargumen untuk segala sesuatu yang kita yakini dan untuk mengklarifikasi keyakinan tersebut untuk diri kita sendiri dan menghadirkannya dalam bentuk yang jelas dan meyakinkan kepada orang lain yang barangkali sepakat atau juga tidak sepakat dengan kita.⁵

Filsafat adalah seni kritik yang bukan semata-mata membatasi diri pada destruksi atau seakan-akan takut untuk membawa pan-

⁵ Solomon dan Higgins, *The Big Questions.....*, hlm. 28.

dangan positifnya. Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa kritisnya filsafat adalah kritis dalam arti tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan sesuatu sebagai sudah selesai.⁶

Selain itu, secara konseptual filsafat merupakan cabang pengetahuan yang memiliki cakupan objek yang sangat luas meliputi seluruh fenomena dan realitas. Demikian luasnya, sehingga mendefinisikan filsafat merupakan persoalan yang sangat filosofis juga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, orang dapat mendefinisikan filsafat dengan cara berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Diantara beberapa definisi filsafat tersebut antara lain:

1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis.
2. Filsafat adalah sebuah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi.
3. Usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Filsafat berusaha memadukan temuan sains dengan pengalaman kemanusiaan sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam semesta dan isinya.⁷

2. Filsafat Ilmu

Secara *epistemology*, Filsafat Ilmu berasal dari bahasa Latin, *episteme*, yang berarti *knowledge*, yaitu pengetahuan, *logos* berarti *theory*. Jadi *epistemology* berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode, cara dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran dan batasan ilmu manusia. Dalam filsafat *epistemology* adalah cabang filsafat yang meneliti asal, struktur, metode-metode dan kesahihan pengetahuan. Filsafat ilmu atau *epistemology* adalah analisis filosofis terhadap sumber-sumber pengetahuan. Darimana dan bagaimana pengetahuan diperoleh.⁸

⁶ Erfan Helmi Juni. *Filsafat Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012. Hal:16

⁷ Ilyas Supena. *Pengantar Filsafat Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2010. hal:2-3

⁸ Sutardjo A. Wiramihardja. *Pengantar Filsafat*. Bandung: Remadja Karya. 2006. hal:32

Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Ilmu merupakan cabang dari pengetahuan.⁹ Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang secara kritis menguji berbagai konsep, masalah, metode, ruang lingkup, area, praktik dan hasil sains. Hasil-hasil sains tersebut bisa mencakup hukum saintifik seperti peralatan yang digeneralisasi untuk mengatasi persoalan saintifik dan teori-teori saintifik. Filsafat ilmu seringkali menghasilkan konsep dan metode baru dalam mengatasi persoalan saintifik. Filsafat ilmu merupakan batu loncatan dalam pengembangan area kajian interdisiplin, yakni area kajian yang menyatukan konsep, metode dan praktik penelitian berbagai disiplin berbeda. Salah satu contohnya adalah kombinasi kimia dan biologi untuk mengkaji kemistri organisme biologis dan proses pada level molekuler. Kombinasi tersebut terbukti sukses dengan melahirkan disiplin baru yakni biologi molekular.¹⁰

Filsafat ilmu mengkaji aktivitas ilmuan dan sifat dasar serta karakteristik teori saintifik. Objek yang dikaji dalam filsafat ilmu adalah sains dan ilmuan bagaimana dulu, sekarang dan kemungkinan nantinya. Selain fokus pada metode yang digunakan dalam penemuan, elaborasi dan konfirmasi teori, filsafat ilmu juga mengkaji dampak sains pada aktivitas dan kepentingan orang-orang yang bukan ilmuan serta institusi dan praktek non-saintifik yang menjadi bagian dari masyarakat. Filsafat ilmu menjadi penting karena sebagaimana filsafat secara umum, filsafat ilmu merupakan disiplin yang mencoba untuk mengekspos praduga-praduga yang menjadi basis pembentuk praktik-praktik penting dan institusi kehidupan. Filsafat ilmu membuat kita berpikir tentang apa yang kita lakukan dan kenapa kita melakukannya. Filsafat ilmu meneliti dengan

⁹Aceng Rahmat, et al. *Filsafat Ilmu Lanjutan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. hal: 109

¹⁰ Iannone, *Dictionary of World Philosophy*, (London: Routledge, 2001), hlm. 438.

cermat tujuan berbagai aktivitas manusia dan kemudian memper-tanyakan metode serta prosedur guna mencapai tujuan tersebut.¹¹

Ilmu atau pengetahuan ilmiah dalam bahasa Inggris *science*, dalam bahasa Yunani *episteme*. Filsafat ilmu ialah suatu usaha akal manusia yang teratur dan taat asas menuju penemuan keterangan tentang pengetahuan yang benar. Sasaran filsafat ilmu adalah mengadakan penataan dan pengetahuan atas dasar asas-asas yang dapat menerangkan terjadinya ilmu pengetahuan.

Aktivitas empiris yang berkaitan dengan dunia nyata meru-pakan aspek utama dalam pengetahuan atau keilmuan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pengetahuan mapan yang membahas beragam objek yang tidak dapat diobservasi (tidak kasat mata) seperti gen dan elektron, namun kesemuanya itu pada dasar-nya tetap mengacu pada dunia nyata di sekitar kita yang bisa dilihat, diraba dan dirasa. Usah yang dilakukan pengetahuan adalah mema-hami dunia empiris, mencari aturan-aturan alami yang tidak rusak dan tidak pula buta dan menangkap fakta tersebut dengan keya-kinan bahwa dunia mengikuti serangkaian jalan tertentu. Dunia empirislah yang berusaha dipahami oleh pengetahuan sehingga dalam prosesnya, pengetahuan harus melibatkan pemanfaatan hukum efek eksplanasi dimana penjelasan saintifik harus berbasis hukum dan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dijelaskan itu benar-benar dan harus terjadi. Tidak sebatas itu, pengetahuan murni selalu terbuka untuk pemeriksaan terhadap dunia nyata sehingga tanggapan tidak serius selalu melanda pengetahuan yang tidak disertai dukungan empiris.¹²

Dalam melakukan penataan dan pengorganisasian ilmu, filsafat ilmu pertama-tama berusaha menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam penelitian ilmiah yaitu: prosedur-prosedur peng-amatan, pola-pola argumentasi, metode penyajian dan perhitungan, asumsi-asumsi metafisika dan seterusnya. Kemudian mengevaluasi

¹¹Machamer, "Philosophy of Science: An Overview for Educators," *Science & Education*, 7, 1998, hlm. 1-2.

¹²Ruse, "Creation-Science Is Not Science," *Science, Technology, and Human Values*, 7, No.4, 1982, hlm. 73-74.

dasar-dasar validitasnya berdasarkan sudut pandang logika formal dan metodologi praktis.¹³

Pada fase pertama filsafat diartikan sebagai segala usaha mencintai kebijaksanaan, mencari kebenaran dan kebijakan dengan segala dampaknya. Pada fase kedua filsafat diartikan sebagai pengetahuan yang menjawab pertanyaan tentang hakikat yang tertinggi (*ultimate question*) yang secara kebetulan tak terjawab oleh sains.¹⁴

Filsafat ilmu sebenarnya baru dikenal pada awal abad ke-20 dimana Francis Bacon sebagai peletak dasar filsafat ilmu dalam khasanah bidang filsafat secara umum. Ada berbagai definisi mengenai filsafat ilmu yang telah dihimpun oleh The Liang Gie (dalam Muntansyir & Munir, 2002) yang dianggap cukup representatif yaitu:

1. Filsafat ilmu diartikan sebagai suatu cabang ilmu dari filsafat yaitu merupakan kajian yang sistematis tentang ilmu terutama pada konsep, metode, pandangan atau pemikirannya dan juga letaknya pada kerangka umum dari suatu cabang ilmu pengetahuan. Filsafat seringkali disebut oleh sejumlah pakar sebagai induk semang dari ilmu-ilmu. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dan ruang Robert Ackermann menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini yang dibandingkan dengan pendapat-pendapat terdahulu yang telah dibuktikan.
2. Lewis White Beck menyatakan bahwa filsafat ilmu itu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah, serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan.
3. Cornelius Benjamin menyatkan bahwa filsafat ilmu merupakan cabang pengetahuan filsafati yang menelaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metode-metodenya, konsep-konsepnya

¹³Andi Hakim Nasution. *Pengantar ke Filsafat Ilmu*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 1999. Hal:27

¹⁴Abdur Rozak. *Filsafat Umum*. Bandung: Gema Media Pusakatama. 2002. hal:24-25

dan praanggapan-praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual.

4. May Brodbeck menyatakan bahwa filsafat ilmu itu sebagai analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu.
5. Menurut Suriasumantri (1995) menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah).¹⁵
6. Menurut Poespoprodjo (1997) filsafat ilmu adalah filsafat. Filsafat adalah refleksi yang mengakar terhadap prinsip-prinsip. Maka filsafat ilmu adalah refleksi yang mengakar terhadap prinsip-prinsip ilmu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa filsafat ilmu bukan bahan hafalan.¹⁶

Filsafat ilmu adalah usaha terus menerus untuk memperoleh pandangan yang mendalam dan mendasar tentang ilmu. Filsafat ilmu ialah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dengan cara-cara tertentu untuk memperolehnya. Dengan kata lain, filsafat ilmu sesungguhnya merupakan suatu penyelidikan lanjutan, karena apabila para penyelenggara berbagai ilmu melakukan penyelidikan terhadap objek-objek serta masalah-masalah yang berjenis khusus dari masing-masing ilmu itu, maka orang pun dapat melakukannya.¹⁷

Setiap cabang ilmu memiliki filsafatnya sendiri-sendiri. Misalnya saja filsafat ekonomi yang mempelajari tentang beragam persoalan dan konsep metodologis dan normatif yang ada dalam ekonomi. Filsafat ekonomi membahas teori-teori ekonomi dan hubungannya dengan masalah kebijakan dan kehidupan sosial.

¹⁵ Suriasumantri, J.S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.1995. Hal:91

¹⁶Poespoprodjo, W. *Aktualisasi Filsafat Ilmu – Ke Arah Kemasakan Praktek dan Pengelolaan Ilmu, dalam Baharuuddin Salam: Logika Materii(Filsafat Ilmu Pengetahuan)*, Jakarta: Penerbit: Rineka cipta.1997.Hal:92

¹⁷Beerling.*Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia. 1985. Hal:92-93

Contoh lainnya adalah filsafat pendidikan yang merupakan penyelidikan filosofis yang berhubungan dengan tujuan dan ideal pendidikan. Filsafat sejarah sebagai cabang filsafat yang mempelajari sejarah manusia, berusaha untuk mencatat dan menginterpretasikannya. Filsafat bahasa yang merupakan studi filosofis bahasa mencakup jenis bahasa, artifisialnya, unsur-unsur utama bahasa seperti bentuk tata bahasa, kosa kata, makna dan fungsinya, praktek bahasa di masyarakat dan hubungannya dengan studi terkait seperti linguistik. Filsafat hukum atau kebijaksanaan terkait hukum merupakan studi tentang konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam sistem hukum, yurisprudensi dan hubungan antara hukum dengan moralitas. Filsafat matematika sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat dasar, ruang lingkup dan status ontologis materi kajian matematika, basis pengetahuan matematika dan hubungan pengetahuan matematika dengan aplikasinya. Filsafat pikiran atau filsafat psikologi yang fokus utamanya berhubungan dengan konten dan sifat dasar peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi mental, terutama kesadaran, konsep diri atau ego dan struktur hidup pikiran dan mental. Dan masih banyak cabang filsafat lainnya seperti filsafat biologi, filsafat agama, filsafat ilmu dan sebagainya.¹⁸

Lingkup pengetahuan manusia secara tepat dan lebih memadai. Filsafat telah mengantarkan pada sebuah fenomena adanya siklus pengetahuan sehingga membentuk sebuah konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar-bercabang secara subur sebagai sebuah fenomena kemanusiaan. Masing-masing cabang pada tahap selanjutnya melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri.

Berdasarkan sejarah filsafat, terkenal istilah “Wahai manusia, kenalilah dirimu!” yang merupakan sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Socrates dan filsuf Yunani lainnya. Pertanyaan ini berasal dari kata-kata yang tertulis di atas pintu masuk kuil

¹⁸ Iannone, *Dictionary of World Philosophy.....*, hlm. 402-438.

Apollo di Delphi sebagai tempat suci para Dewa Yunani. Di masa Yunani Kuno, para penduduk mengunjungi Dewa mereka untuk memohon takdir yang akan mereka terima atau terkait tindakan apa yang perlu mereka lakukan dalam situasi tertentu. Setiap orang yang mendatangi kuil tersebut membaca tulisan "*Know Thyself*" yang terkenal tersebut tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengarah pada kebenaran yang lebih dalam dibandingkan apa yang dapat mereka terima dari para Dewa. Bagaimana tidak, kata-kata tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa sebelum mempertanyakan beragam hal lain, terlebih dahulu kita harus mempertanyakan pertanyaan paling fundamental dalam hidup kita yakni tentang siapa kita sebenarnya.¹⁹

Selanjutnya setelah mempertanyakan tentang dirinya, filsafat berkembang karena manusia merasa kagum dan merasa heran. Pada tahap awalnya kekaguman atau keheranan itu terarah pada gejala-gejala alam. Dalam perkembangan lebih lanjut, karena persoalan manusia makin kompleks. Sekalipun bertanya tentang seluruh realitas, filsafat selalu bersifat "filsafat tentang" sesuatu: tentang manusia, tentang alam, tentang tuhan (akhirat), tentang kebudayaan, kesenian, bahasa, hukum, agama, sejarah dan sebagainya.

3. Objek Pembahasan Filsafat Ilmu

Objek kajian utama filsafat adalah "alam" dan yang paling fokus dibidik adalah manusia dilihat dari kedudukannya sebagai manusia di muka bumi ataupun fungsi dan perannya sebagai anggota masyarakat. Filsafat menyatakan seluruh yang ada dan yang mungkin ada sebagai realitas sebenarnya, sebagaimana hakikat segala sesuatu adalah hakikat itu sendiri.²⁰

Objek ilmu filsafat ialah segala sesuatu yang dikenai predikat yang paling umum. Yaitu predikat-predikat yang lain dari segala sesuatu adalah predikat yang paling khusus daripada ada. Oleh

¹⁹Gurdijief, "Self-Knowledge and Understanding," *www.lightwinnipeg.org*, akses 30 Januari 2016, hlm. 1.

²⁰Efran Helmi Juni. *Filsafat Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012. hal: 17

karena itu, sesuatu yang dapat dikenai predikat, apapun bunyinya, seperti besar, bagus, murah, indah dan lain-lainnya.²¹

Menurut Juhaya S.Praja, Realitas yang dapat dijumpai manusia ada dua macam, yaitu:

1. Realitas yang disepakati (*agreement reality*), yaitu segala sesuatu yang dianggap nyata karena kita mengatakan sebagai kenyataan.
2. Realitas yang didasarkan pada pengalaman (*Experimental reality*), yakni pengalaman manusia.

Adapun objek pembahasan filsafat ilmu dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Objek Material Filsafat Ilmu

Objek Material Filsafat Ilmu adalah objek yang di jadikan sasaran menyelidiki oleh suatu ilmu, atau objek yang di pelajari oleh ilmu itu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah di susun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara umum.

2. Objek Formal Filsafat Ilmu

Objek pembahasan filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang harus ada dengan sendirinya dan keberadaannya tidak disebabkan oleh keberadaan yang lain atau adanya tanpa ada kemungkinan yang lain, sedangkan ada yang tidak wajib, keberadaannya kerena kehadiran yang mahada. Oleh karena itu, wajib bergantung pada berbagai kemungkinan. Itulah yang dimaksud objek formal filsafat.²²

Objek Formal Filsafat Ilmu adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek filsafat ilmu adalah hakikat (esensi) ilmu pengetahuan artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan,

²¹Sunarjo Wreksosuhardjo.*Berfilsafat Menuju Ilmu Filsafat Pancasila PADMONOBO Pembawa Amanat Dewata Mengajarkan Kesaktian*.Yogyakarta:Andi.2014.hal: 5-6

²²Efran Helmi Juni.*Filsafat Hukum*.Bandung: CV Pustaka Setia.2012.hal:18

seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang di bicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan yakni landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis.

Filsafat berangkat dari pengalaman konkret manusia dalam dunianya. Pengalaman manusia yang sungguh kaya dengan segala sesuatu yang *tersirat* ingin dinyatakan secara *tersurat*. Dalam proses itu *intuisi* (merupakan hal yang ada dalam setiap pengalaman) menjadi basis bagi proses *abstraksi*, sehingga yang tersirat dapat diungkapkan menjadi tersurat.

Dalam filsafat, ada *filsafat pengetahuan*. "Segala manusia ingin mengetahui", itu kalimat pertama Aristoteles dalam *Metaphysica*. Obyek materialnya adalah gejala "manusia tahu". Tugas filsafat ini adalah menyoroiti gejala itu berdasarkan sebab-musabab pertamanya. Pada gilirannya gejala ilmu-ilmu pengetahuan menjadi obyek material juga dan kegiatan berfikir itu (sejauh dilakukan menurut sebab-musabab pertama) menghasilkan *filsafat ilmu pengetahuan*. Kekhususan gejala ilmu pengetahuan terhadap gejala pengetahuan dicermati dengan teliti. Kekhususan itu terletak dalam cara kerja atau metode yang terdapat dalam ilmu-ilmu pengetahuan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Yang menyangkut asal usul, struktur, metode dan validitas ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat (esensi) ilmu pengetahuan artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia.²³

²³Sekar Rukmi, *Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu*.Jurnal.2014.hal:1-2

4. Hubungan Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Agama

Memahami sains juga mencakup pemahaman tentang apa yang tidak bisa dilakukan sains (keterbatasan sains). Salah satu bentuk keterbatasan sains adalah sifat dasarnya yang sementara dimana tidak ada bukti yang absolut sehingga tidak ada sains absolut. Keterbatasan lain yang dimiliki sains adalah terkait dengan presisi dan akurasi dimana sains pada dasarnya memiliki karakter kira-kira dimana data yang tersedia bisa saja tidak jelas dan membutuhkan interpretasi dan interpolasi.²⁴ Selain itu, keterbatasan sains juga bisa terletak pada kemampuan individu dalam menguasai pengetahuan yang begitu luas. Ketimpangan antara keterbatasan pengetahuan individu dalam disiplin tertentu dengan totalitas akumulasi pengetahuan yang tumbuh secara konstan juga sangatlah jelas. Hal ini dikarenakan, meskipun intelegensi merupakan karakteristik dan berpotensi aktif pada setiap diri manusia, namun faktanya hanya sedikit orang yang benar-benar menggunakan intelegensinya tersebut.²⁵

Perkembangan kemajuan sains dan teknologi pada zaman khilafah Islamiah yang dicapai kaum muslimin dimulai dengan pengalihan pengetahuan yang ada pada filsafat Yunani ke lingkungan dunia Islam. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Plato dan Aristoteles yang sudah berkembang terlebih dahulu. Pengetahuan dan filsafat Yunani dipelajari dengan cara menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani kedalam bahasa Arab agar dapat dibaca oleh masyarakat, baik untuk kepentingan pengetahuan semata maupun untuk pengkajian lebih lanjut. Dalam sejarahnya, kegiatan penerjemahan buku-buku Yunani di negeri Arab dimulai saat Suriah telah menjadi pusat pertemuan kekuasaan Romawi dan Persia, sehingga Suriah dipandang sebagai pemeran penting penyebaran kebudayaan Yunani ke Timur dan juga ke Barat. Oleh umat Kristen

²⁴Machamer, "Philosophy of Science: An Overview for Educators," *Science & Education*, 7, 1998, hlm. 5.

²⁵Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*, (Leiden: Brill, 2007), hlm. 308-309.

Suriah terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Walaupun tujuan utama sekolah-sekolah tersebut menyebarkan pengetahuan Injil, namun pengetahuan ilmiah seperti kedokteran banyak diamati oleh para pelajar. Sayangnya pihak Gereja memandang ilmu kedokteran itu sebagai ilmu sekuler dan dengan demikian posisinya lebih rendah daripada ilmu pengobatan spiritual yang merupakan hak istimewa para pendeta.²⁶

Kegiatan penyebaran filsafat Yunani di Suriah juga dilakukan oleh seorang tokoh Kristen bernama Nestorius yang sangat terpengaruh oleh pemikiran para filsuf Yunani. Penerjemahan buku-buku karya filsuf Yunani yang dilakukan oleh umat Kristen ini berkembang dengan bebas menembus kekuasaan Islam tanpa terjadi penolakan terhadap pemikiran-pemikiran yang datang dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghalang-halangi kebebasan intelektual dan juga sekaligus menunjukkan kecintaan umat Islam terhadap ilmu Pengetahuan.

Sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa kekhalifahan (Khulafaurrasyidin) ilmu pengetahuan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu hal mengenai perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa *Fitnah al-Kubra*, yang tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis an-sich seperti yang dipahamkan selama ini, tetapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca terjadinya *fitnah al-Kubra* muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politis. Pada saat itu muncul aliran Syi'ah yang membela Ali, aliran Khawarij dan kelompok Muawiyah.²⁷

Adanya pertentangan dan perbedaan aliran dalam hal teologis tersebut, menumbuhkan kegiatan kajian tentang teologi Islam lebih sistematis, misalnya tentang masalah hukum, masalah

²⁶Qadir. *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*.. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002. Hal:35

²⁷Amsal Bachtiar. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005. Hal:39

kebebasan manusia dan peranan akal. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkembangan pemikiran mengenai berbagai hal tentang teologi Islam dan ilmu pengetahuan.

Seiring berkembangnya zaman, Filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan yang menghasilkan berbagai disiplin ilmu yaitu diantaranya filsafat ilmu dan psikologi. Oleh karena itu filsafat ilmu dan psikologi tidak bisa begitu saja lepas dari pengaruh-pengaruh pemikiran filsafati.²⁸

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Al-Zumar/ 29:17-18 yang Artinya:

17. dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku,

18. yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

Rasulullah Bersabda:

Hikmah itu adalah barang hak milik orang yang beriman dimanapun mereka temukan hikmah itu, mereka paling berhak untuk memilikinya.

Dari ayat dan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa disamping kebenaran mutlak yang terdapat pada agama dan yang dijelaskan di Al-Qur'an, juga diakui adanya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kebenaran tersebut merupakan hasil usaha manusia dengan akalnya. Akal adalah pemberian Allah Yang Maha Benar dan Allah menciptakannya tidaklah dengan kesia-siaan. Karena itu, akal bukanlah untuk di sia-siakan, tapi harus dimanfaatkan. Meski kebenarannya relatif, bukan berarti produk akal lantas ditinggalkan. Kebenaran relatif harus dimanfaatkan dengan senantiasa mengingat sifat kerelatifannya. Artinya dalam berpegang

²⁸Anna Febrianty Setianingtyas. *Peran filsafat Ilmu Bagi Pengembangan Psikologi (Suatu Tinjauan Menurut Aliran Psikologi Modern)*.Jurnal.2013

kepada kebenaran relatif, seseorang harus siap untuk meninggalkannya manakala ditemukan hasil yang lebih benar dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manakala kebenaran relatif bertentangan dengan kebenaran mutlak, ia harus segera berpindah kepada kebenaran mutlak tersebut.

Dengan keterangan diatas jelaslah, bahwa di samping ada kebenaran mutlak yang langsung datang dari Allah SWT, diakui pula eksistensi kebenaran relatif sebagai hasil budaya manusia, baik kebenaran itu berupa kebenaran spekulatif (filsafat) dan kebenaran positif (ilmu pengetahuan) maupun kebenaran sehari-hari (pengetahuan biasa).

Filsafat diibaratkan sebagai pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infantri. Pasukan infantri adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan.²⁹

Manusia tidak bisa hidup hanya dengan berpegang kepada kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat, tanpa adanya kebenaran agama. Sebaliknya, manusia tidak bisa hidup wajar hanya dengan kebenaran mutlak agama, tanpa kebenaran-kebenaran relatif. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa manusia hanya dapat hidup dengan wajar dan benar manakala ia mau mengikuti kebenaran mutlak sekaligus mengakui eksistensi dan fungsi kebenaran lain yang berkesesuaian dengan kebenaran mutlak agama tersebut.

Wilayah agama, wilayah ilmu pengetahuan dan wilayah filsafat memang berbeda. Agama mengenai soal kepercayaan dan ilmu mengenai soal pengetahuan. Pelita agama ada di hati dan pelita ilmu ada di otak. Meski areanya berbeda, sebagaimana dijelaskan diatas, ketiganya saling terkait dan berhubungan timbal balik. Agama menetapkan tujuan, tetapi ia tidak dapat mencapainya. Tanpa bantuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Ilmu yang kuat dapat memperkuat keyakinan keagamaan. Agama senantiasa memotivasi

²⁹ Yuyun S Suriasumantri. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Kasih. 2005. Hal: 22

pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan membahayakan umat manusia jika tidak dikekang dengan agama.³⁰

Agama merupakan wahyu Tuhan yang benihnya muncul dari pengenalan dan pengalaman manusia di bumi. Pada tahapan pengenalan dan pengalaman ini, manusia menemukan tiga hal yang mencakup keindahan, kebenaran dan kebaikan yang jika digabung bernamalah dia suci. Manusia ingin mengetahui siapa atau apa yang Maha Suci dan dalam proses pencarian itulah mereka menemukan Tuhan dan berusaha berhubungan dengan-Nya. Usaha manusia inilah yang disebut dengan beragama. Oleh karena itu, keberagaman merupakan terpatrinya rasa kesucian dalam jiwa seseorang sehingga akan selalu mencari dan mendapatkan yang benar, yang baik dan yang indah. Pencarian terhadap kebenaran akan melahirkan ilmu, pencarian terhadap kebaikan akan melahirkan akhlak dan pencarian terhadap keindahan akan melahirkan seni.³¹

Islam adalah agama yang sangat menghormati ilmu pengetahuan dan mengangkat derajat para ilmuwan. Bahkan derajat ilmu pengetahuan dan pemilikinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ibadah yang dilakukan orang yang tidak berilmu. Dan islam merespon dengan baik terhadap ilmu pengetahuan apa saja yang dinilai bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat luas, maka islam tidak membedakan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dunia.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam menuntut ilmu pengetahuan darimana saja sumbernya, selama ilmu pengetahuan itu bisa dipetik manfaatnya bagi kelangsungan hidup masyarakat luas dan islam sangat mendukung kepada pemeluknya untuk selalu bersikap dan bertindak secara ilmiah sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-harinya terdapat perimbangan yang selalu disinari nilai-nilai keimanan dan ilmu pengetahuan.³²

³⁰ Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu..1997. Hal:36-38

³¹ Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Pustaka Mizan), hlm. 377-378.

³² Yusuf Qardhawi. *Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Izzan Pustaka. 2003. Hal:8-9

Pelajaran yang dapat diambil antara pertentangan ilmu dan agama yang pertama, harus sepenuhnya disadari agama dan ilmu memiliki sumber, cara kerja dan nilai kebenaran yang tidak selalu sama. Kedua, agama dan ilmu tidak dapat dengan begitu saja dihubungkan atau dipertentangkan. Ketiga, perlu dibuat demarkasi antara agama dan ilmu untuk membedakannya bukan untuk memisahkannya.³³

Dengan adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, manusia menyadari bahwa ada kekuasaan Tuhan Yang Maha Pencipta, Mahakuasa, Maha Mengetahui dan Maha Luas Kekuasaan-Nya. Allah berulang-ulang menyatakan bahwa hanya orang yang berilmu dan hanya orang yang berakal saja yang dapat membaca dan mengambil pelajaran. Dari ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab Al-qur'an dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan.³⁴

Ilmu, filsafat dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Dikatakan reflektif, karena ilmu, filsafat dan agama baru dapat dirasakan (diketahui) faedahnya manfaatnya dalam kehidupan manusia. Ilmu mendasarkan pada akal pikir lewat pengalaman dan indera yang memiliki batas fundamental. Batas fundamental itu adalah jarak yang tidak bisa ditembus atau dijembatani antara apa yang sebenarnya dengan apa yang bisa kita ketahui tentang sesuatu. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia dan segala sesuatu di dalamnya selalu diproses melalui konsep mental yang ada dalam pikiran. Dalam proses tersebut akan selalu ada yang tertinggal atau terdistorsi. Kita tidak bisa mengakses kebenaran sejati, akan selalu ada jarak antara realitas dan pengetahuan kita tentang realitas tersebut. Sementara Barrow sendiri membagi keterbatasan pengetahuan menjadi dua yaitu *absolute limit* dan *selective limit*. Batasan yang pertama berhu-

³³Aceng Rachmat. *Filsafat Ilmu Lanjutan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. Hal:201

³⁴Hamdani. *Filsafat SAINS*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011. Hal:283

bungan dengan objek kajian semisal alasan-alasan utama yang berhubungan dengan dunia sebagai objek, sementara batasan yang kedua berhubungan dengan kemampuan manusia menemukan atau mengetahui segala sesuatu dalam domain tertentu.³⁵ Di samping itu, ilmu merupakan disiplin empiris namun melibatkan spekulasi, imajinasi dan spesifikasi segala sesuatu yang tidak terlihat. Di samping observasi fakta dan melakukan uji coba, sains dan teknologi juga memerlukan pemikiran untuk menyusun teori-teori untuk menjangkau apa bisa diobservasi dan memperkirakan apa yang bisa menjelaskannya. Oleh karena itu, maka kebenaran sains dan teknologi tidaklah sekadar kebenaran fakta, melainkan juga kebenaran teori.³⁶

Pengetahuan dimaknai sebagai disiplin-disiplin yang mempelajari bagian luar fenomena, seperti fisika, kimia, biologi, neurologi, ekologi, geologi, astronomi, teori sistem dan sebagainya yang memiliki karakter umum berupa pentingnya bukti empiris berulang yang dapat dikonfirmasi oleh ahli lain di bidangnya. Berdasarkan teori integral, pengetahuan dikatakan baik jika memiliki tiga unsur berikut:³⁷

- 1) Injeksi instrumental yang mengacu pada praktek aktual contoh, paradigma, uji coba dan ordonansi.
- 2) Aprehensi langsung yang mengacu pada pengalaman langsung yang dibawa oleh injeksi. Pengalaman langsung yang dimaksud disini adalah pengalaman atau aprehensi data yang bisa berupa pengalaman langsung dan tidak langsung, serta jangkar sains semua penegasan konkrit dalam data tersebut.
- 3) Konfirmasi atau penolakan komunal sebagai pemeriksaan hasil (data dan bukti) dengan ilmuan lain yang juga memiliki injeksi dan aprehensi langsung yang lengkap.

³⁵Barrow, *Impossibility: The Limits of Science and the Science of Limits*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 41 & 69.

³⁶Solomon dan Higgins, *The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy*, (USA: Wadsworth, 2010), hlm. 166.

³⁷Clayton and Simpson, *Religion and Science*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 531 & 534.

Filsafat mendasarkan pada otoritas akal murni secara bebas dalam penyelidikan terhadap kenyataan dan pengalaman terutama dikaitkan dengan kehidupan manusia. Filsafat dimaknai sebagai pencarian terhadap kebijaksanaan sekaligus sebagai pencari kebijaksanaan. Pada asalnya, filsafat merupakan penjelasan rasional segala sesuatu, prinsip-prinsip umum yang mendasari penjelasan segala sesuatu, yang kemudian berubah menjadi ilmu tentang prinsip-prinsip awal segala sesuatu, perkiraan realitas sebenarnya. Di zaman sekarang, filsafat lebih populer sebagai kebijaksanaan pribadi yang secara teknis bermakna ilmu dari beragam ilmu, kritik dan sistematisasi atau organisasi seluruh pengetahuan. Filsafat mencakup metafisik, ontologi, epistemologi, logika, etika, estetika dan sebagainya.³⁸ Sementara itu, filsafat dalam sudut pandang individu merupakan keyakinan dan anggapan personal tertentu tentang dunia dan segala sesuatu. Sebagian memandang dunia memiliki awal dan akan berakhir, sementara yang lain meyakini dunia sudah dari sananya ada dan akan selalu begitu. Sementara itu, dalam sudut pandang sosial atau kelompok, filsafat merupakan keyakinan atau anggapan kelompok tertentu tentang dunia yang menyatukan perbedaan-perbedaan pandangan personal. Filsafat juga berhubungan dengan beragam persoalan terkait dengan aktivitas manusia seperti pengetahuan, moralitas, seni, literatur, agama dan juga dunia fisik. Secara karakteristik, persoalan-persoalan tersebut melibatkan ide-ide kompleks seperti eksistensi, alam, penjelasan dan justifikasi beragam aspek dunia dan sebagainya. Apapun karakteristik spesifik filsafat yang ada, aktivitas berpikir ini didorong oleh dua motif utama. *Pertama*, keingintahuan atau keheranan terhadap dunia. *Kedua*, perhatian, yang secara khusus mendorong persoalan-persoalan dalam etika dan sosiopolitik.³⁹

Penyelidikan manusia dengan akalnya dimulai dengan pertanyaan tentang alam semesta sehingga dalam sejarah filsafat Yunani, dikenal dengan nama filsafat alam yang fokus pada pem-

³⁸Runes, *The Dictionary of Philosophy*, (New York: Philosophical Library, tt.), hlm. 235.

³⁹Iannone, *Dictionary of World Philosophy*, (London: Routledge, 2001), hlm. 396-399.

bahasan tentang alam, terutama asal muasal segala sesuatu. Para filsuf Yunani mencari tahu unsur-unsur dasar yang membentuk semesta. Thales dan filsuf Yunani generasi setelahnya mengajukan pertanyaan dasar tentang apakah semesta ini tercipta dari air, udara, api, tanah atau kombinasi unsur-unsur tersebut. Thales yang dipandang sebagai *founding father* filsafat Yunani berpendapat bahwa semesta berawal dari air yang menurutnya merupakan prinsip segala sesuatu dan segala sesuatu tersebut berasal dan terbuat dari air. Filsuf Yunani yang berpendapat bahwa semesta berasal dari api adalah Heraclitus. Menurutny, api yang membara merupakan sebuah paradigma perubahan yang konstan, sementara dunia merupakan api yang selalu menyala dengan laut dan bumi sebagai abu dari api besar yang selalu menyala tersebut. Beda lagi dengan Miletus dan Anaximenes yang berpandangan bahwa bumi bersandar pada udara. Menurut mereka, dalam kondisi yang stabil, udara memang tidak terlihat, namun ketika udara mulai bergerak dan memadat, maka ia akan berubah jadi angin yang kemudian berubah jadi awan, lalu berubah jadi air dan kemudian memadat jadi lumpur dan batu. Lain lagi dengan Xenophanes yang berpendapat bahwa unsur dasar semesta adalah tanah. Menurutny, segala sesuatu berasal dari dan berakhir di tanah. Sementara itu, Democritus berpandangan bahwa atomlah yang merupakan unsur pembentuk semesta. Menurutny, dunia nyata secara kualitatif terdiri dari atom-atom yang sama dari beragam bentuk. Apapun pandangan filsuf-filsuf tersebut tentang unsur pembentuk semesta, mereka pada dasarnya mempertanyakan hal yang sama yaitu asal muasal alam semesta sehingga mereka disebut sebagai filsuf alam.⁴⁰ Menurut al-Farabi sebagaimana dikutip oleh Bakar, kemampuan berpikir atau akal manusia yang dengannya manusia dapat memahami segala sesuatu. Dengan kemampuan ini, manusia bisa memperoleh ilmu dan seni dan mampu membedakan antara tindakan baik dan buruk. Kemampuan berpikir manusia bisa dibedakan

⁴⁰Kenny, *Ancient Philosophy: a New History of Western Philosophy*, (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 2-27.

menjadi dua yaitu praktis dan teoretis. Yang praktis sebagiannya merupakan skill dan sebagian lagi merupakan refleksi. Sementara itu, yang teoretis merupakan kemampuan berpikir yang dengannya manusia mengetahui sesuatu yang ada yang tidak bisa kita ciptakan atau tidak bisa kita ubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Berdasarkan pandangan al-Farabi ini, maka kemampuan berpikir teoretis berfungsi untuk menerima beragam bentuk objek intelektual yang disebutnya dengan istilah *ma'qulat* (yang dapat dimengerti dan jelas) yang sifatnya universal, bentuk immaterial yang bebas dari materi dan keterkaitan dengan materi.⁴¹

Filsafat memiliki nilai-nilai sejati yang berguna dan bahkan penting bagi sains dan ilmuwan. Di antara nilai-nilai tersebut adalah paradigma dan praduga. Pentingnya filsafat bagi sains dapat dengan mudah dipahami lewat perspektif Kuhnian tentang bagaimana sains berkembang. Menurut Haro, Kuhn menjelaskan bahwa kemajuan dalam sains bukanlah proses linier formulasi teoretis dan verifikasi eksperimental beragam teori saintifik, melainkan dalam bentuk revolusi dan perubahan paradigma. Paradigma sendiri menurut Kuhn bukanlah buku resep tentang hukum-hukum matematika dan kerja mekanis semesta atau serangkaian rumus dan istilah-istilah dan prosedur teknis. Menurutnya, paradigma mencakup cara-cara memandang dunia, beragam praktek instrumentasi, tradisi penelitian, nilai dan keyakinan yang dibagi bersama tentang pertanyaan mana yang dianggap sebagai pertanyaan saintifik. Di zaman sekarang, paradigma tertentu bahkan didukung oleh kondisi-kondisi tertentu institusional, batasan-batasan pemerintah dan juga stimulasi pasar yang akhirnya membuat ilmuwan bekerja dalam paradigma yang berbeda tentang dunia dan dengan cara yang berbeda. Perbedaan dalam paradigma keilmuan tersebut dipengaruhi oleh praduga atau prasangka ontologis, epistemologis dan etis. Jika hal ini yang terjadi, maka dapat dipahami bahwa sebuah paradigma tidak bisa muncul, mendapat dukungan,

⁴¹Bakar, *Classification of Knowledge in Islam: a Study in Islamic Philosophies of Science*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 1998), hlm. 54-55.

mengalahkan pesaingnya, berkonsolidasi dan secara berangsur-angsur hilang tanpa adanya serangkaian prasangka eksplisit atau setidaknya prasangka secara implisit. Dengan begitu, prasangka merupakan bagian intrinsik dan penting bagi sains dalam pencarian kebenaran. Secara sederhana, kita bisa lihat tugas filsafat dalam keterkaitannya dengan sains sebagai berikut:⁴²

- 1) Filsafat secara alami masuk ke dalam kerangkanya sendiri dan membangun beragam entitas yang dihadapi sains di dunia.
- 2) Filsafat mencermati istilah-istilah dan beragam praduga sains dalam rangka menganalisis dan mengklarifikasi secara kritis makna istilah yang digunakan sains, bagaimana istilah tersebut diartikulasikan dan asumsi apa saja yang diperlukan.
- 3) Filsafat mencari standar teori yang baik, model eksplanasi yang valid dan metode saintifik yang tepat. Filsafat bertugas menawarkan epistemologi yang tidak menghalangi tapi justru menstimulasi kemajuan sains.
- 4) Filsafat menyediakan panduan etis dan menemukan tujuan lebih luas dari sains.
- 5) Filsafat menemukan dan mengartikulasikan keterkaitan antara beragam konsep yang ditemukan dalam domain sains yang berbeda, baik ilmu alam, sosial ataupun kemanusiaan.
- 6) Filsafat menjelaskan bagaimana observasi bisa pas dalam kerangka dunia yang lebih luas dan menciptakan bahasa dimana hasil saintifik dan pengalaman manusia secara luas dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain.

Selanjutnya agama mendasarkan pada otoritas wahyu.⁴³ Agama yang ada di dunia, beragam jenis dan berbeda satu sama lainnya. Meskipun berbeda, agama-agama tersebut memiliki komponen-komponen utama yang mencakup sistem kepercayaan, menembus realitas transenden dan sikap manusia terhadap fokus,

⁴²Haro, "Science and Philosophy: A Love-Hate Relationship," *www.unav.es*, akses 28 April 2016, hlm. 7-8.

⁴³ Ahmad Syadali. *Filsafat Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1997. Hal. 37-38

makna dan tujuan utama. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka esensi konsep agama adalah bahwa agama melibatkan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang terutama berpusat pada Realitas transenden baik yang bersifat personal atau tidak, yang memberikan makna dan tujuan utama kehidupan. Setiap agama yang ada di dunia memiliki ajaran yang sama terkait tujuan hidup yakni menghamba pada Tuhan dan masuk surga.⁴⁴ Menurut al-Farabi sebagaimana dikutip oleh Bakar, agama dan filsafat berhubungan dengan realitas yang sama. Keduanya terdiri dari subjek yang sama, sama-sama memperhitungkan prinsip-prinsip utama yang ada dan akhir dari segala yang ada. Meskipun begitu, menurut al-Farabi, untuk segala hal yang dijelaskan filsafat berdasarkan persepsi intelektual, agama menjelaskannya berdasarkan imajinasi. Setiap hal yang ditunjukkan oleh filsafat, agama justru menggunakan metode persuasif. Lebih lanjut menurut al-Farabi, realita atau kebenaran pada dasarnya satu tapi pemahaman pikiran manusia terhadapnya yang berbeda tingkat kesempurnaannya. Untuk sampai pada kebenaran tersebut, ada dua pendekatan utama yang bisa digunakan yaitu filsafat dan agama (perlu diingat bahwa perbandingan yang dibuat al-Farabi dalam hal ini bukanlah filsafat yang dipahami sebagai sistem rasional yang diformulasi secara terpisah dari wahyu dan agama yang dipahami sebagai total tradisi yang diwahyukan). Kata agama yang dibedakan al-Farabi dari filsafat ini adalah *millah*, dimensi eksoteris pewahyuan, bukan wahyu dalam totalitasnya.⁴⁵ Selain itu, menurut Shihab agama merupakan wahyu Tuhan yang benihnya muncul dari pengenalan dan pengalaman manusia di bumi. Pada tahapan pengenalan dan pengalaman ini, manusia menemukan tiga hal yang mencakup keindahan, kebenaran dan kebaikan yang jika digabung bernamalah dia suci. Manusia ingin mengetahui siapa atau apa yang Maha Suci dan dalam proses pencarian itulah mereka menemukan Tuhan dan berusaha berhubungan dengan-Nya. Usaha manusia inilah yang

⁴⁴Meister, *Introducing Philosophy of Religion*, (New York: Routledge, 2009), hlm. 6 & 25.

⁴⁵Bakar, *Classification of Knowledge in Islam.....*, hlm. 79-81

disebut dengan beragama. Oleh karena itu, keberagaman merupakan terpatrynya rasa kesucian dalam jiwa seseorang sehingga akan selalu mencari dan mendapatkan yang benar, yang baik dan yang indah. Pencarian terhadap kebenaran akan melahirkan ilmu, pencarian terhadap kebaikan akan melahirkan akhlak dan pencarian terhadap keindahan akan melahirkan seni.⁴⁶

Prof. Nasroen, S.H, mengemukakan bahwa filsafat yang sejati haruslah berdasarkan kepada agama. Malahan filsafat yang sejati itu terkandung dalam agama. Apabila filsafat tidak berdasarkan kepada agama dan filsafat hanya semata-mata berdasarkan atas akal pikir saja, maka filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran obyektif karena yang memberikan pandangan dan putusan adalah akal pikiran. Sedangkan kesanggupan akal pikiran itu terbatas, sehingga filsafat yang hanya berdasarkan kepada akal pikir semata-mata tidak akan sanggup memberi kepuasan bagi manusia, terutama dalam tingkat pemahamannya terhadap yang ghaib.⁴⁷

Ilmu pengetahuan terbukti telah membedakan martabat manusia dan derajatnya di mata Tuhan. Bagi orang Islam, Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Itu artinya, Ilmu pengetahuan benar-benar akan membedakan antara yang bodoh dengan yang pintar. Hajat manusia akan ilmu pengetahuan disebabkan oleh dua hal mendasar, yaitu:

1. Ilmu sebagai penunjuk kejalan yang lebih baik dalam kehidupan manusia di segala sektor dan aspek.
2. Ilmu sebagai alat untuk mempermudah jalan hidup manusia dalam menghadapi masalah.⁴⁸

Hubungan antara filsafat dan agama diantaranya:

1. Dalam usaha manusia memahami wahyu Allah secara tepat filsafat dapat saja membantu. Karena jelas bahwa jawaban atas

⁴⁶Shihab, *Wawasan al-Qur'an.....*, hlm. 377-378.

⁴⁷ Asmoro Achmadi. *Filsafat Umum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.1995, Hal:17

⁴⁸Beni Ahmad Saebani. *FILSAFAT ILMU (Kontemplasi Filosofis tentang Seluk Beluk Sumber dan Tujuan Ilmu Pengetahuan)*.2009. Bandung: Pustaka Setia. Hal:172

pertanyaan itu harus diberikan dengan memakai nalar (pertanyaan tentang arti wahyu tidak dapat dipecahkan dengan mencari jawabannya dalam wahyu saja, karena dengan demikian pertanyaan yang sama akan muncul kembali dan seterusnya). Karena filsafat adalah seni pemakaian nalar secara tepat dan bertanggung jawab, filsafat dapat membantu agama dalam memastikan arti wahyu tersebut.

2. Secara spesifik filsafat selalu dan sudah memberikan pelayanan itu kepada ilmu yang mencoba mensistematisasikan, membetulkan dan memastikan ajaran agama yang berdasarkan wahyu, yaitu ilmu teologi. Maka secara tradisional dengan sangat tidak disenangi oleh para filosof filsafat disebut *ancilla theologiae* (abdi teologi). Teologi dengan sendirinya memerlukan paham-paham dan metode-metode tertentu dan paham-paham serta metode itu dengan sendirinya diambil dari filsafat. Misalnya, masalah penentu Allah dan kebebasan manusia (masalah kehendak bebas) hanya dapat dibahas dengan memakai cara berpikir filsafat. Hal yang sama juga berlaku dalam masalah "*theodicea*", pertanyaan tentang bagaimana Allah yang sekaligus maha baik dan maha kuasa, dapat membiarkan penderitaan dan dosa berlangsung (padahal ia tentu dapat mencegahnya).
3. Filsafat dapat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru, artinya masalah-masalah yang pada waktu wahyu diturunkan belum ada dan tidak dibicarakan secara langsung dalam wahyu, seperti yang berhubungan dengan bidang moralitas. Misalnya masalah bayi tabung atau pengcangkokan ginjal. Bagaimana orang mengambil sikap terhadap dua kemungkinan itu: boleh atau tidak? Bagaimana dalam hal ini ia mendasarkan diri pada agamanya, padahal dalam kitab suci agamanya, dua masalah itu tidak pernah di bahas. Jawabannya hanya dapat ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip etika yang termuat dalam konteks lain dalam

kitab suci pada masalah baru itu. dalam proses itu diperlukan pertimbangan filsafat moral.

4. Filsafat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mengunggah agama dengan mengacu pada hasil ilmu pengetahuan dan ideology-ideologi masa kita, misalnya pada ajaran evolusi atau pada feminisme. Pelayanan keempat yang dapat diberikan oleh filsafat kepada agama diberikan melalui fungsi kritisnya. Salah satu tugas filsafat adalah kritik ideology. Maksudnya adalah sebagai berikut: masyarakat terutama masyarakat pasca tradisional, berada dibawah semburan segala macam pandangan, kepercayaan, agama, aliran, ideology dan keyakinan. Semua pandangan itu mengatakan kepada masyarakat bagaimana ia harus hidup, bersikap dan bertindak. Filsafat dapat menganalisa *claim-claim ideology* itu secara kritis, mempertanyakan dasarnya, memperlihatkan implikasinya, membuka kedok kepentingan yang barangkali ada di belakangnya.⁴⁹

Islam mengajarkan kepada manusia, sebagai khalifah di muka bumi berkewajiban menuntut ilmu, namun bersamaan dengan itu manusia juga harus berserah diri kepada kekuasaan Allah dalam pengertian beriman. Manusia diwajibkan berusaha dengan segala kemampuannya, tetapi hasilnya tergantung pada izin Allah.

B. Landasan Filsafat (Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)

1. Ontologi

“Secara terminologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti “ada” dan logos yang berarti “ilmu” yang artinya ilmu tentang yang ada.⁵⁰ Sedangkan secara terminologi ontologi adalah ilmu tentang hakekat yang ada sebagai yang ada (The theory

⁴⁹Ilyas Supena, *Pengantar Filsafat Islam*, (Semarang:Walisongo Press.2010), hal:24-26

⁵⁰ Surajiyo. *Filsafat Ilmu* (Jakarta, 2008), hlm. 158

of being qua being). Sementara itu, Mulyadi Kartanegara menyatakan bahwa ontology diartikan sebagai ilmu tentang wujud sebagai wujud, terkadang disebut sebagai ilmu metafisika.⁵¹ Metafisika disebut sebagai “induk semua ilmu” karena ia merupakan kunci untuk menelaah pertanyaan paling penting yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, yakni berkenaan dengan hakikat wujud.⁵² Sedangkan, menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani.

Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang mencoba mencermati hakikat keilmuan. Membahas ilmu dari dasar keilmuan itu ada, bentuk ilmu, wajah ilmu dan bandingan-bandingan ilmu dengan yang lain akan menuntut manusia berfikir ontologisme. Ontologi menjadi pijakan manusia berfikir kritis tentang keadaan alam semesta yang sesungguhnya. Ilmu itu telah tertata secara sistematis dengan pengalaman metodologi yang rapi. Sebelum menjadi ilmu, sebenarnya masih berupa pengetahuan. Pengetahuan itu juga pengalaman manusia, pengalaman yang mantap, akan menjadi ilmu pengetahuan. Dengan ontologi, orang akan mampu membedakan, mana ilmu, mana pengetahuan, ilmu pengetahuan dan mana pula yang non ilmu.

Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 M yang menamai teori tentang hakikat yang ada bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff (1679 – 1754 M) membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi⁵³. Sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi dan teologi. Objek kajian ontologi adalah hakikat seluruh kenyataan. Ontologi sebagai cabang filsafat ilmu telah melahirkan sekian banyak aliran ontologisme. Ilmu

⁵¹ Mulyadhi Kartanegara. *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*. Jakarta: Baitul Ihsan. 2006. hlm.156

⁵² Muhammad Taqi Misbah Yazdi. *Buku Daras Filsafat Islam*. Bandung: Mizan. 2003. Hlm. 165.

⁵³ Mulyadhi Kartanegara, *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*, (Jakarta: Baitul Ihsan. 2006). hlm. 156.

memang berbeda dari pengetahuan-pengetahuan secara filsafat, namun tidak terdapat perbedaan yang prinsipil antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, dimana keduanya mempunyai ciri-ciri keilmuan yang sama.⁵⁴

Tiap aliran ontologi biasanya memegang pokok pikiran yang satu sama lain saling mendukung dan melengkapi yang nantinya, objek ini melahirkan pandangan-pandangan (*point of view*)/aliran-aliran pemikiran dalam kajian ontologi⁵⁵. Ciri-ciri khas terpenting yang terkait dengan ontologi antara lain: Pertama, yang ada (*being*), artinya yang dibahas eksistensi keilmuan. Kedua, kenyataan atau realitas (*reality*), yaitu fenomena yang didukung oleh data-data yang valid. Ketiga, eksistensi (*existence*), yaitu keadaan fenomena yang sesungguhnya yang secara hakiki tampak dari tidak tampak. Keempat, esensi (*essence*), yaitu pokok atau dasar suatu ilmu yang lekat dalam suatu ilmu. Kelima, substansi (*substance*), artinya membicarakan masalah isi dan makna suatu ilmu bagi kehidupan manusia. Keenam, perubahan (*change*), artinya ilmu itu cair, berubah setiap saat, menuju ke suatu kesempurnaan. Ketujuh, tunggal (*one*) dan jamak (*many*), artinya keadaan suatu ilmu dan fenomena itu terbagi menjadi dua. Ontologi akan mengungkap apa dan seperti apa benda, sesuatu dan fenomena itu ada.

Persoalan tentang ontologi ini menjadi pembahasan utama di bidang filsafat, baik filsafat kuno maupun modern. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Bedanya, realitas dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan: apakah sesungguhnya realitas yang ada ini; apakah realitas yang tampak ini suatu realita materi saja; adakah sesuatu di balik realita itu; apakah realita ini terdiri dari satu unsur (monoisme), dua unsur (dualisme) atau serba banyak (pluralisme).⁵⁶ Di bawah ini adalah berbagai macam pandangan tentang ontologi.

⁵⁴ Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta, 2003), hlm. 33

⁵⁵ Jostein Gaarder, *Dunia Sophie*, hal. 48.

⁵⁶ Jalaluddin dan Abdullah, *Idid*. hlm. 127

a. Monoisme

Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Block Universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran yaitu materialisme dan idealisme.⁵⁷

Materialisme menganggap bahwa yang benar-benar ada hanyalah materi. Sedangkan ruh atau jiwa bukanlah suatu kenyataan yang bisa berdiri sendiri bahkan ia hanya merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Materialisme sering juga disebut dengan naturalisme artinya bahwa yang benar-benar ada hanyalah alam saja. Sedangkan yang di luar alam tidaklah ada. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh para filosof pra-sokratik seperti Thales⁵⁸, Anaximandros, Anaximenes, Democritos dan lainnya. Thales misalnya beranggapan bahwa unsur dari semua makhluk hidup adalah air. Sedangkan Anaximandros beranggapan bahwa alam semesta ini berasal dari *apeiron* artinya “yang tak terbatas” yaitu yang bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan dan meliputi segalanya. Anaximenes beranggapan lain, bahwa prinsip yang merupakan asal usul segala sesuatu adalah udara. Dan Democritos menganggap bahwa alam ini tersusun dari atom-atom yang tak terhingga jumlahnya.

“Sedangkan sebagai lawan dari materialisme yaitu idealisme yang berarti juga spiritualisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata “idea” yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh (sukma) atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk

⁵⁷ Amsal Bakhtiar. hlm. 135

⁵⁸ Mulyana dalam *Diktat Kuliah Filsafat Agama UIN Bandung* (Bandung, 2001), hlm. 13

dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelmaan ruhani.”⁵⁹

“Perintis dari aliran ini adalah Plato yang selanjutnya akan dikembangkan oleh George Barkeley, kemudian oleh Kant, Fichte, Hegel hingga Schelling. Menurut Plato realitas seluruhnya seakan-akan terdiri dari dua “dunia”. Satu “dunia” mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada panca indera. Pada taraf ini diakui bahwa semuanya tetap berada dalam perubahan. Bunga yang kini bagus, keesokan harinya sudah layu. Lagi pula dunia inderawi ditandai oleh pluralitas. Selain bunga tadi, masih ada banyak hal yang bagus juga. Harus diakui juga bahwa disini tidak ada sesuatu pun yang sempurna. Disamping “dunia” inderawi itu terdapat satu “dunia” lain, suatu dunia ideal atau dunia yang terdiri atas ide-ide. Dalam dunia ideal ini sama sekali tidak ada perubahan. Semua ide bersifat abadi dan tak terubahkan. Dalam dunia ideal tidak ada banyak hal yang bagus, hanya ada satu ide “yang bagus”. Demikian halnya dengan ide-ide yang lain. Dan setiap ide-ide bersifat sama sekali sempurna.”⁶⁰ Oleh sebab itu, menurut Plato yang benar-benar real itu hanyalah *idea* atau dunia ide sedangkan yang materi merupakan pengejawantahan dari ide⁶¹.

Dalam dialog Politeia yang sangat masyhur Plato bercerita mitos tentang gua. Ia menggambarkan kehidupan di dunia ini ibarat tahanan dalam gua yang hanya mempunyai pengalaman di dalam gua saja. Sebaliknya mereka tidak mengetahui realitas di luar gua yang nyata adanya. Baru ketika mereka keluar dari gua mereka baru percaya bahwa ada realitas selain pengalaman yang mereka lihat selama di dalam gua. Artinya gua itu adalah dunia yang disajikan kepada panca indera kita. Kita menerima semua pengalaman secara spontan begitu saja. Padahal sebenarnya pengalaman inderawi itu tak lebih dari sekedar bayang-bayang semata.⁶²

⁵⁹ Amsal Bakhtiar. hlm. 138

⁶⁰ K. Berten, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta, 2006), hlm. 131

⁶¹ Mulyana dalam *Diktat Kuliah Filsafat Agama UIN Bandung* (Bandung, 2001), hlm. 15

⁶² K. Berten. hlm. 137

b. Dualisme

Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama ini kedua hakikat ini adalah dalam diri manusia.⁶³

Tokoh paham ini adalah Rene Descartes. Sebagai pendobrak filsafat modern Descartes mempunyai *concern* yang jauh lebih rumit. Ia tidak lagi melihat alam yang secara terus-menerus dijadikan objek kajian dalam ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi ia melihat relasi antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui⁶⁴. Dengan demikian ia memosisikan manusia tidak hanya sebagai subjek saja tetapi sekaligus sebagai objek. Pertanyaannya adalah apakah pengetahuan yang kita miliki itu karena memang ada realitas di luar sana atau justru karena faktor keberadaan manusia sebagai subjek yang berpikir⁶⁵. Diktum Descartes Cogito Ergo Sum “aku berpikir maka aku” ada jelas sekali memosisikan manusia sebagai subjek berpikir yang bebas. Karena saya berpikir maka saya menjadi ada demikian realitas yang lain menjadi ada pula. Manusia merupakan subjek yang sadar akan keberadaan dirinya. Paham inilah yang kemudian menjadi cikal bakal aliran eksistensialisme.

c. Pluralisme

Paham ini berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini ter-

⁶³ Amsal Bakhtiar. hlm. 142

⁶⁴ K. Berten. *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta, 2006), hlm. 133

⁶⁵ Mulyana dalam *Diktat Kuliah Filsafat Agama UIN Bandung* (Bandung, 2001), hlm. 17

susun dari unsur banyak, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani Kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari empat unsur, yaitu tanah, air, api dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James seorang filosof dan psikolog kenamaan asal Amerika. Ia berpendapat bahwa dunia ini terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukanlah suatu universum, melainkan suatu multi-versum. Dunia adalah suatu dunia yang terdiri dari banyak hal yang beranekaragam atau pluralis.⁶⁶

d. Nihilisme

Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti *nothing* atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternative yang positif⁶⁷. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgeniev dalam novelnya *Fathers and Children* yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima nihilisme⁶⁸. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno, yaitu pada pandangan Georgias yang memberika tiga proposisi tentang realitas. *Pertama*, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. *Kedua*, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh pengindraan itu sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. *Ketiga*, sekalipun realitas itu dapat diketahui ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain.⁶⁹

e. Agnostisisme

Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun hakikat

⁶⁶ Amsal Bakhtiar. hlm. 143-144

⁶⁷ Mulyana dalam *Diklat Kuliah Filsafat Agama UIN Bandung* (Bandung, 2001), hlm. 23

⁶⁸ K. Berten. hlm. 140

⁶⁹ Amsal Bakhtiar. hlm. 145-146

ruhani. Kata *agnosticisme* berasal dari bahasa Yunani yaitu *agnostos* yang berarti “*unknown*”. A artinya *not* dan *no* artinya *know*. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat *transcendent*.⁷⁰ Beberapa tokoh aliran ini misalnya Soren Kiekegaar, Heidegger, Sartre dan Jasper.

Masalah ontologi ini semakin lama semakin berkembang tidak hanya di dunia filsafat Barat tetapi juga di dunia filsafat Islam. Misalnya dalam Islam kita kenal ada aliran Isyraqi dengan tokohnya Suhrawardi dan Hikmah Mutaalliyah oleh Mulla Sadra. Suhrawardi misalnya mendiskripsikan realitas ini bagaikan cahaya yang mempunyai gradasi dari sumber cahaya itu sendiri yang paling terang hingga yang paling lemah. Sumber cahaya itu adalah Tuhan dan cahaya yang semakin meredup itu bagaikan ciptaan-Nya yang bermacam-macam dari yang paling sempurna hingga yang paling rendah. Sedangkan Mulla Sadra terkenal dengan pandangan *Asalatal-Wujud* dan *Wahdataal-Wujud*. Sadra beranggapan bahwa yang primer itu adalah wujud. Tanpa wujud segala sesuatu tidak akan pernah ada. Dan wujud dari semua hal adalah sama. Oleh sebab itu ia meyakini kesatuan wujud (*Wahdataal-Wujud*). Sedangkan yang membuat sesuatu itu berbeda dengan yang lain adalah karena aksidennya seperti warna dan lainnya.

Masalah ontologis memang menjadi perhatian yang paling serius dalam filsafat ilmu. Sebab ia bertanggungjawab atas kebenaran dari suatu ilmu itu. Oleh sebab itu, ia tidak berbicara tentang apa yang tampak tapi apa yang nyata. Sebab penampakan itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya.. Wilayah ontologi bukan berbicara pada tataran penampakan tapi kenyataan. Mampu mengetahui kenyataan yang hakiki itulah sebagai ilmu pengetahuan yang valid⁷¹. Jadi, pembahasan wujud dalam ontologi merupakan realitas

⁷⁰ Amsal Bakhtiar. hlm. 146-147

⁷¹ Mulyana dalam *Diklat Kuliah Filsafat Agama UIN Bandung* (Bandung, 2001), hlm. 30

mutlak dan lawan dari ketiadaan. Wujud dalam hal ini mencakup segala hal, mulai dari Dzat Ilahi, realitas-realitas abstrak dan material, baik substansi maupun aksiden dan baik esensi maupun keadaan.⁷²

2. Epistemologi

Epistemologi merupakan tahapan berikutnya setelah pembahasan ontologi dalam filsafat. "Istilah epistemologi dipakai pertama kali oleh J.F. Feriere yang maksudnya untuk membedakan antara dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi (metafisika umum)⁷³. Kalau dalam metafisika pertanyaannya adalah apa yang ada itu? Maka pertanyaan dasar dalam epistemologi adalah apa yang dapat saya ketahui?"⁷⁴

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *episteme* dan *logos*. *Episteme* biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran dan *logos* diartikan pikiran, kata, atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi *theory of knowledge*.⁷⁵

Dengan kata lain, epistemologi adalah bidang ilmu yang membahas pengetahuan manusia, dalam berbagai jenis dan ukuran kebenarannya.⁷⁶ Isu-isu yang akan muncul berkaitan dengan masalah epistemologi adalah bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh? Jika keberadaan itu mempunyai gradasi (tingkatan), mulai dari yang metafisik hingga fisik maka dengan menggunakan apakah kita bisa mengetahuinya? Apakah dengan menggunakan indera sebagaimana kaum empiris, akal sebagaimana kaum rasionalis atau bahkan dengan menggunakan intuisi sebagaimana urafa' (para sufi)? Berbicara tentang asal-usul pengetahuan maka ilmu

⁷² Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Hlm. 177.

⁷³M. Aslam Haneef, "Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa yang Salah?", *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: ISLAMIA*, Thn I, No. 6, 2005. Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, hlm. 50.

⁷⁴ Surajiyo. hlm. 24

⁷⁵ Surajiyo. hlm. 24

⁷⁶ Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Hlm. 83.

pengetahuan ada yang berasal dari manusia dan dari luar manusia⁷⁷. Pengetahuan yang berasal dari manusia meliputi pengetahuan indera, ilmu (akal) dan filsafat. Sedangkan pengetahuan yang berasal dari luar manusia (berasal dari Tuhan) adalah wahyu. Pembahasan epistemologi meliputi sumber-sumber atau teori pengetahuan, kebenaran pengetahuan, batasan dan kemungkinan pengetahuan, serta klasifikasi ilmu pengetahuan.

Apa saja sumber-sumber pengetahuan? Murtadha Muththahari mengatakan bahwa sumber pengetahuan tidak hanya rasio dan hati, melainkan alam dan sejarah.⁷⁸ Sedangkan M. Taqi Mishbah Yazdi lebih menekankan fakultas indriawi dan akal sebagai sumber pengetahuan. Adapun fakultas hati, dalam mencapai pengetahuan, merupakan ranah *'irfan* bukan filsafat.⁷⁹ Agaknya karena alasan inilah bahwa fakultas hati (*qalb, fu'ad*) merupakan pembahasan *'irfan* bukan filsafat, kita bisa memahami pandangan Yazdi yang tidak begitu menekankan daya hati dalam epistemologi—yang merupakan cabang filsafat. Ada juga yang menganggap bahwa sumber pengetahuan yang hakiki (primer) adalah wahyu sedangkan daya-daya lain lebih sebagai sumber sekunder.

Setidaknya ada tiga sumber pengetahuan yaitu 1) akal; 2) indriawi; dan 3) hati (intusi, *qalb, fu'ad*). Adapun wahyu, dalam hal ini wahyu yang dikodifikasikan dalam bentuk teks (kitab suci), tidak dimasukkan sebagai sumber pengetahuan. Karena kitab suci merupakan teks, yang akan berbicara ketika seseorang membacanya, maka pemahaman seseorang atas teks-teks suci tersebut yang dimasukkan sebagai sumber pengetahuan (Suteja, 2006).

⁷⁷Adi Setia, "Epistemologi Islam menurut Al-Attas: Satu Uraian Ringkas", *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: ISLAMIA ...*, hlm. 53.

⁷⁸Murtadha Muththahari, *Mengenal Epistemologi*, diterj. dari *Mas'ale-ye Syenokh* oleh Muhammad Jawad Bafaqih (Jakarta : Lentera, 2003), bab Sumber-Sumber Epistemologi, hal. 80-109.

⁷⁹Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, *Buku Daras Filsafat Islam*, diterj. dari *Philosophical Instructions: An Introduction To Contemporary Islamic Philosophy* oleh Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Bandung: Mizan, 2003), bab Epistemologi, hal.77-161.

Begitu juga dengan sejarah maupun alam. Sebab alam untuk menyampaikan pengetahuan membutuhkan penafsiran dari sang pengamat, walaupun struktur pengetahuan tersebut tidak memisahkan antara sang penahu dengan yang diketahui, tetap saja ia meniscayakan kemampuan manusia untuk menangkap pengetahuan tersebut. Alam sebagai alam luaran ditangkap dengan fakultas indriawi, jadi, pemahaman fakultas indriawi yang dimasukkan sebagai sumber pengetahuan atau pemahaman atasnyalah yang dimasukkan sebagai sumber pengetahuan.⁸⁰ Muththahari mengartikan epistemologi sebagai sesuatu yang dapat memberikan pada kita suatu kekuatan dan tenaga praktis, ataupun sesuatu yang dapat menunjukkan suatu hakikat. Karenanya ia menganggap bahwa alam merupakan salah satu sumber pengetahuan. Masalahnya, ada pemahaman dari sudut lain bahwa walaupun alam merupakan sesuatu yang dapat memberikan suatu kekuatan dan suatu tenaga praktis, ia tetap membutuhkan kemampuan fakultas manusia untuk menangkap sesuatu (realitas) itu. Sebagai misal, perkembangan fisika modern mutakhir, dalam hal ini fisika mekanika-kuantum, membuktikan bahwa keterlibatan manusia sebagai penahu menentukan realitas. Terkadang subatom ketika diamati dengan cara tertentu oleh sang pengamat menjadi gelombang, terkadang juga partikel. Hal ini disebut sebagai “teori ketidakpastian” Heisenberg⁸¹. Dunia fisika yang meyakini bahwa objek (yang diamati) mampu menyantirkan dirinya sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi sang pengamat, telah diguncangkan oleh teori relativitas-Einstein, teori ketidakpastian Heisenberg maupun mekanika kuantum. Dengan demikian, saya menganggap bahwa pemahaman atas alam dan sejarah (maupun kitab suci) yang dimasukkan sebagai sumber pengetahuan.

⁸⁰ Husain Heriyanto, *Paradigma-Holistik* (Bandung: Teraju-Mizan, 2002).

⁸¹ Mulyadi Kartanegara, *Pengantar Epistemologi Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), hlm.8.

3. Aksiologi

Jika ontologi berbicara tentang hakikat yang ada (objek ilmu) dan epistemologi berbicara tentang bagaimana yang ada itu bisa diperoleh (cara memperoleh ilmu) maka aksiologi berkaitan dengan manfaat dari pada ilmu itu sendiri atau kaitan penerapan ilmu itu dengan kaidah-kaidah moral.

Dalam Wikipedia *aksiologi* berasal dari bahasa Yunani yaitu *axion* yang berarti "nilai" dan *logos* yang berarti "ilmu" atau "teori". Jadi, aksiologi adalah ilmu tentang nilai⁸². Adapun Jujun S. Suriasumantri dalam bukunya *Filsafat Ilmu* mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum⁸³.

Menurut Brameld, ada tiga bagian yang membedakan di dalam aksiologi. Pertama, *moral conduct*, tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Kedua, *esthetic expression*, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Ketiga, *socio-political life*, kehidupan sosio-politik. Bidang ini melahirkan ilmu filsafat sosio-politik.⁸⁴

a. Teori Nilai (Etika)

Problem aksiologis yang pertama berhubungan dengan nilai. Berkaitan dengan masalah nilai sebenarnya telah dikaji secara mendalam oleh filsafat nilai. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini akan dibahas beberapa hal penting untuk dipaparkan berkaitan dengan masalah nilai. Tema-tema yang muncul seputar masalah ini misalnya apakah nilai itu subjektif atau objektif.

Perdebatan tentang hakikat nilai, apakah ia subjektif atau objektif selalu menarik perhatian. Ada yang berpandangan bahwa nilai itu objektif sehingga ia bersifat universal. dimana pun tempatnya, kapanpun waktunya, ia akan tetap dan diterima oleh semua

⁸² Burhanuddin Salam, *Logika Materil, Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), cet. Ke-1, hal. 168.

⁸³ Jujun S. Sumatriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988) hal. 234.

⁸⁴ Abdullah Idi dan Jalaluddin. hlm. 129 dalam Muhammad Noor Syam. 1986, hlm. 34-36

orang. Nilai objektif itu terbentuk jika kita memandang dari segi objektivitas nilai.⁸⁵

Sementara jika kita melihat dari segi diri sendiri terbentuklah nilai subjektif. Nilai itu tentu saja bersifat subjektif karena berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang penilaian yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu. Tentunya penilaian setiap orang berbeda-beda tergantung selera, tempat, waktu dan juga latar belakang budaya, adat, agama, pendidikan, yang memengaruhi orang tersebut. Misalnya bagi orang-orang terdahulu, ada beberapa hal yang dianggap tabu, tidak boleh dilakukan dan tidak pantas tapi hal-hal tersebut tidak lagi bermasalah bagi orang-orang sekarang ini. Dari sini bisa dilihat bahwa nilai itu bersifat subjektif tergantung siapa yang menilai, waktu dan tempatnya⁸⁶.

Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang baik dan buruk bukan salah dan benar. Apa yang baik bagi satu pihak belum tentu baik pula bagi pihak yang lain dan sebaliknya. Apa yang baik juga belum tentu benar. Membantu pada dasarnya adalah baik tapi jika membantu orang dalam tindakan kejahatan adalah tidak benar.

Jadi, persoalan nilai itu adalah persoalan baik dan buruk. Penilaian itu sendiri timbul karena ada hubungan antara subjek dengan objek. Tidak ada sesuatu itu dalam dirinya sendiri mempunyai nilai. Sesuatu itu baru mempunyai nilai setelah diberikan penilaian oleh seorang subjek kepada objek. Suatu barang tetap ada, sekalipun manusia tidak ada, atau tidak ada manusia yang melihatnya. Karena, nilai itu baru timbul ketika terjadi hubungan antara manusia sebagai subjek dan barang sebagai objek."⁸⁷

Namun yang paling penting dari masalah etika adalah implikasi praktisnya. Artinya sesuatu yang buruk itu seharusnya ditinggalkan sedangkan yang baik seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian ilmu pengetahuan akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia bukan justru malah mengancam eksistensi

⁸⁵ Sidi Gazalba. *Sistematika Filsafat, Pengantar Kepada Teori Nilai* (Jakarta, 1978), hlm. 490

⁸⁶ Sudarsono *Filsafat Islam* Jakarta: PT Rineka Cipta 1997

⁸⁷ Sidi Gazalba. hlm. 186-187

manusia itu sendiri. Oleh sebab itu aksiologi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan tuntunan bagaimana suatu hal itu bisa digunakan secara tepat guna.

b. Estetika

Estetika (*aesthetica*) mula-mula berarti teori tentang pencerapan penghayatan pengalaman indera, sesuai dengan istilah Kant dengan *transzendentalästhetik* (teori tentang susunan penghayatan panca-indra dalam ruang dan waktu, berlawanan dengan *transzendentallogik*: pengetahuan rasional dan penuturan). Perlawanan yang dikemukakan oleh Kant itu juga dinyatakan oleh Baumgarten⁸⁸.

Ia menempatkan logika sebagai teori pemakaian pemikiran yang benar dan estetika sebagai teori tentang penghayatan sempurna panca-indera. Masalah yang timbul tentang estetika yang dihadapi oleh banyak ahli pikir semenjak Plato dan Aristoteles ialah pernyataan tentang hakikat keindahan dan seni⁸⁹. Dengan demikian seluruh lapangan nilai, dalam mana keindahan dan seni merupakan bagiannya, dinamakan lapangan estetika, dikordinasikan dengan logika dan estetika. Estetika dalam pengertian baru itu dipakai oleh Kant dan Schiller sehingga menjadi umum di Jerman, meluas ke dalam pemakaian internasional.⁹⁰

Perdebatan lain yang menarik perhatian berkaitan dengan masalah estetika adalah tentang keindahan, apakah keindahan itu sesuatu yang sifatnya objektif atau subjektif? Jika teori tentang nilai mengatakan bahwa persoalan nilai itu adalah masalah yang subjektif maka sebaliknya dengan persoalan estetika. Persoalan estetika lebih berpihak pada pandangan objektivisme. Artinya bahwa keindahan itu merupakan sifat yang objektif yang dimiliki oleh suatu benda. Ia bukanlah penilain subjektif seseorang. Diantara yang berpandangan seperti ini adalah Hegel. Hegel menganggap bahwa

⁸⁸ Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762): filofof Jerman, guru besar di Frankfurt, yang mula-mula mempergunakan estetika untuk teori keindahan.

⁸⁹ Sudarsono Filsafat Islam Jakarta: PT Rineka Cipta 1997

⁹⁰ Sidi Gazalba. hlm. 567

seluruh alam adalah manifestasi dari Cita Mutlak, Absolut Idea. Keindahan adalah pancaran Cita Mutlak melalui saluran indera. Ia adalah sejenis pernyataan ruh. Seni, agama dan filsafat merupakan tingkat-tingkat tertinggi dari perkembangan ruh.⁹¹

Sedangkan Kant memberikan arah yang baru sama sekali dalam mencari keterangan tentang estetika. Dengan Kant dimulailah studi ilmiah dan psikologi tentang teori estetika. Ia mengatakan dalam *The Critique of Judgment* bahwa akal memiliki indera ketiga di atas pikiran dan kemauan⁹². Itulah indera rasa. Yang khas pada rasa atau kesenangan estetika ialah ia tidak mengandung kepentingan. Ini membedakannya daripada kesenangan-kesenangan yang lain yang mengandung unsur keinginan atau terlibat dalam kepentingan pribadi atau hayat. Gula misalnya tidaklah indah tapi dikehendaki. Kita menginginkannya untuk menikmatinya. Demikian pula tindakan moral tidak indah. Ia adalah baik. Kita menyenjuinya karena kepadanya kita mempunyai kepentingan. Sebaliknya dengan keindahan. Selalu ia merupakan objek kepuasan yang tidak mengandung kepentingan, berbeda dari keinginan-keinginan yang lain. Indah, sekalipun ruhaniah adalah objektif⁹³. Karena itu ia selalu merupakan objek penilaian. Kita mengatakan: "Barang ini indah". Hal ini menunjukkan bahwa keindahan itu merupakan sifat objek, tidak hanya sekedar selera yang subjektif. Demikianlah teori Kant.⁹⁴

Di dalam Islam sendiri konsep "keindahan" itu sangat jelas sekali. Sumber keindahan itu bahkan bersumber dari Ilahi. Dikatakan bahwa "Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan". Demikian juga alam sebagai ciptaannya merupakan sesuatu yang indah dan menakjubkan. Bagaimana kita seringkali mengagumi keindahan alam yang ada di sekitar kita. Hal ini merupakan sebuah ekspresi nyata yang sering kali kita ungkapkan. Artinya suatu nilai

⁹¹ Sidi Gazalba. hlm. 570

⁹² Sudarsono *Filsafat Islam* Jakarta: PT Rineka Cipta 1997

⁹³ Wa Ode Zainab. *Ontologi, Epistemologi, & Aksiologi,*

⁹⁴ Sidi Gazalba. hlm. 571-572

estetika benar-benar merupakan sesuatu yang objektif bukan subjektif sebagaimana nilai etika.

c. Sosio Politik

Bagian ketiga dari aksiologi adalah tentang sosio-politik. Sosio-politik ini merupakan ilmu praksis. Yang pertama mengenai ilmu sosial, dalam hal ini ia berfungsi sebagai ilmu yang mengatur bagaimana manusia hidup bermasyarakat. Hanya saja ia mempunyai *concern* yang lebih spesifik yaitu berkaitan dengan masalah tindakan manusia atau bagaimana manusia itu harus bergaul, berinteraksi antara yang satu dengan yang lain⁹⁵. Manusia sebagai makhluk sosial pasti tidak bisa dilepaskan dari manusia yang lain untuk mempertahankan hidup. Artinya mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dalam perkembangannya, ilmu sosial ini nantinya akan menjadi disiplin ilmu tersendiri yaitu sosiologi⁹⁶.

Berbicara tentang ilmu sosial tentu juga tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ilmu ekonomi karena masalah sosial juga mencakup masalah ekonomi. Misalnya bagaimana manusia membutuhkan keberadaan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

C. Hubungan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi dengan Ekonomi Islam

Dalam konteks filsafat ilmu, ilmu ekonomi termasuk bagian ilmu sosial, yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan praktis, sebagaimana disebutkan Paul A. Samuelson sebagai ilmu yang beruntung (*fortunate*), karena dapat diterapkan langsung pada kebijakan umum (*public policy*)⁹⁷. Sebagai ilmu sosial ilmu ekonomi tidak dapat terlepas dari kajian filsafat yang berlandaskan pada tiga aspek, yaitu: ontologis, epistemologis dan aksiologis. Semua pengetahuan apakah itu ilmu, seni atau pengetahuan apasaja pada dasarnya mempunyai tiga landasan tersebut. Perbedaannya terletak

⁹⁵ Sudarsono Filsafat Islam Jakarta: PT Rineka Cipta 1997

⁹⁶ Wa Ode Zainab. *Ontologi, Epistemologi, & Aksiologi*

⁹⁷ Agustianto.MA, *FILSAFAT EKONOMI ISLAM*

pada perwujudannya serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga aspek tersebut dikembangkan dan dilaksanakan.

D. Hubungan Filsafat dan Ekonomi Islam

1. Filsafat Ekonomi Islam

Terdapat dua mazhab pemikiran para ekonom muslim kontemporer yaitu: Mazhab Baqir as-Sadr dan Mazhab Mainstream. Pertama, Mazhab Baqir as-Sadr dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal *Iqtishadunna* (ekonomi kita). Menurut Baqir as-Sadr ilmu ekonomi harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *Philosophy of Economics* (filsafat ekonomi) dan dari sisi *Science of Economics* (ilmu ekonomi). Ilmu ekonomi dipandang dari segi ilmu, salah satunya dalam teori konvensional adalah teori kelangkaan (keterbatasan). Sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup terjadi karena kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Mazhab ini berpendapat bahwa teori ilmu ekonomi seperti itu tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Mereka menolakesemua teori ilmu ekonomi sehingga mereka menyusun teori baru tentang ekonomi Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹⁸

Kedua, Mahzab Mainstraim merupakan mazhab yang paling dominan dalam mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam karena tokoh-tokoh yang mempopulerkan kebanyakan berasal dari tokoh Islam. Mereka mengakui ilmu ekonomi konvensional namun mazhab ini mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap penyelesaian masalahnya.⁹⁹

Sedangkan jika dilihat dari sisi *Pilosophy of Economics* dalam kajian kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada halal dan haram, bernilai ibadah serta membawa maslahat. Setiap muslim yang meyakini kebenaran akidah Islam, menjadi kewajiban bagi semua-

⁹⁸ Dinul Alfian Akbar, dkk., "Kajian Filsafat Ilmu terhadap Ekonomi Islam", *Jurnal Nurani*. Vol 13. No 1. Juni 2013. h.

⁹⁹ Muhammad Kosim, "Ilmu Pengetahuan dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis)". *Jurnal Tadris*. Vol 3. No 2. 2008

nya untuk selalu terikat dengan hukum syara' (syari'at Islam) yaitu harus memilih dan melakukan kegiatan ekonomi yang halal dan meninggalkan kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Allah SWT.¹⁰⁰

Mengkaji ilmu ekonomi Islam, harus kita pahami terlebih dahulu bagaimana filsafat ekonomi Islam tersebut. Urgensi pemahaman Islam secara menyeluruh mestilah diikuti dengan konsepsi filosofis Islam. Filsafat sebagai akar, akan menuntun ilmu ekonomi Islam untuk dapat berdiri diatas pijakan yang benar. Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak.

Filsafat adalah ibunya segala ilmu. Karena itu mempelajari filsafat berarti mengetahui asal mula kelahiran suatu ilmu. Filsafat merupakan upaya rasional manusia dalam memahami struktur-struktur dasar pengalaman dan realitas. Pemahaman ini dilakukan untuk menemukan kebenaran, makna dan hubungan logis.¹⁰¹

Makna dalam hal ini berhubungan dengan definisi suatu hal. Misalnya, apakah manusia itu?

Kebenaran terkait dengan kepastian terjadinya suatu hal. Misalnya, apakah benar kiamat akan terjadi? Kebenaran juga terkait dengan kepastian di antara dua klaim yang sama-sama mengaku benar. Misalnya, mana yang paling benar ekonomi Islam atau ekonomi konvensional?

Hubungan logis adalah keterkaitan logis antara satu pernyataan yang satu dengan yang lainnya. Dua buah keyakinan dikatakan memiliki hubungan logis bila kebenaran menentukan kebenaran yang lain.

Filsafat ekonomi Islam merupakan prinsip dasar sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Filsafat ekonomi inilah yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Dari filsafat ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan

¹⁰⁰ Anindya Aryu Inayati, "Epistemologi Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)." Tesis dalam Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

¹⁰¹ M. Anton Anthoillah, dkk. "Filsafat Ekonomi Islam". E-book. 2016

menjalankan kegiatan ekonomimisialnya ekonomi produksi, konsumsi, distribusi dan pembangunan ekonomi.¹⁰²

Filsafat ekonomi yang Islami menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia.

Filsafat ekonomi didasarkankan pada konsep *triangle* yakni: filsafat tuhan, manusia dan alam. Jadi kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan tuhan, alam dan manusia lainnya. Selain itu filsafat ekonomi Islam juga membahas tujuan hidup manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi di bumi.

Pandangan Alquran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah *tauhid* (kepercayaan kepada sang pencipta) dalam Q.S Az-zumar:38. Landasan filosofi inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Sebaga buktinya adalah Allah SWT yang menciptakan seluruh sumber daya ekonomi yang akan diolah dan dipakai oleh manusia sehingga Allah SWT sebagai pemilik absolut semua yang ada di bumi. Filsafat sebagai akar, akan menuntun ilmu ekonomi Islam untuk dapat berdiri diatas pijakan yang benar.¹⁰³

Menurut Asy'arie, ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari integralisme tauhid teologi, kosmologi dan antropologi. Ketiganya dijadikan sebagai dasar atau landasan konsep ekonomi Islam. Tauhid teologi menjadi landasan dasar bahwa Allah yang menciptakan alam dan manusia. Selanjutnya, tauhid kosmologi merupakan dasar realisasi kegiatan ekonomi karena tidak pernah ada kegiatan ekonomi yang berada di luar semesta. Terakhir, tauhid antropologi menjadi dasar aktivitas ekonomi karena tidak ada kegiatan ekonomi tanpa adanya manusia sebagai pelakunya.¹⁰⁴

¹⁰² Mohammad Hidayat. An Introduction to the Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). Edisi 1. Jakarta Timur. Zikrul Hakim

¹⁰³ Pijakan yang benar dalam hal ini adalah al-Qur'an sebagai kebenaran absolut bagi ekonom muslim. Al-Quran sering kali menyuruh untuk berfikir dalam segala hal misalnya dengan ungkapan *afala ta'qliun*, *afala tatafakkarun*, dan *afala tatadabbarun*, dan alin-lain yang sepadan dengannya.

¹⁰⁴Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam.....*, hal. 62-63

Ilmu ekonomi Islam merupakan hasil perumusan dari aplikasi sistem ekonomi Islam yang bersumber dari seperangkat aturan berekonomi yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kebenaran ilmu ekonomi Islam tidak dibuktikan melalui metode ilmiah, akan tetapi dibuktikan melalui metode *'aqliyah* (metode berfikir logis). Penggunaan metode ilmiah hanya dapat menguji kebenaran ilmu ekonomi Islam pada tataran realitas, akan tetapi tidak dapat menguji kebenaran pada tataran fakta-fakta transendental (wahyu) yang mendasari nilai dari ilmu ekonomi Islam.

Kajian bidang ekonomi adalah membicarakan tingkah laku manusia, maka yang harus dilakukan adalah menelusuri melalui filsafat dan sikap hidup yang dianut oleh manusia. Dalam ilmu ekonomi sekarang (yaitu ilmu ekonomi "barat") walaupun perjalanannya telah melalui proses yang panjang hasilnya semakin mengantarkan manusia pada kemunduran bukan pada keadaan hasanah. Keadaan itu diakibatkan oleh ekonomi barat yang mengabdikan kepada kepentingan peribadi dan bukannya mengabdikan kepada Allah SWT. Ekonomi barat memakai landasan filsafat yang mendorong manusia hidup dalam keadaan konflik sehingga dengan konflik kehidupan itu manusia cenderung bersaing dalam memperoleh laba sebanyak-banyaknya.

Sementara ekonomi yang berdasarkan Islam menganjurkan manusia mengabdikan kepada Allah SWT dengan memakai landasan iman dan takwa. Pembahasan Islam mengenai tingkah laku manusia dengan sesama manusia terletak pada perilaku muamalah, sehingga dengan ukhuwah ekonomi Islam diharapkan dapat berperan dalam mendorong kehidupan manusia pada persaingan berprestasi (*fastabiqu al-khairati*). Inilah yang menjadi dasar perbedaan filsafat ekonomi Islam dengan filsafat ekonomi sebelumnya.¹⁰⁵

¹⁰⁵Dinul Akbar. Kajian Filsafat Ilmu terhadap Ekonomi Islam. Jurnal Nurani. Vol 3. No 1. Juni 2013

2. Kajian Filosofi dan Keterkaitannya dengan Karakteristik Ekonomi Islam.

Aktivitas ekonomi macam apa yang diperlukan dan bagaimana semestinya ia ditanamkan? Pertanyaan inilah yang mengaitkan antara definisi dan karakteristik ekonomi Islam seperti yang telah di jelaskan sebelumnya.¹⁰⁶

Filsafat semakin hari semakin dianggap sebagai kajian yang bersifat teoritis, kritis dan refleksif. Filsafat harus lebih menyadari adanya ruang lingkup yang khas sebagai karakter dari suatu kajian ilmu.

Tugas filsafat adalah menganalisa secara refleksif, menyingkap dan mendiskusikan secara kritis isi normatif yang ada dalam konteks ilmu, kemudian merumuskan kembali dalam kerangka prinsip umum dengan metode pembenaran yang mudah dipahami. Filsafat yang berkenaan dengan praktik ekonomi adalah filsafat teoritis yang mendasari kegiatan praktis.¹⁰⁷

Oleh karena itu filsafat ekonomi dapat dikaitkan dengan definisi dan karakteristik ekonomi Islam. Filsafat Ekonomi dapat bermula dari prinsip nilai yaitu prinsip-prinsip moral, lalu prinsip moral ini berfungsi sebagai dasar pembentukan kebijakan-kebijakan moral. Untuk memperjelas hubungan tersebut dapat dikemukakan uraian dari prinsip-prinsip tersebut:¹⁰⁸

- a. Prinsip-prinsip tawhidiyyah: prinsip ini terbagi kepada dua yaitu *tawhid uluhiyyah* dan *tawhid rububiyyah*. Tawhid Uluhiyyah berarti seseorang meyakini dalam aktifitas kegiatan ekonomi diniatkan hanya beribadah dan mencari pahala dari Allah swt. Sementara *tawhid rububiyyah* berarti seseorang meyakini bahwa dia melakukan segala aktifitas ekonominya sebagai khalifah allah di muka bumi untuk menolong sesama umatnya.

¹⁰⁶ Yusup Asdar, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam." Jurnal. Vol 11. NO 2. Desember 2014

¹⁰⁷ M. Sularno. "Konsep Kepemilikan dalam Islam". *Jurnal Almajid*. Edisi IX. Tahun 2013

¹⁰⁸ Ahmad Dahlan. "Urgensi Studi Ekonomi Islam". *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania*. Vol 13. No 1. Januari-April 2008

- b. Prinsip-prinsip *Akhlaqiyyah*: yaitu prinsip-prinsip nilai sebagai landasan bagi tindakan Ekonomi seperti adanya keseimbangan mencari masalah dunia dan akhirat, adanya tolong-menolong (ta'awuniyah), adanya keadilan dalam segala aspek kegoatan ekonomi dan lain-lain.
- c. Prinsip-prinsip syariyyah; seperti tidak boleh adanya riba, tidak boleh adanya unsur Gharar dan tidak boleh adanya Maysir.
- d. Prinsip-prinsip Kebijakan-kebijakan ekonomi sebagai pengetahuan atau teori apa yang diperlukan dan bagaimana ia mendasari kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.

BAB III

ASPEK ONTOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM

Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang suatu kenyataan/realitas. Ontologi adalah teori tentang ada yang berasal dari bahasa Yunani *on* yang berarti ada dan *logos* yang berarti ilmu. Menurut Aristoteles, sebagaimana dituliskan oleh Runes, ontologi merupakan filsafat pertama yang merupakan ilmu tentang esensi segala sesuatu. Sementara itu, menurut Wolff yang memperkenalkan terma ini ke dalam filsafat, ontologi merupakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip fundamental, doktrin tentang beragam kategori, filsafat utama dan kosmologi rasional.¹ Lebih lanjut menurut Iannone ontologi merupakan bagian sentral dalam pembahasan metafisika. Di masa sekarang, ontologi dipandang sebagai cabang metafisika yang mempelajari apa saja entitas atau jenis-jenis entitas yang mendasari atau merupakan semesta. Di antara entitas-entitas tersebut adalah individu, person, properti seperti atau sifat, bentuk, relasi, peristiwa, kondisi, fakta dan setting.²

Ditinjau dari ontologi ekonomi islam menggunakan petunjuk Allah berupa wahyu (al quran). As-sunnah, Qiyas, Ijma, Ijtihad serta ayat-ayat kauniah yang bertebaran di jagat raya islam yang menjadi pendorong adalah kehendak Allah (*God-Interest*) yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari ridha Allah Swt. Dalam ilmu ekonomi konvensional yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi itu semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi (*self-interest*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi pendorong adalah

¹ Runes, *The Dictionary of Philosophy.....*, hlm. 219.

² Iannone, *Dictionary of World Philosophy.....*, hlm. 345.

kehendak Allah SWT, yaitu; dalam rangka mengabdikan dan mencari Ridha Allah SWT³.

Ontologi ilmu ekonomi berkaitan dengan objek yang ditelaah atau sasaran ilmu dan bagaimana wujud sebenarnya dari objek tersebut. Secara ontologis, sasaran ilmu ekonomi adalah hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya. Sedangkan pemenuhan kebutuhan spiritual tidak termasuk dalam lingkup ekonomi. Aspek ontologis ilmu ekonomi misalnya adalah barang dan jasa⁴. Inti dari ilmu ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas ditengah-tengah jumlah sumber daya ekonomi yang ada terbatas jumlahnya. Ada banyak yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, namun dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu ekonomi mikro dan makro. Analisis ekonomi mikro bertujuan bagaimana mengalokasikan faktor-faktor produksi agar tercapai kombinasi yang tepat, sedangkan ilmu ekonomi makro bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh (Joesron dan Fathorrozi, 2003: 1-2).

Manusia mempunyai keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan tersebut terbatas atau langka (*scarcity*) telah menimbulkan masalah, yang disebut dengan masalah ekonomi⁵. Masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan (faktor-faktor produksi) yang terbatas. Oleh karena itu manusia akan melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif yang mungkin dari berbagai kemungkinan yang ada. Tindakan melakukan pilihan terhadap serangkaian kemungkinan yang ada didasari oleh suatu motif, yang disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi biasanya didasari suatu prinsip ekonomi, yang berbunyi dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk

³ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, hal.140

⁴ Mulyadi Kartanegara, *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam* (Jakarta, 2006), hlm. 166

⁵ Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam, dalam web. www.agustianto.com. Diakses 12 Juli 2017.*

memperoleh manfaat tertentu. Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia bertindak atas dasar motif ekonomi dengan prinsip ekonomi disebut Ilmu Ekonomi.

A. Konsep Ekonomi Islam

Makna ekonomi berdasarkan kamus Routledge bahwa ekonomi merupakan:

- 1) Keinginan, usaha dan kepuasan.
- 2) Studi tentang berbagai metode umum yang digunakan manusia untuk bekerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik mereka.
- 3) Ilmu yang mempelajari perilaku manusia terkait pola relasi antara tujuan manusia itu sendiri dengan keterbatasan yang melahirkan alternatif-alternatif pemanfaatan sumber daya.

Pada awalnya, kata ekonomi hanya bermakna pengaturan rumah tangga. Namun makna ini kemudian mengalami perubahan mengikuti perubahan dan perkembangan pelaku ekonomi itu sendiri. Kemudian berkembanglah pembahasan makro ekonomi, pemanfaatan matematika untuk ekonomi dan pengenalan berbagai profesi dalam bidang ekonomi.⁶

Lihat juga pendapat Heilbroner dan Milberg yang menyatakan bahwa makna umum ekonomi adalah studi tentang sebuah proses yang didapati dalam masyarakat. Proses tersebut merupakan penyediaan kesejahteraan materi bagi masyarakat tersebut. Lebih sederhana lagi, ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hariannya. Pemahaman ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejarah ekonomi berawal dari persoalan keberlangsungan hidup dan bagaimana manusia mengatasi persoalan tersebut.⁷

Sementara itu dalam pandangan Islam, hidup manusia memiliki dua aspek utama, yaitu aspek material dan keyakinan

⁶ Rutherford, *Routledge Dictionary of Economics.....*, hlm. 164.

⁷ Heilbroner dan Milberg, *The Making of Economic Society.....*, hlm. 1-2.

agama (spiritual). Aktivitas ekonomi ambil bagian penting dalam kedua aspek tersebut dimana ekonomi berperan sebagai penunjang kehidupan manusia sekaligus menjadi kewajiban agama. Namun demikian tetap dalam doktrin Islam tujuan hidup ukhrawi lebih utama⁸

Menurut Sa'ud sebagaimana yang dikutip oleh Mohamad dan Shahwan, ekonomi memiliki tiga konsep dasar yang secara tidak langsung berhubungan dengan tujuan ekonomi dalam Islam. Konsep pertama adalah manusia dan makhluk lain diciptakan Allah terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Bagi manusia, kedua unsur tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan biologis, sekaligus untuk tugas penghambaan kepada Allah. Konsep kedua adalah pengesaan Allah yang mana berisi keyakinan bahwa semua kehidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup ditujukan untuk memperoleh rahmat-Nya. Ketiga, integrasi beragam sistem kehidupan dalam Islam.⁹

Secara bahasa, dalam bahasa Arab ekonomi Islam dikenal dengan istilah *al-iqtishad al-islami*. Kata *al-iqtishad* memiliki makna pengetahuan yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan. Ada yang memahami ekonomi Islam sebagai pengetahuan serta aplikasi ajaran Islam yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan yang memungkinkan manusia melaksanakan kewajiban kepada Allah.¹⁰

Jeremy Seabrook menyatakan perkembangan ilmu ekonomi Islam erat kaitannya dengan tujuan landasan filosofisnya sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Islam mulai muncul setelah masa kejayaan (*renaissance*). Ekonomi Islam menjadi sistem alternatif yang diharapkan mampu memberikan solusi atas banyaknya permasalahan ekonomi dan mampu menciptakan kemaslahatan bagi

⁸ Ayub, *Understanding Islamic Finance.....*, hlm. 25.

⁹ Mohamad dan Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Shariah: a Critical Review," *Middle East Journal of Scientific Research* 13, 2013, hlm. 76

¹⁰ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Ebook, 2017), hal. 22.

masyarakat. Dampak positif setelah masa kejayaan (*renaissance*) bagi bidang ekonomi ini ialah banyaknya bermunculan wacana Islamisasi ilmu pengetahuan (1970-an) oleh para cendekiawan muslim di berbagai belahan dunia sesuai dengan bidang keilmuannya. Salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang saat itu sering diperbincangkan adalah Islamisasi ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi Islam.¹¹

Terkait definisi ekonomi Islam dalam kajian filosofinya memaparkan beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli sebagai berikut:¹²

- a. S.M. Hasanuzzaman, “Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang khaliq dan masyarakat”.
- b. M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam”.
- c. M.N. Siddiqi, “ilmu ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa hidup mereka. Sumber utamanya al-Qur’an dan as-Sunnah maupun akal dan pengalaman”.
- d. M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi”.
- e. Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi

¹¹ Hendri Hermawan Adinugraha. Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi. Vol 21. No 21. Maret 2013

¹² Hendri Hermawan Adinugraha. Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi. Vol 21. No 21. Maret 2013

manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak akses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik”.

- f. Munawar Iqbal, “ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, wahyu dipandang sebagai sumber utama IPTEK (*mamba’ul ‘ilmi*). Kemudian al-Qur’an dan al-hadits dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam”.
- g. Menurut Baqir Sadr” Ekonomi Islam bukanlah suatu ilmu pengetahuan (*science*), namun ekonomi islam adalah sebuah doktrin (filosofi). Karena ilmu pengetahuan sifatnya berubah-ubah sementara doktrin sifatnya baku”

Beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli lain, diantaranya:¹³

- a. Prof. Dr. M. Umer Chapra, “ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan”.
- b. Prof . Dr. Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, “ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Alquran dan sunnah, akal (*ijtihad* dan pengalaman)”
- c. Syed Nawab Haider Naqvi, “ilmu ekonomi Islam adalah representasi perilaku umat Islam dalam masyarakat muslim”.
- d. Prof Dr Ziauddin Ahmad ekonom Pakistan ini merumuskan bahwa “ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang

¹³ Mohammad Hidayat. An Introduction to the Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). Edisi 1. Jakarta Timur. Zikrul Hakim

dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridha-Nya”.

Dari pengertian ekonomi Islam diatas, dapat dijelaskan bahwa kajian dan pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Adapun kepentingan atau tujuan dari sistem ekonomi Islam merupakan suatu bentuk “*ijtihad*” agar dapat dipraktikkan menjadi sistem yang aplikatif pada wilayah sosial (kerakyatan). Jika ekonomi Islam hendak menjadi ilmu dan memiliki kategori tindakan ekonomi yang berbeda, maka butuh tindakan khas ekonomi Islam atau karakteristik ekonomi Islam.

Secara sederhana ekonomi Islam adalah suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan secara luas, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁴

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam secara bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang Islami adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang unik. Unik karena ilmu ekonomi Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam mempelajari aktivitas atau perilaku manusia, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi yang merupakan

¹⁴ Soemitra Andri. Kajian Pustaka dalam Studi Ekonomi Ekonomi Islam. Jurnal Iqra'. Vol 2. No 2. 2008

masalah dasar menyangkut pilihan terhadap sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam ilmu ekonomi Islam tujuan aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar mencapai kebahagiaan duniawi melainkan juga untuk memperoleh kebahagiaan abadi ukhrawi sekaligus.

Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang kuat karena konstruksi keilmuannya dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah serta dilengkapi dengan penalaran dan pemikiran para ekonom Islam. Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem alternatif diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang lebih berkeadilan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam dimensi individual dan sosial secara paripurna.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipanami bahwa ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sarana dalam mewujudkan ekonomi masyarakat madani. Kegagalan sistem konvensional membuat terjadi penyimpangan dari nilai sosial dan nilai normatif moral masyarakat sehingga sistem itu dianggap gagal dalam membentuk sarana ekonomi masyarakat. Untuk itu instrumen ekonomi syari'ah merupakan salah satu alternatif dalam pembentukan ekonomi masyarakat madani melalui instrumen baitul maal, lembaga zakat, lembaga wakaf, sedekah dan sebagainya.¹⁵

Ekonomi Islam merupakan salah satu pendekatan sistem ekonomi dalam pembentukan perekonomian masyarakat. Banyak Negara yang ada didunia ini melakukan pendekatan ekonomi konvensional dalam memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*), pendekatan ini umumnya lebih berkembang di dunia barat. Di balik keberhasilan tersebut, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi.¹⁶

¹⁵ Nurnarisna, *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013 hal.221

¹⁶ M. Umar Chapra, 2001. *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, Edisi terjemah, (Jakarta: SEBI), hal. 45

Sebagai pemikir muslim, Khursid Ahmad tentu berangkat dari realitas yang terjadi di negeri-negeri muslim. dimana hampir sebagian besarnya memiliki sumber daya yang luar biasa tetapi keadaan ekonominya tetap tak berkembang, standar hidup rakyatnya masih rendah dan bahkan cenderung hidup dalam keadaan *subsisten*. Mengalami ketimpangan dalam distribusi kekayaan, ketidakseimbangan dalam wilayah geografis, kesenjangan antara sektor ekonomi dan sosial, juga terjadi ketimpangan antara pusat industri dan daerah pertanian. Selain itu juga mengalami ketergantungan yang luar biasa sebagai pengaruh berkepanjangan dari warisan hubungan ekonomi kolonial sebagai hubungan “pusat-pinggiran” (*centre-periphery relationship*).¹⁷

Islam merupakan pedoman bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu dalam aktifitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan fitrahannya sebagai individu (hamba Allah SWT) dan menjaga keharmonian dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktifitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktifitas tersebut memiliki sistemnya tersendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut.¹⁸

Dalam konsep Islam, perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan seharusnya berpijak pada landasan-landasan syari’ah. Selain itu, juga mempertimbangkan kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam, keduanya berinteraksi secara harmonis sehingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan pondasi nilai-nilai Ilahiyah. Di lain pihak, ekonomi konvensional mendefinisikan dirinya sebagai segala tingkah laku

¹⁷ Hamid Fahmy Zarkasyi, “*Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam*”, *Islamia* Tahun II No. 5, April-Juni 2005, hal. 11.

¹⁸ Nurnarisna, *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013 hal.224

manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi ini terdapat dua makna penting; *pertama*, definisi ini menunjukkan perilaku manusia tersebut terfokus sebagai perilaku yang bersifat individual. *Kedua*, bahwa tingkah laku manusia itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), tetapi pada hakekatnya untuk memuaskan keinginan (*wants*) yang memang tak terbatas.¹⁹

Ekonomi Islam dapat membentuk suatu aturan dasar di dalam menjelankan perekonomian bagi masyarakat tersebut dengan merenovasi bentuk-bentuk instrument sehingga sistem ekonomi Islam senantiasa baru dari masa kemasa untuk menjalankan institusi instrument ekonomi Islam, yaitu: baitul maal, lembaga zakat, infak sedekah, lembaga wakaf dan sebagainya. instrument ekonomi Islam perlu dikembangkan untuk membentuk ekonomi masyarakat madani.²⁰

B. Asas- asas Ekonomi Islam

Aktivitas ekonomi dalam Islam dilandasi oleh syari'ah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ekonomi Islam mempunyai karakteristik antara lain; sistem ekonomi berlandaskan etika dan sistem ekonomi yang bercirikan kemanusiaan. Karakteristik sistem ini merupakan penjabaran dari ajaran Islam sendiri yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sehingga dalam Islam, sikap *kāffah* (secara menyeluruh dalam melaksanakan ajarannya) sangatlah diutamakan, maka dalam semua aktivitas hidupnya seorang muslim haruslah selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tidak terkecuali pada aktivitas perekomian yang dijalaninya.²¹

¹⁹ Ali Sakti, 2003. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI), hal. 16

²⁰ Ahmad soleh sakni, Jurnal *JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166*

²¹ Hendri Hermawan Adinugraha. Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi. Vol 21. No 21. Maret 2013

Berikut beberapa karakteristik ekonomi Islam:²²

1. *Tauhidiah*, yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Dalam ekonomi Islam konsep ketuhanan menjadi karakter yang kuat. Bahwasanya Allah SWT dipercaya menjadi pencipta dan pemilik semua yang ada di muka bumi ini. Maka apapun kegiatan atau aktifitas yang didalamnya termasuk aktifitas ekonomi harus tunduk pada ketepatan dari-Nya. Dasar pemikiran Q.S Ali Imran:26. Dalam teknisnya seorang ekonom pemikir atau ekonom praktis harus dilandaskan pada pencarian pahala dan bentuk ketundukan pada sang Maha Pencipta dan diyakini semua kegiatan ekonomi adalah ibadah yaitu ibadah *ghar mahdah*.
2. *Rabbaniyah*, bahwasanya wahyu Allah SWT adalah pegangan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Ini menjadi karakter ekonomi Islam karena tidak ada pada ekonomi lainnya. Pada prakteknya dalam kegiatan ekonomi *rabbaniyah* semua kegiatan ekonomi adalah sebagai bentuk perwakilan (khalifah) Tuhan di muka bumi dalam menolong orang lain yang mempunyai kegiatan yang berbeda yang satu dengan yang lainnya, misalnya seorang pedagang beras dalam berjualannya harus meyakini bahwa dirinya adalah sebagai wakil tuhan dalam memberikan beras (dengan cara menjual) kepada orang lain yang mau membelinya. Dikarenakan tidak mungkin seorang pembeli langsung meminta beras langsung kepada Tuhan.
3. *Istiqamah*, hasil penafsiran manusia terhadap Alquran dan Hadist tentang ekonomi Islam tidak hanya dibenarkan oleh satu pemikiran dan tidak ada pertentangan didalamnya sehingga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi Islam sehingga terdapat nilai keistiqamahan (ketetapan yang pasti). Akan tetapi ilmu ekonomi lainnya terdapat banyak

²² Mohammad Hidayat. An Introduction to the Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). Edisi 1. Jakarta Timur. Zikrul Hakim

pertengahan dari para pemikirnya. Dasar pemikiran Q.S Ar-Ruum: 30.

4. *Syumuliyah*, yaitu konsep ekonomi Islam telah memandang dan mengkaji secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan dalam ekonomi Islam, sementara ekonomi lain masih banyak konsep yang belum dijelaskan. Dasar pemikiran Ali-Imran:4-5 dan 27.
5. *Tawazuniyah*, yaitu konsep ekonomi Islam yang mengedepankan nilai keseimbangan. Sedangkan konsep ekonomi lain masih banyak memberikan ketimpangan. Dasar pemikiran Q.S Al-Mulk:3 dan QS al-hashir: 7.
6. *Ta'amuliyah*, yaitu kegiatan ekonomi Islam secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan Allah SWT dan manusia lainnya.
7. *Waqi'iyah*, konsep ekonomi Islam itu objektif, wujudnya nyata dan meyakinkan, serta realistis. Dasar pemikiran Q.S Al-An'am:95-103.

Sementara itu, menurut Mufid, ekonomi Islam memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut:²³

1. Ekonomi ketuhanan yang berarti bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seorang muslim harus sejalan dengan aturan syariah dan mencapai tujuan utama yaitu ridha Allah
2. Ekonomi akhlak yang mengandung pemahaman bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seorang muslim tidak terpisah dari dimensi akhlak
3. Ekonomi kerakyatan yakni bahwa ekonomi Islam dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
4. Ekonomi pertengahan yaitu aktivitas ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat merupakan aktivitas yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pertengahan

²³ Mufid, *kaidah Fiqh.....*, hal. 23.

antara berlebih-lebihan dan terlalu kikir atau bakhil dalam konsumsi, distribusi dan produksi

Di samping karakteristik-karakteristik di atas, ekonomi Islam juga terbentuk berdasarkan asas-asas tertentu. Secara sederhana, asas ekonomi Islam meliputi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha, keadilan dalam produksi dan distribusi serta komitmen terhadap nilai akhlak dalam aktivitas ekonomi. Asas-asas ini dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁴

1. Kesatuan yang merupakan wujud atau implementasi dari konsep tauhid. Asas ini menyatukan seluruh aspek hidup manusia yang mencakup politik, ekonomi dan sosial menjadi kesatuan yang homogen, serta mengutamakan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
2. Keseimbangan yang berarti keadilan dalam kehidupan ekonomi.
3. Kebebasan selama tidak merugikan kepentingan bersama. Dalam ekonomi Islam, kepentingan individu terbuka lebar dan tidak ada larangan untuk memperkaya diri. Hanya saja kesempatan yang terbuka lebar tersebut diikat dengan kewajiban individu terhadap orang lain dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.
4. Tanggung jawab karena manusia tidak mungkin memiliki kebebasan tanpa batas. Setiap manusia diminta pertanggung-jawaban atas setiap tindakannya untuk menciptakan keadilan dan kesatuan dalam hidup di dunia.
5. Kebenaran yakni niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi, proses mencari dan penetapan keuntungan.

C. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip fundamental ekonomi dan keuangan Islam adalah ekonomi sosial dan keadilan distribusi. Selain itu, ekonomi dan keuangan Islam juga memiliki sistem etika dan nilai moral yang

²⁴ Mufid, *kaidah Fiqh.....*, hal. 24-25.

komprehensif yang berimplikasi pada praktik-praktik sebagai berikut:²⁵

1. Tidak dibenarkan untuk melakukan politik *dumping* atau tindakan lain sebagai upaya untuk mempertahankan harga pada level yang tinggi. Hal ini terlarang karena menzalimi pihak konsumen, namun di sisi lain dilarang menjatuhkan harga barang (*ighraq al-si'r*) karena hal ini akan merugikan pedagang lain dan dirinya sendiri.
2. Pasar dapat berfungsi secara bebas di bawah mekanisme harga kompetitif tapi di bawah pengendalian pemerintah secara efektif. Terutama intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam barang-barang kebutuhan pokok, karena dalam kebutuhan pokok timbulnya intrik, penipuan dan eksploitasi sangat mungkin.
3. Setiap individu punya hak atas kepemilikan dan kebebasan dalam berusaha serta mendapatkan keuntungan dengan menciptakan nilai tambah serta berbagi keuntungan dan kerugian.
4. Pemerintah harus mengambil peran untuk menjaga keseimbangan ekonomi riil dan keuangan agar memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5. Sistem ekonomi Islam melarang adanya riba, ketidakpastian yang berlebihan dan judi. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya kesejahteraan sosial yang didasarkan pada sikap saling menolong, membangun karakter, perubahan perilaku dan sistem zakat.

²⁵Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (England: John Wiley & Sons, 2007), hal. 12.

BAB IV

ASPEK EPISTEMOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM

Epistemologi merupakan bagian dari kajian filsafat. Perkembangannya sebenarnya sejalan dengan perkembangan filsafat itu sendiri¹. Selain ontologi, yaitu bagian filsafat yang mengkaji tentang “yang ada” atau “realitas sejati”, epistemologi adalah bagian dari filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi, dasar, sifat-sifat dan bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan, menjadi penentu penting bagi model filsafat². Dengan pengertian tersebut, epistemologi tentu saja sangat menentukan karakter pengetahuan, bahkan menentukan “keberatan” apa saja yang patut diterima dan apa yang patut ditolak.

Pengetahuan muncul dari serangkaian pengalaman, timbul dari refleksi, berkembang melalui deduksi dan memunculkan struktur tertentu. Hal serupa juga berlaku pada kepercayaan yang sudah dijustifikasi. Berdasarkan deskripsi ini, maka pengetahuan merupakan sebuah keyakinan. Namun, keyakinan yang salah bukanlah pengetahuan. Begitu juga dengan keyakinan yang didasarkan pada keberuntungan, meskipun benar, tidaklah juga diakui sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan setidaknya dapat berupa keyakinan yang benar. Hanya saja, keyakinan yang benar semata belum bisa diterima sebagai pengetahuan kalau tidak dijustifikasi sehingga seseorang dikatakan mengetahui jika dia meyakini sesuatu, sesuatu itu benar adanya dan keyakinan tersebut

¹ M. Aslam Haneef, “Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa yang Salah?”, *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: ISLAMIA*, Thn I, No. 6, 2005. Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, hlm. 50.

² Adi Setia, “Epistemologi Islam menurut Al-Attas: Satu Uraian Ringkas”, *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: ISLAMIA ...*, hlm. 53.

telah dijustifikasi (justifikasi yang dimaksud adalah jaminan kebenaran).³

Ada dua bentuk tujuan atau sasaran dalam sains dan teknologi, yakni tujuan sains dan teknologi itu sendiri dan tujuan ilmunan yang melakukan penelitian sains dan teknologi. Pertama, tujuan sains dan teknologi. Tujuan ini bisa dikelompokkan menjadi dua kategori:

- 1) Tujuan epistemik yakni beragam aktivitas untuk memajukan pengetahuan manusia yang mencakup pemberian deskripsi akurat tentang alam, pengembangan teori dan hipotesis pen-jelas, pembuatan prediksi yang bisa dipercaya, penghapusan eror dan bias, pengajaran sains kepada ilmunan generasi selanjutnya dan informasi kepada publik tentang beragam ide dan fakta saintifik.
- 2) Tujuan praktis yang mencakup penyelesaian masalah dalam bidang teknis, pengobatan, ekonomi, pertanian dan area penelitian terapan lainnya. Solusi yang diberikan untuk masa-lah praktis dapat meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan manusia, penguasaan teknologi, pengendalian alam dan manfaat praktis lainnya.

Kedua, tujuan ilmunan-pelaku sains dan teknologi. Berbeda dengan tujuan sains dan teknologi, tujuan ilmunan merupakan tujuan individualis masing-masing ilmunan. Meskipun tujuan yang ingin dicapai ilmunan kadangkala sejalan dengan tujuan sains dan teknologi itu sendiri-untuk mencapai pengetahuan, menyelesaikan masalah praktis dan sebagainya-ilmunan juga memiliki tujuan yang tidak termasuk dalam kategori tujuan sains dan teknologi. Misalnya, ada ilmunan yang mempraktekkan sains untuk mendapatkan uang, pekerjaan atau prestise. Tujuan-tujuan ini tidak ada bedanya dengan tujuan individu-individu di bidang bisnis, hukum, pengobatan dan

³ Audi, *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, (New York: Routledge, 2003), hlm. 220-224. Baca juga Murtadha Muththahari, *Mengenal Epistemologi*, diterj. dari *Mas'ale-ye Syenokh* oleh Muhammad Jawad Bafaqih (Jakarta : Lentera, 2003), hal. 80-109.

sebagainya yang tujuannya adalah mencari uang, kekuasaan, pekerjaan dan status sosial, bukan pengetahuan objektif. Oleh karena itu, tujuan ilmuwan yang bersifat individual ini tidak bisa dipandang sebagai tujuan sains dan teknologi. Sains dan teknologi merupakan pekerjaan dimana individu-individu saling bekerjasama untuk memajukan pengetahuan manusia, menghapuskan kebodohan dan menyelesaikan beragam persoalan praktis.⁴

Berangkat dari sumber, asas dan tujuan pengetahuan sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka usaha Islamisasi Ilmu Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masalah epistemologi. Epistemologi merupakan basis dari suatu kajian keilmuan. Sehingga proses islamisasi ilmu ekonomi Islam pun tidak boleh melewatkan basis awal dari ilmu tersebut, yaitu epistemologi ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan hasil perumusan dari aplikasi sistem ekonomi Islam yang bersumber dari seperangkat aturan berekonomi yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kebenaran ilmu ekonomi Islam tidak dibuktikan melalui metode ilmiah, akan tetapi dibuktikan melalui metode 'aqliyah.⁵ Metode ilmiah adalah bagian dari metode 'aqliyah yaitu metode berfikir logis. Metode ilmiah memiliki tahap akhir yang menentukan validitas kebenaran suatu ilmu, yaitu pengujian ilmiah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan riset eksperimental di laboratorium. Sedangkan metode *aqliyah* lebih luas cakupannya dari metode ilmiah, sebab metode *aqliyah* dapat digunakan untuk mencari kebenaran dari fakta-fakta transendental-metafisika melalui teks-teks wahyu yang tidak dapat diuji dengan eksperimen.

Ilmu ekonomi Islam tersusun dari dua sumber, yaitu berbagai aturan berekonomi dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang dirumuskan dalam *fiqh muamalat* dan realitas empiris⁶. Penggunaan metode ilmiah hanya dapat menguji kebenaran ilmu ekonomi Islam pada tataran realitas empiris, akan tetapi tidak dapat menguji kebenaran

⁴ Resnik, *The Ethics of Science: an Introduction*, (London: Routledge, 1998), hlm. 35-37

⁵ Mahmud Muhammad Babillahi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Terj. Akhmad Chumaidi Umar, (Yogyakarta, Salahudin Press, 1987), h. 10-11.

⁶ Luqman, Epistimologi-Ekonomi-<http://www.luqmannoic.wordpress.com>

pada tataran fakta-fakta transendental yang mendasari nilai dari ilmu ekonomi Islam.

A. Urgensi Usul Fikih dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Ushul Fiqh

Kalimat “*Ushul Fiqh*” berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari kata “*Ushul*” jamak dari *Ashlu*” (أصل) artinya asal, dasar, atau pokok.⁷ Kata *ushul fiqh* adalah kata ganda yang berasal dari kata “*ushul*” dan “*fiqh*” yang secara etimologi mempunyai arti “faham yang mendalam.”⁸ Sedangkan *ushul fiqh* dalam definisinya secara terminologi adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum-hukum *syara’* dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Adapun definisi yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi bahwa *ushul fiqh* adalah pengetahuan tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum *syara’* yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁹ Dan Fiqh (فقه) artinya paham atau mengerti. Ta’rif *ushul fiqh* menurut istilah adalah:

ادْرِكُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرَعِيَّةِ عَنْ أَدْلَتِهَا اِتِّفَاقِيَّةٍ

“Mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati untuk mengistinbatkan hukum-hukum syariat yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci.”

Di samping itu, ada juga ulama yang membuat definisi *ushul fiqh* secara ringkas yaitu:

دَالِيلُ الْفَقْهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ

“Dalil-dalil *fiqh* yang berbentuk global.”

⁷ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 2*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Cet. 3. 2005) Hal. 205

⁸ Ahmad Qorib. *Ushul Fikih 2*. (Jakarta: PT. Nimas Multima. cet 2. 1997) Hal. 170.

⁹Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah. Cet. 2. 2011) h. 1-2

Sebagai contoh misalnya:” Tiap-tiap perintah pada asalnya menunjukkan wajib atau “Tiap-tiap larangan pada asalnya menunjukkan haram dan lain-lain.¹⁰ Adapun fiqh itu sendiri menurut keterangan keterangan yang diberikan para ulama adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ أُدُلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ بِالإِسْتِدْلَالِ

“Ilmu tentang hukum-hukum syariat (yang diperoleh) dari dalil-dalil yang terperinci dengan jalan istidlal.”

Contohnya, adanya niat sebelum wudhu’ adalah wajib. Hukum wajib tersebut didapat dengan jalan istidlal atau ijtihad, yakni berdalil dari hadis Nabi yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.....(رواه البخاري ومسلم)

“Sesungguhnya setiap perbuatan harus dengan niat.”(H.R.Bukhari dan Muslim).¹¹

Sedangkan secara terminologi kata asl mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

a. Dalil

Dalil merupakan landasan hukum, seperti ungkapan Usuliyyun: asl dari wajibnya shalat adalah firman Allah dan sunnah Rasul. Maksudnya yang menjadi dalil kewajiban shalat adalah ayat al-qur’an dan sunnah.

b. Qa’idah

Qaidah adalah dasar atau pondasi, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya: *islam itu didirikan atas lima usul (dasar atau fondasi).*”

¹⁰Al-Shatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah*, Jilid I, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.). h. 21

¹¹Muhammad Ma’shum Zein. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jombang: Darul Hikmah. Cet 1. 2008) h. 243.

c. Rajih

Rajih dipahami sebagai pendapat terkuat, seperti ungkapan usuliyyun: "*yang kuat dari kandungan suatu ungkapan adalah arti hakikatnya.*" Maksudnya, setiap perkataan yang didengar atau dibaca, yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu.

d. Al-Far'u atau Cabang

Al-Far'u seperti ungkapan usuliyyun: *anak adalah cabang dari ayah.*"

e. Mustashab

Mustashab bermakna memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, orang yang telah berwudu kemudian merasa ragu-ragu apakah ia masih suci atau sudah batal wudhunya. Akan tetapi, ia merasakan yakin betul belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Atas dasar keyakinan ini, maka ia tetap dianggap suci atau masih mempunyai wudhu.

Dari kelima pengertian ushul secara bahasa diatas, pengertian yang sering digunakan dalam pembahasan usul fiqh adalah dalil, yaitu dalil-dalil fiqh.¹²

Adapun yang tidak memerlukan ijtihad adalah seperti wajibnya shalat haramnya memakan babi dan anjing dan lain-lain. Hal tersebut termasuk masalah *qatth'i* artinya dalil yang menunjukkan kepada sesuatu hukum yang telah tegas dan jelas, karena itu tidak termasuk dalam katagori ilmu yang dimaksudkan fiqh.¹³

Ilmu menurut pengertian fiqh adalah suatu sifat atau keadaan yang dapat membuka sesuatu yang dituju dengan sempurna.¹⁴ Bila dipandang dari sifatnya, ilmu yang dimaksudkan disini dapat dibagi pada dua bentuk atau jenis:

¹² Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Filsafat Hukum Islam.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013) h. 106

¹³ Abdul Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh.* Hal. 309

¹⁴ Muhammad Syukri Al-Bani Nasution. *Filsafat Hukum Islam.* Hal. 106

a. Dharury

Yakni, sesuatu yang tidak memerlukan pemikiran panjang untuk menghasilkannya, sebagai contoh: "langit lebih tinggi dari bumi atau ayah lebih tua dari anak.

b. Nadzary

Yakni sesuatu yang memerlukan pemikiran yang panjang untuk menghasilkannya.

Sebagai contoh: "Pembuktian adanya atau pembuktian bahwa Muhammad benar sebagai seorang Rasul.¹⁵

Adapun tingkatan ilmu yang dapat dicapai oleh fiqh hanyalah sampai tingkat *dzanny* artinya dugaan yang kuat atau berat dugaan. Seperti bila kita mencari keterangan-keterangan atau dalil-dalil, tentang suatu masalah dan kita mendapat sangkaan yang kuat, maka sangkaan yang demikianlah yang dinamakan *dzanny*. dimana jika sangkaan ini kita persentasekan, kira-kira memiliki kekuatan sekitar 75%. Apabila sangkaan bertambah kuat hingga mencapai 100% maka dinamakan *yaqin*. Definisi ini menggambarkan bahwa obyek pembahasan *ushul fiqh* adalah dalil *syara'* yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum *syara'* yang bersifat umum pula. Atau secara praktis obyek pembahasan *ushul fiqh* adalah dalil-dalil *syara'* dari segi penunjukannya kepada hukum atas perbuatan orang mukallaf.¹⁶

Ushul fiqh juga membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan hadis *mutawatir* dari hadis *ahad* dan mendahulukan nash dari *dhahir*. Dalam pembahasan tentang sumber hukum, dibahas pula tentang kemungkinan terjadinya kontradiksi antara dalil-dalil dan cara penyelesaiannya. Dan dibahas pula tentang orang-orang yang berhak dan berwenang dalam melahirkan hukum *syara'*.¹⁷

¹⁵Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet 13. 2010) h. 554-555

¹⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 13

¹⁷Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesewa . Cet 7. 2011) h. 45-47

Apabila sangkaan kita berimbang hingga kita tidak dapat mengatakan benar atau salah, ya atau tidak, hitam atau putih, karena sangkaan berukuran 50%, maka yang demikian dinamakan *syak*. Demikian juga bila sangkaan kita berukuran 25%, sebagai lawan dari *dzanny* yakni sangkaan yang lemah, dinamakan *Waham*. Tapi bila tidak mengetahui sama sekali dalam sesuatu hal, maka yang demikian dinamakan *Jahl* artinya bodoh atau tidak mengetahui masalah tersebut.¹⁸

2. Kaedah dan Kegunaan Ushul Fikih Dalam Ekonomi Islam

Kegunaan dari ilmu ushul fiqh adalah untuk mengetahui jalan dalam mendapatkan hukum *syara'* dan cara-cara untuk mengistinbatkan satu hukum baik itu hukum perkawinan maupun hukum muamalah dalam ekonomi dari dalil-dalilnya.¹⁹ Dengan menggunakan *ushul fiqh* itu, seseorang dapat terhindar dari jurang taklid, sebagaimana seorang mujtahid menggunakannya dalam mengistinbatkan *furu'* (cabang) dari ushul (asal). Begitu juga yang dilakukan oleh seorang *mutabi* dalam mengembalikan *furu'* (cabang) kepada ushul (asal).

Memang para fuqaha pernah memfatwakan, bahwa pintu ijtihad telah tertutup, maksudnya mulai tahun IV H, para ulama tidak diperbolehkan lagi berijtihad, fatwa tersebut jelas tidak beralasan, karena banyaknya dalil-dalil yang mendorong kaum muslimin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan ijtihad.

Tidak dapat dimungkiri, bahwa kebutuhan terhadap ilmu ushul fiqh sangat diperlukan dalam istinbat hukum-hukum ekonomi. Para ulama yang berijtihad atau yang mentarjih dari beberapa mazhab atau sekalipun hanya dalam satu mazhab saja misalnya, tidak akan dapat berbuat banyak dalam bidang hukum ekonomi bila tidak mengetahui kaidah-kaidah hukum atau kaidah-kaidah hukum dalam satu mazhab. Pendapat berbagai ulama dapat dibandingkan

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011) hal. 15

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 60.

apabila mengetahui dalil-dalil yang digunakannya, sedang hak tersebut jelas memerlukan ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidahnya. Oleh karena itu kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa ilmu ushul fiqh tetap diperlukan oleh para ahli-ahli fiqh atau orang-orang yang ingin mendalami sedikit atau banyak tentang fiqh. Fiqh tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan selama fiqh masih berkembang selama itu pula tetap diperlukan ilmu ushul fiqh.

Kegunaan dari *ushul fiqh* yaitu untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara'* yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali*. Dengan *ushul fiqh* pula dapat dikeluarkan suatu hukum yang tidak memiliki aturan yang jelas atau bahkan tidak memiliki nash dengancara *qiyas*, *istihsan*, *istishhab* dan berbagai metode pengambilan hukum yang lain. Selain itu dapat jugadijadikan sebagai pertimbangan tentang sebab terjadinya perbedaan madzhab diantara para Imam mujathid. Karena tidak mungkin kita hanya memahami tentang suatu hukum dari satu sudut pandang saja kecuali dengan mengetahui dalil hukum dan cara penjabaran hukum dari dalilnya.

Para ulama terdahulu telah berhasil merumuskan hukum *syara'* dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada dan terjabar secara terperinci dalam kitab-kitab *fiqh*. Kemudian apa kegunaan ilmu *ushul fiqh* bagi masyarakat yang datang kemudian? Dalam hal ini ada dua maksud kegunaan, yaitu:

- a. Apabila sudah mengetahui metode-metode *ushul fiqh* yang dirumuskan oleh ulama terdahulu dan ternyata suatu ketika terdapat masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam kitab terdahulu, maka dapat dicari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Apabila menghadapi masalah hukum *fiqh* yang terurai dalam kitab *fiqh*, akan tetapi mengalami kesulitandalam penerapannya karena ada perubahan yang terjadi daningin merumuskan hukum sesuai dengan tuntutan keadaanyang terjadi, maka usaha yang harus ditempuh

adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam *fiqh*. Kemudian untuk merumuskan kaidah baru tersebut haruslah diketahui secara baik cara-cara dan usaha ulama terdahulu dalam merumuskan kaidahnya yang semuanya dibahas dalam ilmu *ushul fiqh*.

- b. *Ushul fiqh* merupakan komponen utama dalam menghasilkan produk *fiqh muamalah*, karena *ushul fiqh* adalah ketentuan atau kaedah yang harus digunakan oleh para mujtahid dalam menghasilkan *fiqh*. Para ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa tujuan utama *ushul fiqh* adalah untuk mengetahui dalil-dalil Syara' yang menyangkut permasalahan akidah, ibadah dan mu'amalah, *uqubah* (sangsi) dan akhlak. Pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut pada gilirannya dapat diamalkan sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *ushul fiqh* bukan merupakan tujuan, tapi hanya sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah S.W.T. Pada setiap kasus termasuk urusan dalam ekonomi Islam. Sehingga, dapat dipedomani dan diamalkan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, yang menjadi tujuan sebenarnya adalah mempedomani dan mengamalkan hukum-hukum Allah S.W.T. yang diperoleh melalui kaidah-kaidah *ushul fiqh* tersebut. Secara sistematis, para ahli *ushul fiqh* mengemukakan kegunaan *ushul fiqh*, sebagai berikut:²⁰

- a. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan *mujtahid* dalam memperoleh hukum melalui metode *ijtihad* yang mereka susun.
- b. Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang *mujtahid*, sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum syara' dari nas. Sehingga, dengan *ushul fiqh* masyarakat awam dapat mengerti bagaimana para *mujtahid* menetapkan hukum.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.thn), h. 15-20

- c. Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid. Sehingga, berbagai persoalan baru yang muncul dan belum ada ketentuan yang dapat ditentukan hukumnya.
- d. Memelihara Agama dari kemungkinan penyalahgunaan dalil. Dalam pembahasan *ushul fiqh*, sekalipun suatu hukum diperoleh melalui hasil ijtihad, tetapi statusnya tetap mendapatkan pengakuan Syara'. Melalui *ushul fiqh* para peminat hukum Islam juga mengetahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam.
- e. Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan untuk menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.
- f. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Sehingga, para peminat hukum Islam dapat melakukan *tarjih* (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut mengemukakan alasannya.

Dari sini, jelaslah bahwa kegunaan *ushul fiqh* adalah untuk memperoleh hukum hukum Syara' tentang perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci sebagaimana disebutkan dalam pengertian *ushul fiqh*. Kegunaan *ushul fiqh* yang demikian masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan inilah kegunaannya yang pokok. Karenan paraulama terdahulu telah berusaha untuk mengeluarkan hukum dalam berbagai permasalahan. Akan tetapi, dengan perubahan dan perkembangan zaman dan juga dengan bervariasinya kondisi sosial di berbagai daerah adalah faktor-faktor yang sangat memungkinkan penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai ketetapan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Untuk itu, agar dapat mengeluarkan ketetapan hukum atas

persoalan-persoalan tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah kaidah dan mampu menerapkan pada dalil-dalilnya (Mukhtar dkk, 1995: 7).²¹

3. Konsep Ushul Fiqh Tentang *Maqasid Syariah* Dalam Ekonomi Islam

Pembicaraan tentang tujuan hukum Islam atau *maqasid al-shariah* merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam.²² Gagasan *maqasid al-shariah* sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini (438/1047) yang terkenal dengan Imam Haramain yang kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab ushul fiqhnya, *Al-Mustashfa*. Namun konsep ini kemudian dikembangkan secara komprehensif oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Shatibi (w. 790/1388).²³

Secara etimologi, kata *maqasid al-shari'ah* berasal dua kata yaitu kata *maqasid* dan *al-shari'ah*. Kata *maqasid* adalah kata yang berasal dari kata kerja dalam bentuk fi'il tsulasi yaitu kata *قصد، يقصد، قصد*, kalimat ini seringkali dipergunakan dengan makna yang berbeda.²⁴

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyyat*.

²¹Ilyas Supena, "Epistimologi Hukum Islam dalam Pandangan Heurmentika Fajlurahman" dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* (jurnal fakultas Uin Sunan Kalijaga) Vol. 2 No. II, 2009, h. 238-239.

²² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh* jilid 2. Hal. 205

²³ Al-Shatibi, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka. Cet 1. 1996). Hal. 104-119

²⁴ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.thn), Jilid II, h. 1017-1020. Kata *Maqasid al-Sahirah* bisa digunakan dengan susunan kata *mudaf* dan *mudhaf ilaih* dan bisa juga dengan susunan kata *sifah* dan *mausuf* dengan menggunakan kata *al-Maqasid al-Syariyyah*.

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.²⁵ Misalnya, firman Allah SWT dalam mewajibkan jihad.

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.(QS...)

Dan firman-Nya dalam mewajibkan *qishash* yang artinya: *Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS...)*

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT. Melalui ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.²⁶

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala

²⁵Lihat *al-Muawafaqat* karangan al-Syatibi, Juz II, h. 12. dan *al-Mustasfa* karangan al-Ghazali, Juz I, dari h. 39-41.

²⁶Di kutip dari FKI Ahlah Shuffah 103. Tafsir Maqashidi (Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah) .(Kediri: Lirboyo Press. 2013) h. 1

kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagaicontoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqasid* ini dalam bidang ekonomi Islam.²⁷ Misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.²⁸

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah*taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.²⁹

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidakpula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.³⁰

Dalam berbagai bidang Allah SWT mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Islam menganjurkan

²⁷Wahbah al-Zuhali, *Usul al-Fiqh*, Juz II, H. 1022.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, Juz II, h. 1032.

²⁹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi.*, (Lebanon: Dar al Fikr al-Islami. 1995) h. 17

³⁰ Muhammad Ma'shum Zein. *Ilmu Ushul Fiqh*. Hal. 243.

berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Berikut ini gambaran teori *maqashid* kontemporer dari 3 dimensi baru. Tingkatan *Maqashid al-Syariah*.³¹ Para ulama kontemporer membagi *maqashid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid amah* (*General maqashid*/tujuan-tujuan umum), *maqashid khaṣṣah* (*Specific maqashid*/tujuan-tujuan khusus) dan *maqashid juz'iyah* (*Partial maqashid*/tujuan-tujuan parsial).

a. *Maqashid 'amah*

Maksud dari *maqashid 'amah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dankemudahan.

b. *Maqashid Khaṣṣah*

Maqashid khaṣṣah adalah *maslahat* dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam *muamalat* dan lainnya.

c. *Sedang Maqashid Juz'iyah*

Maqashid juz'iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya. Di sisi yang lain, piramida *maqashid al-Shariah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *daruriyah*, *hajiyyah* dan *taḥsiniyyah*. Sedangkan penelitian para ulama klasik, *al-Maqashid al-daruriyah* dalam membuat Syariah Islam terangkum dalam penjangaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz*

³¹Lihat Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah*, h. 86.

al-nasl) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Para ulama klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usul al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.³²

Para ulama klasik menyusun *maqāṣid al-Shari'ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang dimulai dari *maqāṣid 'amah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqāṣid khasah* dan terakhir *maqāṣid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-daruriyah*, *ḥajiyah* kemudian *tahsiniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqāṣid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit.³³

Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqāṣid al-Syari'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/ bangunan yang bersifat piramida, yang mana *maqāṣid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair mutadakhilah wa mutaqaṭi'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.

Maqāṣid al-Syari'ah dan 'Illat Al-'illat dalam kajian usul fiqh adalah sifat yang dijadikan oleh *al-Syari'* (Pembuat syariah) sebagai *manat* (kaitan, patokan) bagi penetapan hukum berdasarkan persangkaan sebagai sarana merealisasikan tujuan Syariah dalam penetapan hukum". Atau "sifat yang tampak (*zahir*) dan terukur (*mundabit*) yang karenanya hukum ditetapkan."³⁴

Berdasarkan definisi di atas, para ahli ushul fiqh meletakkan beberapa syarat bagi 'illat, secara umum ada empat syarat, yaitu sifat

³² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terjemah oleh Saefullah Ma'sum dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet 13. 2010) h. 554-555

³³ Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih*. Hal. 45-47

³⁴ Al-Shatibi Al Muwwafaqat *Ushul al-Shari'ah*. Hal . 4

tersebut harus tampak (*zāhir*), terukur (*muḥdābit*), bisa diberlakukan kepada realitas atau hal yang lain, tidak berlaku khusus (*muta'addiy*) dan *mu'tabarāh* dalam arti tidak ada teks yang menunjukkan bahwa sifat tersebut tidak dipakai.³⁵

Mayoritas ahli ushul fiqh berpedoman pada *ta'līl al-ahkām*, khususnya dalam bidang muamalah. Dalam hal ini para ulama membedakan antara ranah ibadah *mahdah* dan ranah ibadah *ghai mahdah* atau disebut *muamalah*. Dalam ranah ibadah *mahdah*, hukum asalnya adalah *ta'abbud* dan berpatokan pada *naṣ*, sedang dalam muamalah dan kebiasaan hukum asalnya adalah melihat kepada makna dan maqasid, sebagaimana kaidah:

الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد

"pokok dalam ibadah adalah ketundukan bukan melihat pada tujuan dan maksud"

وفي المعاملات الالتفات إلى المعاني والأسرار والمقاصد

"Pokok dalam bermuamalah adalah melihat maksud, rahasia dan tujuannya)

Berkenaan dengan ini mereka membuat kaidah:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Artinya, hukum berputar bersama 'illat-nya, berlaku pada saat ada 'illat-nya dan tidak berlaku pada saat hilang 'illat-nya.

Hanya sebagian kecil diantara ulama yang tidak berpedoman pada *ta'līl alahkam*, yaitu Dawud dan Ibn Hazm al-Dhahiri beserta pengikut mereka yang dikenal dengan *mazhab Zhahiri*. Mereka menolak untuk mengaitkan hukum dan teks-teks syariah dengan 'illat serta mengajak untuk mengamalkan teks semata tanpa mencari 'illat hukum, sehingga hukumnya tidak bisa diberlakukan pada

³⁵Mansour Faqih, *Epistimologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo Press. 1994) h. 65

selain obyek dari teks tersebut. Dengan demikian mereka adalah kelompok yang menolak *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum.³⁶

B. Urgensi Ushul Fiqh Dalam Ekonomi Islam

Memahami *ushul fiqh* merupakan modal utama dalam mengistimbatkan suatu perkara. Fiqh muncul karena adanya *ushul fiqh*, dengan demikian *ushul fiqh* mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam. Mengambil hukum tanpa dasar hanyalah suatu kedustaan yang nyata, lain halnya dengan metode mujtahid dalam mengambil hukum. Kebutuhan terhadap *ushul fiqh* ini senantiasa tidak akan pernah padam, karena masyarakat senantiasa bergerak dinamis terutama atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak persoalan-persoalan yang senantiasa muncul yang perlu ditetapkan status hukumnya, yang hal itu belum secara tegas dihukumi pada masa-masa yang telah berlalu.

Studi *ushul fiqh* baru terasa penting bilamana dihadapkan kepada masalah-masalah baru yang hukumnya tidak terdapat dalam perbendaharaan fiqh lama. Disamping itu, dengan maraknya peminat hukum perbandingan mazhab, bahkan untuk mengetahui mana pendapat yang lebih kuat, serta adanya upaya untuk memperbaharui hukum Islam, akan semakin terasa tanpa pentingnya peranan *ushul fiqh*.³⁷

Tentunya peranan *ushul fiqh* sangat bermanfaat bagi para mujtahid dalam mengambil suatu hukum. Tidak terlepas juga pentingnya bagi *muttabi'* (pengikut dengan mengetahui dalilnya) untuk mengikuti suatu mazhab. Peran utama *ushul fiqh* adalah mendidik seseorang agar memahami hukum yang ia terima itu berdasarkan dalil syar'i, sehingga ia tidak terlalu menggantungkan diri pada pemahaman orang lain yang ia tidak ketahui dasarnya, demikian ia mengikuti orang lain itu mengetahui dasar-dasar hukumnya bukan hanya sekedar pokoknya ikut.³⁸

³⁶ Jurnal. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam. Hal.51-57

³⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 69

³⁸Jurnal. Kedudukan *Ushul Fiqh* Dalam Pengembangan Metodologi Ekonomi Islam, Hal. 90-10

Peranan *ushul fiqh* semakin tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, apabila ketika dihadapkan oleh perkembangan dunia yang semakin canggih dan modern. Para mujtahid mengerahkan semua kemampuannya dalam memutuskan hukum yang disebabkan karena kecanggihan tersebut. Tidak sedikit permasalahan yang muncul didalam ekonomi masyarakat dunia dengan hadirnya penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan.

Tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh tidak dibutuhkan lagi karena pintu ijtihad sudah ditutup, karena menurut kami pintu ijtihad terbuka sampai hari kiamat kelak, tentu dengan syarat-syarat yang berlaku. Ulama yang berfatwa bahwa pintu ijtihad sudah tertutup adalah dikarenakan dulu mereka melihat fenomena kelancaran orang bodoh terhadap syariah Allah SWT, mencetuskan hukum berdasarkan nafsu dan menyebarkan antara orang yang tidak memahami ushul fiqh. Orang yang tidak memenuhi syarat berijtihad juga tetap membutuhkan ilmu ini. Mereka cukup mempelajari kaedah-kaedah ushul fiqh sehingga rujukan yang digunakan mujtahid sebagai landasan pendapat mereka, dasar-dasar mazhab mereka dan sesekali dapat membandingkan dan menggugurkan (tarjih) salah satu pendapat dan pengeluaran hukum sesuai metode yang digunakan para imam mujtahid dalam menetapkan dan mencetuskan hukum.³⁹

Studi fiqh bagi mujtahid '*illah* agar ia mampu menginstinbatkan hukum yang ia hadapi dan terhindar dari kekeliruan. Sebaliknya, bagi non mujtahid yang mempelajari fiqh Islam, target ushul fiqh itu ialah agar ia dapat mengetahui metode ijtihad imam mazhab dalam menginstinbatkan hukum sehingga ia dapat mentarjih dan mentakrij pendapat mazhab tersebut.

Melalui ushul fiqh juga para peminat hukum dalam ekonomi Islam mengetahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus di pedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syari'at

³⁹ Lihat Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, h. 97-98

sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam. Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum dalam ekonomi Islam dapat melakukan *tarjih* (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan.

Oleh karena itu, peran ushul fiqh sangat berpengaruh besar di dalam ekonomi Islam, karena dapat mengambil kesimpulan hukum berdasarkan dari dalil-dalil yang kuat, tidak hanya melalui kemampuan logika saja. Suatu pengambilan hukum dalam ekonomi islam tanpa mempelajari serta memahami dengan benar ilmu ushul fiqh, hanya kedustaan semata. Melalui ushul fiqh seseorang dapat mengambil atau menetapkan suatu hukum dalam ekonomi Islam yang tepat dan tidak bersifat personal melainkan harus bersifat umum.⁴⁰

Ushul fiqh merupakan salah satu disiplin keilmuan tradisional yang memiliki posisi sangat penting dalam ekonomi Islam. Dalam disiplin ilmu ini pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran atau paradigma keilmuan dan kaidah-kaidah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar sebagai formulasi hukum yang diinginkan dibahas secara tuntas. Dengan katalain, *ushul fiqh* adalah disiplin ilmu yang paling bertanggungjawab sebagai perangkat metodologi yang paling kompeten guna menyusun, membentuk dan memberi corak hukum Islam yang diharapkan, terlebih terhadap hukum Islam terkait dengan permasalahan ekonomi yang merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa metodologi *ushul fiqh* bagi pengembangan konsentrasi studi.⁴¹

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi. Fungsi dan kegunaan (aksiologi) *ushul fiqh*

⁴⁰Jaya Miharja. "Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol VII, No. 1, 2014. hal. 137-153.

⁴¹Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang; Darul Hikmah, 2018), h. 102

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk menangkap makna dalam nash *syar'i* agar sesuai dengan kehendak *syar'i*, sehingga dapat menjawab permasalahan yang *up to date* sekalipun sesuai yang diinginkan. Namun, persoalannya tidak berhenti sampai di sini. Karena ternyata banyak para cendekiawan muslim merasakan kegelisahan intelektual jika melihat pada hukum Islam yang telah diformulasikan oleh para ulama klasik. Sebagian, seperti Munawwir Sjadzali, Fazlur Rahman, Abdullah an-Na'im dkk, menilai bahwa formulasi hukum pada beberapa aspek telah mengalami *crisis of relevance* terutama jika dikaitkan dengan standar hak asasi manusia internasional. Hal paling menyedihkan dalam kondisi semacam itu adalah munculnya stigma terhadap pembaharuan *ushul fiqh* yang menurut Munawwi benar-benar sudah tidak relevan.⁴²

Para ulama bersepakat bahwa fikih itu bermacam-macam jenisnya, seperti fikih ibadah, fikih *munakahat* (perkawinan), fikih *mu'āmalah*, fikih *siyāsah* (politik) dan lainnya. Walaupun fikih berhubungan dengan hukum-hukum Islam yang bersifat praktis, tetapi teori-teorinya dapat diterapkan dan dikembangkan dalam masalah ekonomi yang tercakup di bawah fikih *muamalah*. Selain itu, para ahli tafsir, fikih dan ilmu kalam juga telah menjelaskan nilai-nilai Islam dan penerapannya dalam masalah ekonomi.

Para ekonom muslim beranggapan bahwa nilai-nilai Islam telah mulai mewarnai penerapan ilmu ekonomi di era modern. Akan tetapi, hal ini diperlukan adanya elaborasi metodologi ekonomi yang tepat. Kemudian, dikembangkan dalam ilmu *ushūl fiqh* lalu dikaitkan dengan ilmu ekonomi konvensional, seperti halnya pada beberapa disiplin ilmu yang lain.⁴³

Penerapan *ushul fiqh* dalam ekonomi Islam dapat menggunakan beberapa metode, seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (menganggap baik terhadap sesuatu) dan *maslahah mursalah* atau *istislah* (kemaslahatan). Walaupun demikian, antara satu mazhab fikih

⁴²Ahmad Qorib. *Ushul Fikih 2*. Hal 180

⁴³Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih*. Hal. 48

dengan yang lain terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapinya. Misalnya, seputar *qiyas*. *Qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkannya dengan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan *illat* antara kedua peristiwa tersebut. Mazhab Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai dasar hukum Islam yang keempat.⁴⁴

Sedangkan, Mu'tazilah dan kelompok Zaidiyyah dari aliran Syi'ah menolak penggunaan *qiyas* sebagai dasar hukum. Mazhab Hanbali mempunyai pendapat yang lain. Mereka mengatakan bahwa menetapkan hukum berdasarkan hadis *mursal* itu lebih baik dari pada menggunakan *qiyas*. Alasan kelompok yang menjadikan *qiyas* sebagai dasar penetapan hukum adalah bahwa salah satu ciri ajaran Islam itu menghilangkan kesukaran (*daf'u al-harj*). Jika *qiyas* tidak dianggap sebagai salah satu landasan penetapan hukum, maka hukum Islam akan berlaku dalam wilayah sangat terbatas dan menyebabkan kesulitan bagi pemeluknya. *Qiyas* ada dua macam, yaitu *qiyas jali* dan *qiyas khafi*. Jika *qiyas jali* tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka penyelesaiannya dapat menggunakan *qiyas khafi*. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dan menegakkan kemaslahatan dan keadilan. Sungguhpun demikian, jika semua metode-metode hukum di atas, belum dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan keuangan, maka dapat menggunakan metode *maslahah mursalah* atau *istislāh* yang populerkan penggunaannya oleh Imam al-Shātibi dari mazhab Maliki. Metode ini juga digunakan oleh sebagian ulama mazhab Shafi'i seperti Imam al-Tufail, al-Ghazali dan al-Amidi. Penerapan metode *istislāh* dalam ekonomi Islam, seperti penerapan teori kepuasan masyarakat dalam ekonomi konvensional. Munculnya ushul fiqh dalam ilmu ekonomi konvensional dimulai ketika ilmu ekonomi ini sendiri relatif mapan dan telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Oleh karena itu, keberadaan ushul fiqh dalam ekonomi Islam adalah untuk menjustifikasi atau meng-

⁴⁴Al-Shatibi Al Muwwafaqat, *Ushul al-Shari'ah*, Hal . 10

absahkan keberadaan ekonomi masyarakat sekaligus dengan praktek-praktek empirisnya.⁴⁵

Situasi yang selalu berubah, menjadi dasar dari pentingnya keamanan ilmu ekonomi melalui sebuah metodologi. Tanpa metodologi, konsekuensinya, bila kelak terjadi perubahan mendasar terhadap praktek perekonomian secara global, maka ia juga akan mencari alat justifikasi yang baru dan sesuai, atau sebaliknya mengalami situasi yang tragis dan sulit untuk dibayangkan. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam. Islam membangun metodologinya terlebih dahulu. Dalam konteks ini misalnya berbentuk *ushul fiqh*, baru kemudian ilmu *fiqh* yang tercakup di dalamnya *fiqh mu'āmalat* dengan berbagai kategorinya yang berkembang mengikuti metodologi.⁴⁶ Dari sini pula suatu sistem kemudian memperoleh berbagai momentum sejarahnya melalui berbagai bentuk, baik teori maupun empiris.

Para pemikir Muslim, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Imam Abu anifah beserta kedua muridnya yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Syaibani, Imam Malik, Ibnu Taimiyyah dan nama-nama lain yang jumlahnya tidak terhitung telah memformulasikan berbagai perangkat dalam mekanisme ekonomi yang banyak dipakai ilmu ekonomi konvensional saat ini.

Sebagai contoh misalnya *Kitab al-Kharaj* yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf. Buku ini disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid untuk menangani masalah administrasi perpajakan. Dalam Kitab ini, Abu Yusuf mengemukakan sejumlah *maxim* atau kaidah dalam perpajakan yang memiliki muatan sama dengan kaidah yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nation*, khususnya "Of Taxes" dalam "The Sources of Revenue. Sebagaimana ditulis oleh Muqorobin dalam artikelnya berjudul "Beberapa Persoalan ushul fiqh dalam Ekonomim syariah Antara Sekuler dan Islam.

⁴⁵Ahmad Qorib, *Ushul Fikih* 2. h. 104

⁴⁶Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, h. 65

Sejarah membuktikan bahwa metode yang dipakai para ulama terdahulu kebanyakan mempergunakan metode penalaran dalam menghadapi suatu kasus yang tidak ditemukan jawabannya dalam Alquran, Sunnah maupun *ijmā'*. Kemudian, mereka menggunakan berbagai bentuk analisa seperti *qiyas*, *istihsan*, *al-masalih al-mursalah* dan sebagainya. Dengan demikian, mereka senantiasa merujuk pada sumber utama terlebih dahulu jika terdapat permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu Alquran dan al-Sunnah. Kemudian, beralih kepada *ijma'* atau langsung melakukan *ijtihad* dengan beberapa pendekatan yang secara garis besar terbagi dua Mazhab Syāfi'i, *Mutakallimun* (ahli ilmu kalam) dan kelompok Mu'tazilah lebih banyak mempergunakan pendekatan teoritis dan filosofis. Dengan pendekatan ini, mereka berharap dapat menjadikannya sebagai standar dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan empiris.

Pendekatan ini lebih menekankan eksposisi teori dengan berbagai prinsipnya yang kemudian diformulasikan secara detail ke dalam hukum fiqh. Pendekatan ini tidak terlalu mempedulikan apakah formulasi detail ini akan bersentuhan langsung dengan persoalan praktis ataupun tidak. Untuk yang terakhir ini contohnya adalah berbagai persoalan kenabian.⁴⁷

C. Urgensi Maqasid Syariah dan Maslahah dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Dengan kata lain, maqâshid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak

⁴⁷ Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", *Jurnal Religia; Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 15, Vol 1, 2012. hal. 80-87

dicapai dar isuatu penetapan hukum.⁴⁸

Izzuddin ibn Abd as-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁴⁹

Para ulama *mutaakhirin* (kontemporer) mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai berikut:

1. Menurut Thahir Ibnu Ashur, maqashid syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah.⁵⁰
2. Allal al-Fasy mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.⁵¹
3. Ahmad Raysuni mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.⁵²
4. Muhammad al-Yubi mendefinisikan maqashid syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.⁵³

Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Maqashid syari'ah mengandung pengertian

⁴⁸Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut ash-Shâtibi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), h. 5.

⁴⁹KhairulUmam, *UshûlFîqih*, (Bandung, PustakaSetia,2001), h. 125.

⁵⁰Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid,inda al-Imam Ash-Shatibi*, (Beiurut: al- Maaha dar al-Alamili al-Fikral-Islâmi,1992), h. 13

⁵¹Al-Fasy, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Makârimumu*, (KSA:Dâarul Garb Al-Islamy.1993), (Cet.5), hlm. 36.

⁵²Ahmad al-Raisuni, *Nazhâriyyatal-Maqashid....*,h. 13.

⁵³Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Al-aqâtuha bi-al-Adillah al-Syar'iyyah* (KSA: Dâral-Hijrahlian-Nasyrwaat-Tauzi", 1998), Cet. 1, hlm. 35.

umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid as-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁵⁴

Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Alquran dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW., para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya karena di atas landasan tujuan hukum itulah dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar *ushûl fiqh*, menyatakan bahwa *nash-nash syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqâshid syari'ah* (tujuan

⁵⁴Wahbahaz-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut:Dâr al-Fikr,1986), h. 1017.

hukum).⁵⁵ Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah az-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan persoalan *dharûri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.⁵⁶

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Alquran, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW., dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya dalam surah al-Anbiya': 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus yang artinya sebagai berikut:

"dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan secara sederhana, *masalah* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah SWT., untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

Artinya: *"Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram"*. (QS.Al-Ra'd:28)

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit

⁵⁵Abdal-WahabKhallaf, *Ilmu Ushûlal-Fiqh*, (Kairo:Maktabahal-Da'wahal-Islâmiyah, 1968), h. 198.

⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi...*,h. 1017.

untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kandungan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan ash-Shâtibi, seorang tokoh pembaru ushûl fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fi ushûl asy-Syari'ah*. Disitu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁵⁷

Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushûl fiqh, hikmah berbeda dengan illat. 'Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahîr*) dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munâsib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalbal-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

⁵⁷Ash-Shâtibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, tth), h. 6.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'al-mafâsid*. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushûl pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqâshid syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharûriyat, hajiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazâli, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabatal-maslahiyat* dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazâli dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁸

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqâshid syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abdas-Salâm dari mazhab Syâfi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnyanya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd as-Salâm telah berusaha mengembangkan konsep *maslahat* yang merupakan inti pembahasan dari *maqâshid*

⁵⁸Al-Ghazâli, *Al-Mustashfâ min Ilmal-Ushûl*, (Beirut:Dâr al-Fikr,tth), h. 251.

syari'ah.⁵⁹

Pembahasan tentang *maqâshid syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh As-Shâtibi dalam kitabnya *al-Muwâfaqât* yang sangat terkenal itu. Disitu ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklifhukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqâshid syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqâshid syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut⁶⁰, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Lebih lanjut, As-Shâtibi dalam uraiannya tentang *maqâshid syari'ah* membagi tujuan *syari'ah* itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan *syari'at* menurut perumusny (syari') dan

⁵⁹Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 51.

⁶⁰Wahbahaz-Zuhaili, *Ushûlal-Fiqh...*, h. 1019

tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). *Maqâshid syarî'ah* dalam konteks maqâshid al-syari' meliputi empat hal, yaitu⁶¹:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
5. Tujuan syari'at membawa manusia selalu dibawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari *maqâshid syarî'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharûriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.
2. *Hâjiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak

⁶¹Ash-Shâtibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syari'ah*,...,h. 70.

ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. *Tahsinîyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral) dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsinîyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶²

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahat juz'îyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
4. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan

⁶²Al-Zuhaili, *Ushûlul-Fiqh...*.h. 1020-1023.

mafsadat.⁶³

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka memper-tegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *dharûriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyat* dan *maslahat hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, *maslahat qath'iyah* harus diutamakan dari *maslahat zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqâshid syarî'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *dharûriyat*.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT., menyebutkan beberapa kata syarî'ah di antaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jatsiyah dan al-Syura:

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (Al-Jatsiah: 18)

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa syariat sama dengan Agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syarî'at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat, Muhammad Syaltut misalnya mengatakan bahwa syarî'at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT., untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non

⁶³Az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh...*, h. 1023-1029.

Muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁶⁴

Setelah menjelaskan definisi *maqâshid* dan *syari'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *maqâshid syari'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*maqâshid syari'ah*).

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa makna *syari'at* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.⁶⁵ Sedangkan maksud-maksud *syari'at* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.⁶⁶ Maksud-maksud tersebut, juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Karena setiap hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya, pasti terdapat hikmah, bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Karena Allah Maha suci untuk membuat *syari'at* yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontra diksi dengan sebuah hikmah.⁶⁷

Ar-Raisuni mengungkapkan bahwa *maqâshid syari'ah* adalah manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini *maqâshid* atau objek yang diletakkan oleh Syara' dalam mensyariatkan hukum. Istilah populer yang digunakan ialah *maqâshid syari'ah*, *maqâshid al-Syari'* (Allah) dan *maqâshid syara'*.⁶⁸

Ada yang menganggap *maqâshid* ialah *maslahah* itu sendiri, baik mendatangkan *maslahah* atau menolak mafsadah. Sedangkan Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan *maslahah-maslahah* untuk manusia baik di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariat itu

⁶⁴Mahmud Syaltout, *Islâm: Aqîdah wa-Syari'ah*, (Kairo:Dâral-Qalam,1966),h. 12.

⁶⁵Yûsuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqâshid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).h. 12.

⁶⁶Yûsufal-Qaradhawi, *Fiqih Maqâshid al-Syari'ah...*,h.17.

⁶⁷Yûsufal-Qaradhawi, *Fiqih Maqâshid al-Syari'ah...*,h.18.

⁶⁸Ahmadal-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqâshi 'inda al-Imâm ash-Shâtibi*, (Beirut:al- Mahadal-'Alâmi li-al-Fikral-Islâmi, 1992), h. 13.

dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia⁶⁹.

Sementara itu, Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat seperti itu bahwa Syariat itu semuanya *maslahah*, baik menolak kejahatan atau menarik kebaikan".⁷⁰ Al-Qadhî Iyadh pernah berkomentar bahwa berhukum untuk menghindari kemudaratan adalah wajib. Ibnu al-Arabi mensifatkan *maqâshid* adalah menghindari dari kesusahan atau *masyaqqah*, ia beralasan bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya.⁷¹

Ada juga yang memahami *maqâshid* sebagai lima prinsip dasar dalam Islam. Asas itu adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷² Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap *maqâshid* itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum.⁷³ Ibn Ashur mendefinisikan *maqâshid* sebagai pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan pada keseluruhannya atau sebahagian besarnya.⁷⁴ Berbeda dengan Ibnu Ashur, Ahmad Al-Raisuni mendefinisikan *maqâshid* sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Dalam hal ini al-Raisuni membagi *maqâshid* dengan lebih teliti dalam tiga bagian, yaitu *maqâshid* umum, *maqâshid* khusus dan *maqâshid* parsial (*juz'î*). Menurutnya *maqâshid* umum ialah objektif yang diambil oleh syara' dalam menentukan semua atau sebahagian besar hukum syara', contohnya konsep keadilan dan kesetaraan (al-Musawah) yang terdapat dalam semua hukum syara'. *Maqâshid* khusus ialah yang diambil oleh syariah dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu, contohnya hukum kekeluargaan. Sedangkan *maqâshid* parsial ialah

⁶⁹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'âm al-Muwâqqin*, (Beirut:Dâral-Kutubal-Ilmiyyah, 1996), Jilid3, h. 37

⁷⁰Al-Izz bin Abdul as-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlihi al-Anâm*, ((Beirut:Dâral-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), h. 9.

⁷¹Nuruddin Mukhtar, *al-Ijtihad al-Maqâshidi*, (Qatar: Dâr al-Muassasah, 1998), h. 50.

⁷²Pada perkembangannya sekarang tidak lagi hanya lima asas yang pokok (al-Dharuriyat al-Khams) tapi sudah menjadi enam hal pokok sebagai poros masalah dengan *al-dharuriyat al-sittah* dengan menambahkan kemaslahatan lingkungan dan kesehatan

⁷³Nuruddin Mukhtar, *al-Ijtihad...*,h.50

⁷⁴Mohammadal-Tahir al-Misawi, *Ibn Asyur wa Kitâbuhu Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (KualaLumpur: Al-Basyair li-al-Intaj al-Ilmi,1998), h.171.

yang diambil oleh syariah dalam menentukan sesuatu hukum tertentu, contohnya adalah menikah.

Kalau melihat pengertian *maqâshid syarî'ah* secara istilah tidak ada definisikhusus yang dibuat oleh para ulama usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah dimaklumi dalam kalangan mereka. Termasuk As-Shâtibi sebagai bapak *maqâshid syarî'ah* sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau cuman mengungkapkan tentang syarî'ah dan fungsinya bagi manusia seperti yang beliau ungkapkan dalam kitab al-Muwâfaqât':

Artinya: *Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat".*

Artinya: *Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".*

Dari ungkapan as-Shâtibitersebutbisa dikatakan bahwa as-Shâtibi tidak mendefinisikan *maqâshid syarî'ah* secara konprehensif Cuma menegaskan bahwa doktrin *maqâshid syarî'ah* adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu As-Shâtibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, ⁷⁵berbeda dengan ahli ushûl fiqh lainnya seperti an-Nabhani, misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah,, illat atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat dari penerapan syariat.⁷⁶

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan 'illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (*shighat*) tidaklah menunjukkan adanya'illat (*al-'illiyah*), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (*maslahat*) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah SWT., dalam Alqur'an Surat Al-Isra (17) ayat 82 dan al-Anbiya (21) ayat 107 yang Artinya:*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)*

⁷⁵Al-Shâtibi, *Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syari'at*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid I, hlm. 21.

rahmat bagi semesta alam. (al-Anbiya: 107)

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat *li ta'lil* (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya lam talil. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (*an-natijah*) diutusnya Muhammad SAW., adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (*maslahat*) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan 'illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan diatas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqâshid syari'ah* dan jika diteliti definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, definisi yang paling tepat, padat dan merangkum seluruh konsep maqâshid ialah definisi yang dikemukakan oleh al-Raisuni.

2. Urgensi *Maqâshid syari'ah* dalam Pembaruan Hukum Ekonomi Islam

Pada saat ini umat Islam dihadapkan kepada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan Iptek. Munculnya kegiatan ekonomi kontemporer dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, menimbulkan pula permasalahan hukum dikalangan umat. Kompleksitas permasalahan perekonomian modern dewasa ini, menuntut pula adanya elastisitas dan fleksibilitas dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Apalagi, realita yang telah memberikan gambaran yang jelas, yaitu "*Sesungguhnya nash itu telah berakhir, sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir.*"⁷⁷Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat.

Tidak semestinya kemajuan Iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nas, tetap harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal, seperti aktivitas

⁷⁷Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazâhib al-Islâmiyyah fi-al-Siyâsah wa-al-Aqâ'id wa-Tarikh al-Mazâhib al-Fiqhiyyah*, (Kairo:Dâral-Fikr,1989),h. 6.

ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global. Sebagai contoh, dapat dikemukakan mengenai persoalan aktivitas jual beli dan jaminan utang-piutang.

Dalam Alquran hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh *khiyar* dan mana yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara menjamin utang-piutang dan hukum-hukum secara rinci. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad.

Khusus dalam bidang muamalah, selama dapat diketahui tujuan hukumnya (*maqâshid syarî'ah*), maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Terhadap ayat-ayat hukum yang terbatas jumlahnya dalam bidang muamalah ini, akan muncul pula pemecahannya yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian dan tidak terbatas jumlahnya.

Pengetahuan tentang *maqâshid syarî'ah*, seperti ditegaskan oleh 'Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Alquran dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁷⁸

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqâshid syarî'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqâshid syarî'ah*nya yang merupakan alasan logis ('*illat*') dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS.al- Maidah:90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqâshid syarî'at* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('*illat*') dari

⁷⁸SatriaEffendi, *UshûlFiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237.

keharaman khamar adalah sifat memabukannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, 'illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan diatas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Ushûl fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya, itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqâshid syarî'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan* dan *istislah* (*maslahah mursalah*) dan lainnya seperti *istishab saddal-zari'ah*, dan '*urf* (adatkebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqâshid syarî'ah*, juga oleh sebagian besar ulama ushûl fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum diatas.

Diskursus *maqâshid syarî'ah* sebelum as-Shâtibi banyak ber-
kutat pada persoalan' *illah* hukum dan *maslahah* sebagai landasan

perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *ushûl* banyak yang merangkap sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana dibidang *ushûl fikih* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus *maqâshid syarî'ah*.. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka-teologi.

Menurutas-Shâtibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian '*illah* dalam Ushûl fikih. Ada peralihan makna atau perubahan semantik '*illah* dari studi teologi menuju studi filsafat hukum.

Ash-Shâtibi berpendapat bahwa masalah sebagai motif syarî'ah diketahui melalui metode induktif, baik sebagai *grand theme* syarî'ah secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. As-Shâtibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam Alquran. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Doktrin *maqâshid syarî'ah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Ash-Shâtibi memfalsifikasi studi *maqâshid syarî'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqâshid al-syari*, atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqâshid al-mukallaf* atau subjek hukum.

Kemaslahatan sebagai *maqâshid al-syari*, mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, as-Shâtibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. As-Shâtibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursus-nya.

Maqâshid syarî'ah versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari'at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan *maslahah*.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan taklif. Perintah yang merupakan bentuk taklif harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini as-Shâtibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau common sense.
3. Syari'at semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
4. Tujuan syari'at membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Dari sudut *maqâshidal-mukallaf*, as-Shâtibi mengangkat pembahasan tentang kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam hal ini as-Shâtibi membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukallaf yaitu tentang konsep *mashlahah*, *dalalah*, *taklif*, *ta'abbud* dan niat.

Maqâshid syarî'ah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. *Maqâshid syarî'ah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal, public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqâshid syarî'ah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Tanpa *maqâshid syari'ah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqâshid syari'ah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang.

Para ulama ushûl fiqh sepakat bahwa pengetahuan *maqâshid syari'ah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan yang terus berkembang. Upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini, memerlukan analisis berdimensi filosofis yang terkandung dalam konsep *maqâshid syari'ah*. Pemahaman *maqâshid syari'ah* ini bertitik tolak dari pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti *falsafah tasyri'*, *tarikh tasyri' fil muamalah*, *ulumul Quran*, *at-Tafsir*, *ulumul hadits* dan *mushtalahal-hadits*, *qawaid fiqh*, *kaedah Ushûl fiqh* dan kaedah bahasa Arab. Pengetahuan tentang *maqâshid al-syariah* ini menjadi syarat yang sangat penting dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer.

Maqâshid syari'ah adalah jantung dalam ilmu Ushûl fiqh, karena itu *maqâshid syari'ah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. *Maqâshid syari'ah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal, public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqâshid syari'ah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Tanpa *maqâshid syari'ah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqâshid syari'ah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman Ushûl fiqh dan *maqâshid syari'ah*,

maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa *maqâshid syari'ah*, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman *maqâshid syari'ah* maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal. Jiwa *maqâshid syari'ah* akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (*shalihun likulli zaman wa makan*). Penerapan *maqâshid syari'ah* akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.

Berdasarkan paparan di atas, maka para pejabat Bank Indonesia yang mengawasi dan mengaudit bank syariah dan pejabat OJK yang mengawasi/meregulasi LKS, wajib sekali (mutlak, tidak bisa ditawar) harus memiliki kompetensi yang memadai (memenuhi standar), sebaiknya disertifikasi dalam bidang *Ushûl fiqh* dan kalau diperlukan mengikuti training dan workshop *Ushûl fiqh* tentang perbankan dan keuangan syariah.

D. Urgensi Qawaid Fikhiyah dalam Ekonomi Islam

Fiqh secara bahasa memiliki makna mengerti, memahami dan mengetahui. Kata *al-fiqh* memiliki makna pengertian, pengetahuan, kepandaian dan ilmu fikih. Secara istilah dan dipahami umum, fikih merupakan kodifikasi hukum syaria'h berdasarkan pemahaman ulama fikih yang dijadikan pedoman bagi muslim dalam segala aspek kehidupannya. Sementara itu, ekonomi merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang dipahami sebagai keterkaitan atau hubungan antara satu individu dengan individu yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mu'amalah ini membutuhkan kaidah dan aturan main agar tujuan syari'ah dapat tercapai.⁷⁹

⁷⁹Waluya, "Urgensi Fiqih Muamalah dalam Berekonomi," *Majalah Tabligh*, No.6/ XIV, 2016, hal. 54.

Kaidah fikih menawarkan efisiensi dan dipandang urgen dalam mencari solusi hukum Islam karena sejumlah alasan berikut:⁸⁰

Pertama, kaidah fikih memiliki tempat yang istimewa dalam ranah keilmuan Islam karena pakar atau tidaknya seorang fakih tergantung pada penguasaannya terhadap kaidah fikih.

Kedua, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberikan fatwa.

Ketiga, ilmu fikih dapat dijadikan lebih teratur agar mempermudah orang dalam mengidentifikasi fikih yang beragam jumlahnya.

Keempat, mempermudah dalam memelihara dan menghafal perkara yang banyak dalam kaidah-kaidah yang menyatu.

Kelima, kaidah fikih memberikan gambaran jelas mengenai prinsip fikih yang bersifat umum dan membuka wawasan serta jalan pikiran tentang fikih.

Keenam, kaidah fikih mengikat hukum cabang yang bersifat praktis.

Kaidah-kaidah fikih yang urgen dalam aktivitas ekonomi antara lain:⁸¹

1. Pelarangan riba untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman. Riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga kaidah fikih yang melarang riba menjadi urgen untuk menghindari ketidakadilan dan kezaliman.
2. Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong. Dalam aktivitas ekonomi, kaidah ini menuntun aktivitas ekonomi untuk tujuan saling menolong, tidak semata mementingkan diri sendiri.
3. Memberikan kemudahan dan keringanan bagi orang lain dalam wujud ijarah (sewa) dan wadi'ah (titipan).
4. Islam tidak hanya mengakui profit tapi juga aktivitas nonprofit dalam bentuk hibah, hadiah, wakaf dan sebagainya. Hal ini

⁸⁰Hilal, "Urgensi Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Al-'Adalah*, Vol.X, No.1, Januari 2011, hal. 1.

⁸¹Waluya, "Urgensi Fiqih.....", hal. 55.

dikarenakan dalam Islam tidak dibenarkan menimbun harta atau harta hanya berputar di kalangan orang kaya saja.

BAB V

ASPEK AKSIOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya, aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh¹. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dalam filsafat islam tentu semuanya mengarah pada kesempurnaan manusia sebagai insan kamil. Dan dalam ekonomi Islam aksiologi berperan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat serta nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam .

Ruang Lingkup Aksiologi Filsafat Islam meliputi Etika dan Estetika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia². Cara memandangnya dari sudut baik dan tidak baik, etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia. Baik perilaku terhadap sesama manusia, perilaku terhadap alam dan seisinya serta perilaku terhadap Tuhan. Estetika adalah cabang ilmu yang membahas masalah keindahan. Bagaimana keindahan bisa tercipta dan bagaimana orang bisa merasakannya dan memberi penilaian terhadap keindahan tersebut. Maka Aksiologi akan selalu berkaitan dengan baik dan buruk, indah dan jelek dari ekonomi Islam³.

¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, hal.141

² Agustianto, *FILSAFAT EKONOMI ISLAM*

³ Wa Ode Zainab. *Ontologi, Epistimologi, & Aksiologi*,

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan⁴. Setidaknya ada tiga nilai yang dibahas dalam aksiologi yaitu logika, etika dan estetika. Ditelusuri secara bahasa, logika dalam bahasa Inggris *logic*, bahasa Latin *logica* dan bahasa Yunani *logike/ logikos* bermakna ucapan yang dapat dimengerti dan akal budi yang berfungsi dengan baik, sistematis, teratur dan dapat dimengerti. Logika merupakan studi tentang aturan terkait penalaran yang tepat atau pola pikir yang masuk akal dan sah. Konsep logika berkembang dari masa Yunani lewat dialektika Plato, pada masa Islam lewat pemikiran Avicena tentang tanda-tanda pemikiran kedua yang dianggap sebagai logika, hingga zaman modern dengan munculnya konsep *kalkulus proposional*.⁵

Ethikos atau *ethos* dalam bahasa Yunani dipahami sebagai adat, kebiasaan, atau praktik. Etika berdasarkan definisi ini, menurut Aristoteles mencakup ide tentang karakter dan kecenderungan. Ketika etika dikaitkan dengan perilaku, maka suatu perilaku dikatakan etis jika ada dalam kerangka baik dan benar. Etika bisa bersifat normatif sebagai sistem nilai yang menuntun pengambilan keputusan baik dan buruk, benar dan salah dan bisa juga berupa meta etika yakni penganalisisan logika perbuatan dalam kaitannya dengan baik dan buruk, benar dan salah tersebut.⁶

Sementara itu, Estetika berusaha mencari nilai-nilai indah dan nilai-nilai buruk tentang sesuatu. Keindahan dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih berwarna, harmonis dan memuaskan hati yang akan menumbuhkan semangat, harapan hidup dan kreatifitas. Nilai estetika dapat ditemukan pada kesenian, contohnya musik. Keindahan musik dapat menggugah perasaan dan membuat suasana hati menjadi senang.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jika ditinjau dari aspek aksiologi, ekonomi Islam mengajarkan setiap kegiatan manusia

⁴ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam....*, hlm. 141 dan 414

⁵ Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.519-522.

⁶ Bagus, *Kamus Filsafat.....*, hlm. 217-218.

⁷ Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001), hlm. 131-132.

didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan samata-mata kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Bahkan jikalau pun kebahagiaan dunia harus dikorbankan tidak masalah asalakan kebahagiaan ukhrawi akan terpenuhi kelak. Kebahagiaan atau kebutuhan duniawi hanyalah sebagai perantara untuk terciptanya kebahagiaan ukhrawi, karena perantara itu harus ditempuh untuk tercapainya kebahagiaan akhirat.

A. Tujuan, Kegunaan dan Sifat Ekonomi Islam

1. Konsep dan Sifat Ekonomi Islam

Salah satu bentuk budaya adalah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa segala hal yang dilakukan oleh manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai. Bahkan, setiap orang punya pandangan sendiri tentang apa yang baik dan buruk untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, nilai, tujuan dan tindakan seseorang dalam hidupnya memiliki hubungan timbal balik. Satu tindakan atau tujuan tertentu melibatkan nilai-nilai yang diyakini dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga halnya dengan ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi sangat tergantung pada nilai-nilai sehingga secara kultural aktivitas tersebut terbatas.⁸ Sementara itu menurut McFall, budaya dan ekonomi merupakan sebagian dari sekian banyak kategori dalam ilmu sosial dan pengetahuan manusia yang paling problematis. Hal ini dikarenakan keduanya sulit didefinisikan dan juga mengacu pada dimensi pengalaman manusia yang paling abstrak hingga transaksi harian yang paling detil. Jika dikategorikan, ekonomi merupakan persoalan produksi dan budaya adalah persoalan konsumsi.⁹ Berwujud kompleksitas ide, pemikiran, pola hidup dan kriteria justifikasi yang menentukan jalan hidup sebuah masyarakat, budaya membentuk perilaku perorangan dalam

⁸ Carrier, *A Handbook of Anthropology*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2005), hlm. 306.

⁹McFall, *Advertising: a Cultural Economy*, (London: Sage Publication, 2004), hlm. 61.

memenuhi kebutuhan dengan menyediakan aturan-aturan yang menentukan apa yang dibutuhkan oleh seseorang, kapan dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam aktivitas ekonomi, budaya mengontrol perilaku individu dengan penyediaan aturan dan norma pengendali perilaku dan berbentuk institusi seperti keluarga, pemerintah, organisasi produksi dan dalam bentuk perdagangan ekonomi.¹⁰

Beranjak dari hubungan antara ekonomi dan budaya, makna ekonomi sendiri berdasarkan kamus Routledge adalah 1) keinginan, usaha dan kepuasan, 2) studi tentang berbagai metode umum yang digunakan manusia untuk bekerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik mereka dan 3) ilmu yang mempelajari perilaku manusia terkait pola relasi antara tujuan manusia itu sendiri dengan keterbatasan yang melahirkan alternatif-alternatif pemanfaatan sumber daya. Pada awalnya, kata ekonomi hanya bermakna pengaturan rumah tangga. Namun makna ini kemudian mengalami perubahan mengikuti perubahan dan perkembangan pelaku ekonomi itu sendiri. Kemudian berkembanglah pembahasan makro ekonomi, pemanfaatan matematika untuk ekonomi dan pengenalan berbagai profesi dalam bidang ekonomi.¹¹

Heilbroner dan Milberg yang menyatakan bahwa makna umum ekonomi adalah studi tentang sebuah proses yang didapati dalam masyarakat. Proses tersebut merupakan penyediaan kesejahteraan materi bagi masyarakat tersebut. Lebih sederhana lagi, ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hariannya. Pemahaman ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejarah ekonomi berawal dari persoalan keberlangsungan hidup dan bagaimana manusia mengatasi persoalan tersebut.¹²

¹⁰Katzner, *Culture and Economic Explanation: Economics in the US and Japan*, (New York: Routledge, 2008), hlm. 1.

¹¹ Rutherford, *Routledge Dictionary of Economics*, (New York: Routledge, 2002), hlm. 164.

¹²Heilbroner dan Milberg, *The Making of Economic Society*, (New Jersey: Pearson Education, 2012), hlm. 1-2.

Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa hidup manusia memiliki dua aspek utama, yaitu aspek material dan keyakinan agama (spiritual). Aktivitas ekonomi ambil bagian penting dalam kedua aspek tersebut dimana ekonomi berperan sebagai penunjang kehidupan manusia sekaligus menjadi kewajiban agama.¹³ Ekonomi merupakan salah satu esensi dari Islam itu sendiri. Aktivitas ekonomi merupakan spiritualitas Islam dengan menjadikan Tauhid sebagai basisnya. Dalam pandangan Islam, materi dan spiritual saling berhubungan sehingga perubahan spiritual akan berdampak nyata pada materi. Islam mengakui bahwa manusia adalah *homo-economicus* hanya saja dalam kerangka bahwa manusia bebas mengatur hidupnya dengan pola ekonomi apapun dengan tuntunan moral sehingga bertanggungjawab pada dirinya sendiri, lingkungan dan masyarakat. Semua manusia sama dan tidak dibenarkan melakukan diskriminasi. Konsep ini kemudian melahirkan dua prinsip utama sistem ekonomi yaitu tidak dibenarkan eksploitasi dan memisahkan serta mengisolasi diri dari yang lain baik dalam kondisi pribadi yang menguntungkan ataupun dalam kondisi merugi.¹⁴

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi juga guna memenuhi kebutuhan ruhani. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa hidup manusia memiliki dua aspek utama, yaitu aspek material dan keyakinan agama (spiritual). Aktivitas ekonomi ambil bagian penting dalam kedua aspek tersebut dimana ekonomi berperan sebagai penunjang kehidupan manusia sekaligus menjadi kewajiban agama.¹⁵

Menjadi manusia salih yang meninggalkan aspek duniawi dan hanya memenuhi kebutuhan ruhani, tidaklah diajarkan dalam Islam. Islam justru menegaskan bahwa salah satu wujud dari ketaatan, ibadah dan keimanan seseorang adalah lewat distribusi

¹³Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Chicester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 25.

¹⁴Al-Faruqi, *al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 157-158 & 169-171.

¹⁵Ayub, *Understanding Islamic Finance.....*, hlm. 25.

sumber daya yang adil dan merata (melakukan aktivitas ekonomi).¹⁶ Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Umer Chapra bahwa manusia memiliki kebutuhan material dan spiritual sehingga kebahagiaan akan tercapai ketika terjadi keseimbangan dalam pemenuhan dua jenis kebutuhan tersebut.¹⁷

Sebagai agama, Islam adalah aturan perilaku yang terintegrasi yang berhubungan dengan kesehatan personal di satu sisi dan hubungan manusia dengan alam di sisi lain. Islam tidak membedakan manusia dan alam. Kesatuan nilai Islam, Iman dan Ihsan dalam ajaran Islam menjadi basis untuk menjaga bumi sebagai satu-satunya rumah tempat manusia tinggal. Abu Bakar mengajarkan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga bumi dan kelangsungan hidup di dalamnya: 1) tidak menyakiti wanita dan anak-anak, 2) tidak menyakiti dan membunuh binatang dan 3) tidak menebang dan merusak pepohonan. Ketiga langkah ini mengandung hikmah penegakan keadilan dan penghargaan terhadap nilai-nilai alam.¹⁸

Sementara dalam bidang ekonomi, Islam memandang bahwa perkembangan ekonomi dan harta yang melimpah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk menopang masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam tidak hanya mengikat manusia dengan prinsip syariah lewat aturan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tapi juga harus memperhatikan dampak dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan terhadap orang lain, masyarakat dan juga lingkungan.¹⁹

Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang dicapai dalam rangka penghambaan diri kepada Allah SWT. Penghambaan ini membawa

¹⁶Ayub, *Understanding Islamic Finance.....*, hlm. 26.

¹⁷Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin B., (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. xx.

¹⁸Khalid, "Islam and the Environment," *Encyclopedia of Global Environmental Change*, Vol.5, 2002, hlm. 332-333.

¹⁹Ayub, *Understanding Islamic Finance.....*, hlm. 30.

pada kebutuhan akan adanya Allah SWT sehingga manusia memiliki kontrol dalam berperilaku.²⁰

Manusia, dalam skala yang lebih besar merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia sekaligus merupakan makhluk ekonomi karena hidupnya tidak pernah lepas dari pemenuhan kebutuhan. Kegiatan ekonomi dalam Islam bukan semata pemenuhan kebutuhan dan keinginan, melainkan juga harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, tidak zalim ataupun batil.²¹

Ekonomi Islam memiliki sejumlah sifat atau karakteristik yang membedakan bentuk ekonomi Islam dari ekonomi yang lain. Sifat tersebut antara lain:²²

- a. *Ilahiyah* atau ketuhanan yang mengandung makna bahwa ekonomi Islam secara mutlak berdasarkan pada keyakinan dan keimanan karena setiap aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku di dalamnya mewakili ajaran Islam. Hal ini juga bermakna bahwa umat Islam selalu mematuhi perintah Ilahi dalam melakukan aktivitas ekonomi, mereka mematuhi perintah Allah di manapun dan kapanpun mereka melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan segala aktivitas ekonomi mereka didasarkan pada pengabdian dan pencarian pahala dan ridhonya.
- b. Etis. Ekonomi Islam sangat tergantung pada etika dan moral. Dalam ajaran Islam, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari etika karena Islam pada dasarnya secara utama merupakan pesan etis dari Allah SWT terhadap manusia sebagaimana sabda Nabi Muhamad SAW yang berarti: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Nilai-nilai etika ini harus ter-

²⁰ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir al-Qur'an Tematik, Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), hlm. 175.

²¹ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat.....*, hlm. 176.

²² Boutayeba, dkk., "Ethics in Islamic Economics," *Annales: Ethics in Economic Life*, Vol.17, No., Desember 2014 hlm. 114.

manifestasi dengan jelas dalam aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi dan sebagainya.

- c. Humanis. Ekonomi Islam bersifat Ilahiyah di satu sisi dan juga humanis di sisi lain. Sisi humanis ekonomi Islam dapat dilihat dari serangkaian nilai yang mendasari ekonomi Islam itu sendiri seperti kebebasan, keadilan, persaudaraan, kerjasama, hak individu, kehormatan dan sebagainya dalam bahasa tauhidnya yaitu *tauhid rabbaniyah*.
- d. Moderat dan seimbang. Semangat ekonomi Islam adalah kesederhanaan dan keseimbangan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa ekonomi Islam memediasi sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan sosial. Kepentingan individu kalau terlalu diprioritaskan akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan dan keserakahan, sementara kalau kepentingan sosial dengan meonjolkan kesetaraan akan menimbulkan kemalasan dan produktivitas.

2. Tujuan dan Kegunaan Ekonomi Islam

Ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai *maslahah*. Manusia diberi akal agar dapat digunakan untuk menciptakan masalah (*maslahah creation*). Dimensi penciptaan masalah ini lebih luas bila dibandingkan dengan tujuan ekonomi yang dipahami dalam teori ekonomi konvensional. Dimensi masalah tersebut antara lain: (1) apa yang akan diproduksi, (2) bagaimana cara memproduksinya, (3) bagaimana cara mendistribusikannya, (4) bagaimana menggunakannya (pemanfaatan dengan cara yang benar) dan (5) bagaimana mempertahankannya (menjaga dan melestarikannya).²³

Maslahah tidak dapat dicapai hanya dengan memenuhi kebutuhan lewat pemanfaatan semata, tapi harus memperhi-

²³Dikutip dari kuliah yang disampaikan oleh Bapak Drs. Munrokhim Misanam, *Ekonomi Makro Islam: The Essence of Islamic Economics – Maslahah Creation*, Sabtu 21 September 2013.

tungkan barakah dari manfaat yang diperoleh. Jika sesuatu yang dimanfaatkan itu tidak mengandung barakah – yang diukur berdasarkan nilai-nilai agama – maka tidak bisa mencapai masalah, yang barangkali akan terjadi justru kerusakan.²⁴

Adapun prinsip umum atau pedoman mencapai barakah antara lain: (1) tidak bersifat ilegal atau haram, (2) prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat, (3) kemakmuran yang berkeadilan, (4) prinsip tidak saling menzalimi dan (5) prinsip keseimbangan dan kesederhanaan.²⁵

Islam merupakan agama yang universal. Sebagai bagian dari keuniversalan Islam, ekonomi dalam Islam ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. Menurut Sa'ud sebagaimana yang dikutip oleh Mohamad dan Shahwan, ada tiga konsep dasar ekonomi yang secara tidak langsung berhubungan dengan tujuan ekonomi dalam Islam. Konsep pertama adalah manusia dan makhluk lain diciptakan Allah terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Bagi manusia, kedua unsur tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan biologis, sekaligus untuk tugas penghambaan kepada Allah. Konsep kedua adalah pengesaan Allah yang mana berisi keyakinan bahwa semua kehidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup ditujukan untuk memperoleh rahmat-Nya. Ketiga, integrasi beragam sistem kehidupan dalam Islam.²⁶

Tujuan ekonomi Islam secara filosofis menurut Ahmed sebagaimana dikutip Mohamad dan Shahwan. Menurutnya, ekonomi dalam Islam memiliki empat tujuan yaitu *khilafah*, *tauhid*, *rububiyah* dan *tazkiyah*. Khilafah berhubungan dengan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi, sebagai khalifah manusia yang melakukan ekonomi untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya baik untuk diproduksi, didistribusi

²⁴ Dikutip dari kuliah yang disampaikan oleh Bapak Munrokhim Misanam, *Ekonomi Makro Islam: The Essence of Islamic Economics – Falah, Ibadah and Maslahah Maximization*, Sabtu 16 November 2013.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat.....*, hlm. 186-195.

²⁶ Mohamad dan Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Shari'ah: a Critical Review," *Middle East Journal of Scientific Research* 13, 2013, hlm. 76.

atau dikonsumsi. *Tauhid* terkait dengan pengakuan manusia terhadap keesaan Allah, *rububiyah* sebagai sebuah kesadaran bahwa Allah adalah pemberi sekaligus penjamin segala ciptaan dan *tazkiyah* berhubungan dengan penyucian jiwa manusia dalam hubungannya dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Semua kegiatan ekonomi harus diniatkan pada penyucian jiwa, sebab kalau kita tidak melakukan pemenuhan kebutuhan jasmani yang inheren dengan materi maka ada kemungkinan kita melakukan kegiatan ekonomi yang terlarang seperti pencurian, penipuan dan lain-lain, mengakibatkan kepada hal yang dapat merusak kejiwaan seorang hamba.²⁷

Menurut Ghazali, sebuah aktivitas ekonomi harus didasarkan pada tujuan kebahagiaan hidup akhirat. Aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi manusia karena beberapa alasan: 1) perilaku ekonomi itu sendiri bukanlah bagian yang dapat dipisahkan dari ajaran dan juga prinsip-prinsip Islam, 2) Allah telah menciptakan sumber daya (alam dan se-isinya) secara melimpah agar dieksplor oleh manusia dengan tujuan kelangsungan hidupnya sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dan 3) kuat secara ekonomi akan memberikan kehidupan yang bebas dan terlepas dari ketergantungan, mampu menjalankan perintah agama seperti zakat, infak, sadaqah dan haji.²⁸

Menurut Mufid, ekonomi Islam memiliki beberapa fungsi yaitu realisasi pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, rancangan pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan bebas dari penyelewengan dan terwujudnya kesatuan ekonomi bagi dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik. Adapun tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷Mohamad dan Shahwan, "The Objective of Islamic Economic.....", hlm. 76.

²⁸Irijanto, dkk., "The Thoughts of Economic Growth Theories of Classical Muslim Scholars: A Contribution," *Trikonomika*, Vol.12, No.2, Desember 2013, hlm. 171.

²⁹Mufid, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, (Ebook, 2017), hal. 28-29.

1. Membumikan syari'at Islam dalam sistem ekonomi secara kaffah.
2. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem kapitalisme dan keterbelakangan ekonomi.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas ekonomi serta menyelamatkan moral umat Islam dari paham materialisme dan hedonisme.
4. Menegakkan bangunan ekonomi yang dapat mewujudkan persatuan dan solidaritas umat Islam.
5. Mencapai falah, yaitu kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sementara itu, menurut Asy'arie, tujuan ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tujuan teologis, kosmologis dan antropologis.³⁰ Secara teologis, tujuan ekonomi Islam adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan dalam bentuk penggalan potensi ekonomi yang ada pada semua ciptaan Tuhan. Penggalan dan pengembangan potensi tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran pada sumber daya alam dan tidak pula untuk tujuan yang sempit sebatas memperkaya diri pribadi, melainkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umum serta menciptakan kondisi yang aman bagi generasi penerus.

Kegiatan ekonomi berlangsung dalam ruang lingkup kosmik sehingga manusia bertanggungjawab memelihara dan melakukan perbuatan baik dalam ruang kosmik yang mana manusia tidak pernah terlibat dalam penciptaannya, bahkan manusia adalah bagian dari kosmik itu sendiri. Ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan dalam keseimbangan kosmik yang terjaga.

Selain itu, kegiatan ekonomi berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, bekerja sama dan saling bergantung. Realitas tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi Islam harus melibatkan orang lain sebagai

³⁰Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LESFI, 2015), hal. 152.

subyek ekonomi yang di dalamnya mempunyai hak dan tanggung jawab.

B. Kesatuan Aspek Hukum, Etika dan Tauhid dalam Ekonomi Islam

1. Tauhid dan Etika dalam Ekonomi Islam

Menurut M. Abduh, Tauhid adalah pengesaan Tuhan, sebuah keyakinan bahwa Allah itu satu, tidak ada tandingan-Nya dalam dzat dan juga perbuatan-Nya.³¹ Sementara itu, Ghazali memandang Tauhid sebagai sebuah permata indah yang memiliki dua kulit. Dua kulit tersebut adalah pengucapan *laa ilaaha illa-Allah* dan penguatan di dalam hati agar tidak terjadi pengingkaran terhadap ucapan tersebut. Sementara isi yang ada di dalam ke dua kulit tersebut adalah penyembahan yang menyendiri terhadap Allah SWT.³² Sebagai pembenaran tentang keesaan Allah, tauhid merupakan dasar agama Islam yang mengajarkan bahwa Allah merupakan fondasi (dasar) dan awal mula segala sesuatu yang bersifat Islami.³³

Tauhid adalah esensi pengalaman beragama dalam Islam. Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan menghilangkan semua keraguan tentang transendensi dan keesaan-Nya. Konsekuensi logis dari pengakuan tersebut adalah menjadikan Allah sebagai tujuan akhir untuk semua kehendak. Allah adalah nilai mutlak dan satu-satunya nilai yang berlaku dalam hidup manusia. Selain dari Allah, segalanya hanyalah instrumen yang memiliki nilai ketika Allah menghendaki. Ketika Allah menjadi tujuan akhir dari segala kehendak, maka manusia hanyalah hamba yang ditakdirkan untuk melayani dan memenuhi kehendak-Nya dengan merealisasikan nilai-nilai yang Ia ajarkan kepada manusia dalam semua aspek kehidupan. Dengan kesadaran akan keesaan Tuhan dan penghambaan diri sepenuhnya hanya kepada-Nya, Tauhid mem-

³¹Abduh, *Risalah Tauhid*, terj. Firdaus, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 34 & 193

³²Lihat al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, terj. Moh. Zuhri, dkk., (Semarang: CV Asy Syifa, 2003), jil. 1, hlm. 102.

³³Murata dan Chittick, *Trilogi Islam: Islam, Iman dan Ihsan*, terj. Ghufron A., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 14-15.

bawa manusia pada tindakan etis yang mana segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik dan buruknya atau layak dan tidak layaknya dapat ditentukan lewat keberhasilan pencapaian subjek moral di tengah berbagai tantangan kapan saja dimana saja, baik yang datang dari dalam dirinya sendiri ataupun yang datang dari lingkungan sekitarnya.³⁴

Kepercayaan atau keyakinan agama dapat mempengaruhi perilaku penganutnya secara luas termasuk aktivitas ekonomi pada taraf individu, kelompok dan bahkan negara. Menurut Adam Smith, sebagaimana dikutip oleh Noland, terdapat keuntungan bagi ekonomi ketika ia dipengaruhi oleh agama. Keuntungan tersebut adalah indikasi reputasi bagi golongan kaya ketika ia mampu membantu yang miskin dan golongan kaya dapat menyediakan ekstralegal yang membentuk dan mendukung aktivitas mereka dalam transaksi internal, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi.³⁵

Dalam ajaran Kristen, berbicara tentang teologi ekonomi, maka teologi berfungsi untuk memberikan orientasi pada persoalan ekonomi, merefleksikannya dan memberikan kritik ketika memang harus diberikan kritik. Dalam konteks ini, teologi memberikan kerangka etika pada aktivitas ekonomi, kritik dan identifikasi kelemahan-kelemahan praktik ekonomi, melatih individu sekaligus di bidang ekonomi, teologi dan mampu menghubungkan keduanya, memberikan dorongan untuk dunia akademis agar lebih respek terhadap wacana teologi.³⁶ Seorang yang beriman akan percaya bahwa aktivitas ekonomi akan membawa seseorang menuju jalan surga di bumi karena ekonomi merupakan studi yang menyediakan pengetahuan saintifik yang akurat tentang hukum pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.³⁷

³⁴Al-Faruqi, *al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 161 & 163.

³⁵Noland, "Religion and Economic Growth," *World Development*, Vol.3, No.8, 2005, hlm. 1215.

³⁶Oslington, "A Theological Economics," *www.case.edu.au*, akses 29 Mei 2015, hlm. 12-13.

³⁷Nelson, "What is Economic Theology?" *The Princeton Seminary Bulletin*, Vol.XXV, No.1, 2004, hlm. 60-61.

Dalam Islam, ekonomi merupakan salah satu esensi dari Islam itu sendiri. Aktivitas ekonomi merupakan spiritualitas Islam dengan menjadikan Tauhid sebagai basisnya. Dalam pandangan Islam, materi dan spiritual saling berhubungan sehingga perubahan spiritual akan berdampak nyata pada materi. Islam mengakui bahwa manusia adalah *homoeconomicus* hanya saja dalam kerangka bahwa manusia bebas mengatur hidupnya dengan pola ekonomi apapun dengan tuntunan moral sehingga bertanggung jawab pada dirinya sendiri, lingkungan dan masyarakat. Semua manusia sama dan tidak dibenarkan melakukan diskriminasi. Konsep ini kemudian melahirkan dua prinsip utama sistem ekonomi yaitu tidak dibenarkan eksploitasi dan memisahkan serta mengisolasi diri dari yang lain baik dalam kondisi pribadi yang menguntungkan ataupun dalam kondisi merugi.³⁸

Dalam sudut pandang Islam, etika dikenal dalam sejumlah istilah Arab seperti *ma'ruf* (yang diterima), *khayr* (kebaikan), *haq* (kebenaran), *birr* (kebaikan, kebenaran), *qist* (ekualitas), *'adl* (keadilan), *taqwa* (ketakwaan) dan yang paling umum digunakan adalah kata *akhlak*. Etika, baik dalam sudut pandang umum ataupun dalam pandangan Islam merupakan apa yang dianggap benar dan salah dan lebih ditekankan lagi pada bagaimana mengetahui yang benar dan yang salah tersebut. Cara untuk mengetahui yang baik dan benar tersebut kemudian dikenal dengan teori etika seperti teori relativisme, teori perintah Ilahi, teori konsekuensi, teori egoisme, utilitarianisme, deontologi dan Islam yang memandang etika berbasis pada dua sumber utama agama Islam yaitu Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, etika kemudian dipahami sebagai serangkaian prinsip dan nilai kebaikan yang bersumber pada Qur'an dan Hadis.³⁹

³⁸Faruqi, *al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life,.....*, hlm. 157-158 & 169-171.

³⁹Al-Aidaros, dkk., "Ethics and Ethical Theories from an Islamic Perspective," *International Journal of Islamic Thought*, Vol.4, Desember 2013, hlm. 2-8.

Etika bersumber dari ajaran agama. Dalam konsep filsafat, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang memiliki tiga komponen, yaitu:⁴⁰

- 1) Meta-etika yang membahas sumber-sumber dan makna terma-terma etika.
- 2) Etika normatif yang melakukan tugas praktis untuk menguji standar moral yang mengatur perilaku baik dan salah.
- 3) Etika terapan yang mengkaji beragam kontroversi seperti aborsi, perang nuklir, hak-hak binatang, masalah lingkungan dan sebagainya. Berdasarkan etika normatif, kehidupan beretika didasarkan pada ajaran-ajaran agama.

Etika normatif, dalam Islam, berasal dari sumber utama al-Qur'an dan Sunnah yang memberikan banyak aturan yang berkaitan dengan hukum dan moralitas manusia yang sifatnya universal dan abadi. Al-Qur'an bahkan berisi jawaban-jawaban untuk sejumlah persoalan umum yang berhubungan dengan etika.⁴¹ Menurut Hasyi, dalam Islam, Qur'an merupakan fondasi dari konsep dan standar-standar etika. Sementara itu, Sunnah mengandung praktik-praktik aktual dari konsep etika yang ada dalam Qur'an.⁴²

Implementasi etika Islam atau akhlak yang mulia merupakan perintah pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis Nabi menyebutkan dengan jelas dan tegas pentingnya akhlak yang mulia. *"Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* (HR. Bukhari).⁴³

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa tujuan beliau diutus adalah untuk menyempurnakan moral

⁴⁰ Gripaldo, "Religion, Ethics and the Meaning of Life," *Kemanusiaan*, 15, 2008, hlm. 34.

⁴¹ Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), hlm. 15.

⁴² Hashi, "Islamic Ethics: an Outline of Its Principles and Scope," *Revelation and Science*, Vol.01, No.03, 2011, hlm. 124.

⁴³ Rafiki dan Wahab, "Islamic Values and Principles in the Organization: a Review of Literature," *Asian Social Science*, Vol.10, No.9, 2014, hlm. 2.

yang baik. Ketika Nabi diutus sebagai penata sekaligus penyempurna nilai-nilai moral yang lebih baik yang telah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, maka Islam sebagai agama bertujuan untuk menegakkan dan menyempurnakan nilai-nilai universal perilaku manusia. Oleh karena itu, agama Islam secara menyeluruh bertujuan untuk menjalankan moral yang baik (*akhlakul karimah*). Ketika akhlak mulia yang menjadi sasaran maka wajarlah jika menurut Nabi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang berakhlak baik dan juga muslim terbaik adalah mereka yang berakhlak mulia.⁴⁴

2. Hukum, Etika dan Tauhid yang Menjelma dalam Ekonomi Islam

Akar ekonomi Islam harusnya adalah fiqh. Ekonomi Islam sebagai disiplin yang berbeda bisa dijustifikasi jika kita bisa memperlihatkan literatur fiqh sebagai kodifikasi hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah membawa kita pada pemahaman yang berbeda tentang perilaku ekonomi manusia.⁴⁵

Lebih lanjut, fondasi ekonomi Islam berpijak pada tujuan syari'ah atau hukum Islam yaitu *maslahah*. *Maslahah* yang dimaksud adalah memelihara jiwa, harta, agama, akal dan keturunan.⁴⁶ Implikasi dari tujuan syari'ah ini dalam ekonomi Islam adalah untuk menentukan sebuah aktivitas ekonomi layak dilakukan atau tidak. Jika aktivitas ekonomi tidak memberi manfaat dan *maslahah* sebagaimana tertuang dalam tujuan syari'ah, maka aktivitas tersebut tidak boleh dilakukan.⁴⁷

Hukum Islam atau biasa juga disebut dengan kaidah fiqh menjadi signifikan dalam ekonomi Islam karena fiqh diperlukan

⁴⁴Hashi, "Islamic Ethics.....", hlm. 125-126.

⁴⁵Khan, "Fiqh Foundations of the Theory of Islamic Economics: a Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Relevant Subjects of Fiqh," dalam Ahmed, *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, (Jeddah: King Fahd National Library Catalog, 2002), hlm. 62.

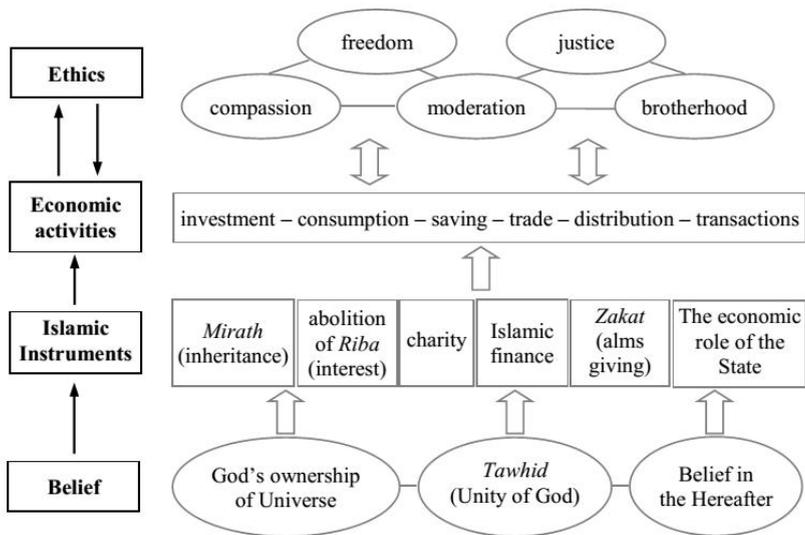
⁴⁶Khan, "Fiqh Foundations s.....", hlm. 63-64.

⁴⁷Khan, "Fiqh Foundations.....", hlm. 65.

untuk mempelajari provisi legal dan doktrinal perilaku etis beragama transaksi dan aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia.⁴⁸

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam ditujukan untuk menuntun, mengarahkan dan mengendalikan perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Perilaku dan transaksi ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari etika dan nilai-nilai sehingga etika menjadi dasar pembentukan fondasi ekonomi Islam.⁴⁹ Etika merupakan komponen endogen ekonomi Islam yang mewakili pilar-pilar fundamental yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam bersandar pada ajaran agama yang membentuk struktur etika permanen. Sehingga tidak salah jika ekonomi Islam sering juga dipandang sebagai sistem ekonomi etis.⁵⁰

Keterkaitan antara tauhid, hukum Islam dan etika dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat dilihat dari bagan berikut:⁵¹



Sumber: Boutayeba, dkk.

⁴⁸Mustafa, dkk., "Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah," *SAGE Open*, Oktober-Desember 2016, hlm. 3

⁴⁹Boutayeba, dkk., "Ethics in Islamic Economics.....", hlm. 111.

⁵⁰Boutayeba, dkk., "Ethics in Islamic Economics.....", hlm. 116.

⁵¹Boutayeba, dkk., "Ethics in Islamic Economics.....", hlm. 116.

Boutayeba, dkk., melalui bagan di atas ingin menjelaskan aktivitas ekonomi Islam yang didasari oleh etika (nilai-nilai) yang bertitik tolak dari keyakinan terhadap keesaan Allah (tauhid). Aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat berupa investasi, konsumsi, tabungan, perdagangan, distribusi dan beragam transaksi lainnya. Transaksi-transaksi tersebut didasari dengan nilai-nilai kebebasan, keadilan, persaudaraan, kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama.

BAB VI

BEBERAPA CONTOH KASUS LETAK TITIK BEDA DALAM NILAI-NILAI FILOSOFIS EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL

A. Sumber Daya Alam Antara 3 Mazhab Ekonomi Islam dan Mazhab Konvensional

Perbedaan-perbedaan yang diametral antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dengan paradigma yang mendasari ekonomi Islam. Keduanya tidak mungkin dan tidak akan pernah dapat dikompromikan, karena masing-masing didasarkan atas pandangan dunia (*weltanschauung*) yang berbeda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler (berorientasi hanya pada kehidupan duniawi) dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun berpikirnya.¹ Karena itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai (positivistik). Sementara itu, ekonomi Islam dibangun (diwarnai) oleh prinsip-prinsip religius (berorientasi pada kehidupan dunia, sekaligus kehidupan akhirat).²

Tujuan ekonomi Islam, menurut M. Umer Chapra, sejalan dengan tujuan pokok Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik dan kedamaian mental demi mencapai kebahagiaan (*al-falah*), yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara

¹Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.153

²Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Oleh Didin Hafifuddin, (Jakarta; Robbani Press, 2004), h. 75

kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu.³ Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia, dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata.⁴

Dalam tataran paradigma seperti diatas, para ekonomi muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Sampai saat ini, pemikiran para ekonomi Muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi tiga madzhab Ekonomi Islam yang akan dihadapkan dengan mazhab konvensional dalam melihat sumber daya alam, sebagaimana akan dijelaskan berikut:

A.1. Madzhab Baqir al-Sadr atau Iqtisaduna

Iqtishaduna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Iqtishad* dan *na*. *Iqtishad* berasal dari kata *qashd* yang berarti keadaan sama seimbang atau pertengahan. *Iqtishaduna* berarti “ekonomi kita”. Mazhab *Iqtishaduna* berusaha menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan didedukasikan dari Al-Qur’an dan Sunnah.⁵

Madzhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal *Iqtishadunâ* (Ekonomi Kita). Madzhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah

³Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss,2005) hal.,93

⁴M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta:Tazkia Institut dan GIP, 2000), hlm. 7-8

⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hal.13. Menurut mazhab ini penggunaan kata ekonomi Islam sangat salah dan menysatkan dan berakibat akan menyeret kesalahan atas nama agama, namun mereka menawarkan istilah “*iqtishad*” yang berasal dari bahasa arab *al-Qasd*” yang berarti pertengahan, keseimbangan dan keadilan. (Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal.30).

dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.⁶

Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Madzhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah QS. al-Qamar (54): 49: *“Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.”* Dengan demikian, karena segala sesuatu telah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini.⁷

Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Suatu contoh adalah manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkisimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.

Madzhab ini juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi

⁶Muhamad Iswandi, “Ekonomi Islam: kajian Konsep dan Model Pendekatan”, *Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, h. 51 dan lihat Fadhlán, *Jurnal Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam dalam Merespon Sistem Ekonomi konvensional*, Vol.7, No.1 Juni 2012, hal.168-170

⁷Euis Amalia, “Kesesuaian Pembelajaran ekonomi islam di PT dengan kebutuhan SDM pada Industri keuangan Syariah di Indonesia” *Jurnal Inferensi (STAIN Salatiga)*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013.

sangat kaya. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber manusia yang terbatas. Tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.⁸

Istilah “ekonomi Islami” adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif, karena itu penggunaan istilah “ekonomi Islami” harus dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni *Iqtishâd*. Menurut mereka, *iqtishâd* bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishâd* berasal dari bahasa Arab *qasd* yang secara harfiah berarti “*equilibrium*” atau “keadaan sama, seimbang atau pertengahan”.⁹ Disandarkannya kata *Iqtisad* (ekonomi) terhadap kata “Na” yang berarti kita, ini mengindikasikan bahwa kesederhanaan, *equilibrium*, seimbang dan pertengahan (*iqtisad*) dikondisikan pada keadaan dan situasinya sebagai hail dari ilmu (science) yang selalu berubah-ubah.

A.2. Madzhab Mainstream

Madzhab mainstream berbeda pendapat dengan madzhab Baqir. Madzhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras diseluruh dunia berada pada titik *equilibrium*. Namun, jika kita berbicara sumberdaya, bahkan ini sering terjadi. Ini sesuai dengan firman Allah dala QS.Al-Baqarah:155 yang artinya:

“Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar”.

⁸al-Hasani, “*The Concept of Iqtishad*”, hlm. 21-22

⁹Fadhlan, “*Jurnal Paradigma Madzhab-madzhab Ekonomi Islam...,*”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol.7 N0.1 Juni 2012, hal.169

Sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah.¹⁰ Ini merujuk pada firman Allah dal QS. Al-Takasur:1-5 yang artinya:

“ Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu”.

Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas *versus* keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai kepadayang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa al-Qur'an disebut: “pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya”. Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya – termasuk ekonomi – selalu dipandu oleh Allah lewat al-Qur'an dan al-Sunnah.¹¹

Diantara tokoh madzhab itu adalah M.Umar Chapra, yang mengatkan bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari seratus tahun terakhir. Mengadopsi hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non muslim sama sekali tidak dilarang oleh agama. Nabi bersabda bahwa hikmah/ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang.dimana

¹⁰Lihat Fadlan, “Paradigma Mazhab-Mazhab Ekonomi Islam Dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol 7, No. 1, Juni 2012. hlm. 157-175

¹¹M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970), hlm. 3-4

saja ditemukan, maka umat Muslimah yang paling berhak mengambilnya. Catatan sejarah umat Muslim memperkuat hal ini, para ulama dan Ilmuan Muslim banyak mengadopsi dan peradaban lama. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi transformasi ilmu dengan diterangi cahaya Islam,¹² meminjam istilah Naquib Al-Atlas, Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

A.3. Madzhab Alternatif Kritis

Madzhab ini mengkritik kedua madzhab sebelumnya. Madzhab Baqir dikritik sebagai madzhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantikannya dengan teori yang baru. Sementara madzhab Mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari teori ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Madzhab ini adalah sebuah madzhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-qur'an dan al-sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.

Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi ke dalam tiga mazhab di atas, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tawhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintahan) dan *ma'âd* (hasil). Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk

¹²Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm.50

menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.¹³

Namun demikian, teori yang kuat dan baik tanpa diaplikasikan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership, freedom to act dan social justice*. Di atas semua dinilai dan prinsip inilah dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi sentral, karena akhlak inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwan para Nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi paduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan segala aktifitas.¹⁴

A.4. Mazhab Konvensional

Mazhab ini menyatakan bahwa sumber daya alam di dunia sangatlah terbatas dan kebutuhan manusia tidak ada batasnya. disini pula letak masalah ekonomi timbul manusia dengan kebutuhan tidak terbatas sementara sumber daya alam terbatas. Dalam pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini bisa diibaratkan pertumbuhan penduduk seperti deret hitung dua, enam, empat, enam belas dan seterusnya yang merupakan luncatan yang tidak terduga dan bombastis. Sementara perkembangan sumber daya alam seperti deker ukur yaitu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang merupakan hitungan dengan teratur dan lambat. sumber daya alam merupakan kekayaan bumi, baik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia,

¹³Sohrah, "Prinsip Ekonomi dalam Islam", *Jurnal al-Qada-U: Peradilan dan hukum keluarga Islam*, Vol.1, No. 2, 2014.

¹⁴Mubyanto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta; LP3ES, 1998), h. 20-21

oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan alam tersebut. Dalam titik ini nampaknya ada kesamaan dengan ekonomi Islam.

Simpulnya Mazhab Ekonomi dalam Islam mengakui bahwa sumber daya alam tidak terbatas, walaupun mazhab mainstream memberikan beberapa catatan, namun mazhab *Iqtisaduna* melihat sumber daya alam tidak terbatas sangat kontradiktif dengan cara pandang ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa sumber daya alam sangat terbatas. Sementara di sisi lain, mazhab *iqtisaduna* memberikan penilaian bahwa masalah ekonomi timbul bukan karena sumber alam terbatas namun karena keserakahan manusia dalam mememnuhi kebutuhannya sehingga timbul penindasan satu sama lain dan ketimpangan sosial ekonomi. Sementara dalam mazhab konvensional masalah ekonomi timbul karena sumber alam terbatas dan kebutuhan manusia tidak terbatas, yang berakibat manusia antara satu dan yang lainnya saling berebut pada sumber alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya dan kadang hal ini antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling menindas.

Perbedaan cara pandang masalah sumber daya alam tersebut antara mazhab ekonomi Islam (*iqtisaduna*) dan Konvensional memberikan kesan terhadap *tawhid*, yakni keyakinan terhadap maksud baik Tuhan dalam penciptaan manusia dan alamnya (sumber daya alam). Terutama mazhab konvensional yang menyatakan sumber alam terbatas dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Mazhab *Iqtisaduna* merasa heran, mana mungkin Tuhan sebagai zat Maha Pengasih dan maha Penyayang menciptakan sumber daya alam terbatas sementara Tuhan pula menciptakan manusia dan kebutuhannya tidak terbatas, sangat kontraproduktif dan ketidakadaan tanggungjawab Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam raya. Tentu menurut Islam ini sangat bertentangan dengan

ayat al-Quran (QS. Hud:6) yang menyatakan bahwa "...Tidaklah makhluk yang bergerak (dabbah) yang ada di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah yang akan memberikan rizkinya...". Karena teori mazhab konvensional itu tidak masuk akal dan bertentangan dengan doktrin alQur'an maka dengan sendirinya teori terbantahkan dan harus dibuang jauh-jauh. Sebab bila tidak dienyahkan yang ada hanya akan menghasilkan teori-teori ekonomi yang hedonistik, penindasan, kezaliman terhadap yang lemah dan lain-lain.

B. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Konsep pembangunan ekonomi Islami adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingannya antara pendapatan dengan total jumlah penduduk. Hal ini merupakan proses dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan berkelanjutan. Biasanya dihitung dalam istilah *perkapita* dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Substansinya terletak pada kemungkinannya manusia untuk mengendalikan lingkungan ekonominya sekaligus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Dalam pembangunan islami jika pendapatan secara akumulatif dianggap baik dan memuaskan namun terdapat ketimpangan bahkan hanya segelintir orang yang menguasai ekonomi. Keadaan seperti ini harus diantisipasi dan dihindari karena tujuan dari pembangunan adalah pemerataan pendapatan bukan pembangunan secara nasional yang sejahtera dalam tekst-tekst namun faktanya adanya ketimpangan dan kesenjangan..

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun persoalan pembangunan umat manusia menempatkan di posisi yang lebih penting. tujuannya adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi

harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Pembangunan hanya mengfokuskan pada sisi fisik bukan sumber daya akan mengakibatkan kekeringan spiritual yang berdampak ketidakbahagiaan dunia akhirat yang disebut dengan *al-falah*.

Berbeda dengan tujuan pembangunan ekonomi islami, pembangunan konvensional difokuskan kepada pendapatan nasional dan mengfokuskan pembangunan kepada pembangunan ekonomi secara fisik. Fokus Pendapatan nasional tanpa melihat pendapatan perkapita yang merata hanya akan menutupi kesenjangan antar individu (perkapita) sehingga menutupi persoalan ekonomi yang mendasar. Sementara pembangunan fisik tanpa melihat pembangunan umat manusia terutama dari sisi spiritualnya akan menghasilkan pelaku ekonomo-ekonom yang melanggar etika dan norma yang sering mengorbankan pelaku-pelaku ekonomi yang lemah dan orang-orang yang tidak mempunyai akses informasi. Sementara dalam Islam segala bentuk penindasan dan sifat merugikan orang lain harus dihindari. Orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan individunya bukan mementingkan kepentingan publik mengakibatkan pelaku-pelaku ekonomi yang tidak jujur dan serakah.¹⁵ Asal sifat manusia yang *homoeconomicus* yang mementingkan egonya dan kepentingan diri sendiri harus dikendalikan dengan aturan-aturan dan norma yang mengembalikannya pada fitranya, oleh karenanya Islam datang memberikan tuntunan dan arahan supaya manusia terbimbing kepada jalan yang semestinya.

C. Konsep Keberhasilan Hidup

Mencari kemajuan dalam ekonomi menurut Islam tidaklah dilarang, banyak jalan untuk menempuh seseorang untuk dikatakan menjadi orang maju, salah satunya adalah mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Menurut Nejatullah keberhasilan sangat erat

¹⁵Adiwarman karim, *Ekonomi Islam; Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h. 165.

kaitannya dengan kebaikan. Semakin baik (al-ihsan) seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain maka semakin berhasil pula dia dalam menempuh jalan hidupnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Nejatullah Siddiqi;

“Keberhasilan erat kaitannya dengan kebaikan, perilaku seseorang yang sesuai moral dan norma semakin tinggi kebaikannya maka semakin tinggi keberhasilannya selama hidupnya, ...selama usaha kebaikannya itu sesuai dengan nilai-nilai moral”¹⁶

Salah satu alat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain adalah materi, walaupun materi tidak selamanya untuk berbuat baik. Kebaikan bisa dalam bentuk tenaga, waktu luang, bahkan senyuman. Nabi bersabda:

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة... رواه الترمذي....

Artinya: “senyuman-mu kepada saudaramu adalah sadaqoh”

Islam tidak melarang kemajuan dalam usaha-usaha meraih materi. Kepemilikan materi adalah sebagai standar dan kondisi yang tidak dapat ditawar-tawar bagi perkembangan sosial yang diinginkan. Materi juga dapat mendorong setiap individu untuk melakukan semua upaya untuk mendapatkannya.

Berbeda dalam mazhab konvensional, keberhasilan diukur dengan seberapa banyak kepemilikan materi. Seberapa besar anda menguasai materi berarti sebesar itu pula keberhasilan yang kita capai. Seseorang yang memiliki satu rumah lebih berhasil dari seseorang yang tidak memiliki rumah. Seseorang yang memiliki dua rumah lebih berhasil dari pada seseorang yang memiliki satu rumah dan begitu seterusnya.

Berbeda dengan Islam, seseorang melakukan satu kebaikan lebih dianggap berhasil dari pada seseorang yang tidak melakukan kebaikan, walaupun yang melakukan kebaikan itu tidak memiliki rumah sementara yang menerima kebaikan mempunyai satu rumah

¹⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Terj. Anas Basri, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1995), h. 30-45.

bahkan beberapa rumah tidak dianggap lebih baik daripada seorang yang melakukan kebaikan kepadanya.

Memeang Islam tidak melarang untuk memiliki rumah sebagai simbol keberhasilan dalam sisi materi, namun untuk apa memiliki rumah sementara dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain; Nabi bersabda:

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling mendatangkan manfaat kepada manusia lainnya..".

Bahkan orang yang mempunyai materi, namun dia tidak melakukan kebaikan dia dianggap orang yang paling merugi di dunia dan akhirat. Kenapa disebut demikian karena orang tersebut tidak dianggap berhasil dalam mengarungi kehidupan walaupun materinya berlimpah.

D. Tujuan Utama Aktivitas ekonomi

Dalam Islam, selain mencari kebutuhan hidup secara materi, namun tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah mencari ridha Allah dan pahalanya. Seseorang yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di samping sebagai kewajiban, seorang suami misalnya dalam memenuhi kebutuhan untuk menafkahi anak isterinya, namun yang terpenting juga adalah mencari ridha dan pahalanya, sehingga walaupun nanti seseorang -dalam prosesnya- tidak berhasil, dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah swt. Hasil walaupun penting namun tidak terlalu penting, karena meneurut Islam, yang paling penting adalah mencari nafkah dan keridhaan Allah swt.

Berbeda dengan ekonomi Konvensional, tujuan utamanya dari aktivitas ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi, sehingga ketika dia berusaha namun tidak menghasilkan materi yang diinginkan atau tidak tercapainya target yang diinginkan maka dia belum bisa dikatakan terpenuhi kebutuhan ekonomi secara hakaiki. Jika tidak berhasil dalam memenuhi materi

dia dianggap gagal dan tidak berhasil pahala pun tidak dapat karena semua kegiatan ekonomi bersumber dari paradigma materi.

E. Uang Berbasis Komoditi (Emas dan Perak)

Bahasan tema ini agak luas dan panjang, maka sebelum diuraikan tentang bahasan kasus uang berbasis komoditi terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan di antaranya;

“Apa dan bagaimana Nilai-nilai Filosofis yang terkandung dalam Ekonomi Islam terkait pembelian emas secara tangguh menggunakan uang kertas dari sudut pandang emas yang bisa dikategorikan sebagai mata uang maupun komoditi?”

Pertanyaan diatas muncul terkait fenomena di tengah masyarakat terkait pembelian emas menggunakan uang kertas secara tangguh dengan banyaknya produk lembaga keuangan syariah untuk pembelian emas secara angsuran tersebut. Padahal emas disamping sebagai komoditi juga bisa dikategorikan sebagai mata uang sehingga pembelian emas dengan uang kertas bisa masuk pertukaran barang ribawi.

Untuk menjelaskan permasalahan ini, kami sampaikan terlebih dahulu secara ringkas pembagian riba. Secara garis besar, riba yang diharamkan dalam Islam dikelompokkan menjadi dua macam ¹⁷:

- a. *Riba Nasi'ah*; yang dikenal masyarakat Arab pada zaman jahiliah. Yaitu tambahan yang dipungut sebagai akibat penundaan pembayaran utang. Baik utang itu berupa pembayaran barang dagangan atau pembayaran pinjaman.
- b. *Riba Buyu'* (jual beli) yang terdapat dalam 6 jenis barang. Yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam. Inilah yang disebut dengan istilah Riba Fadhl. Riba ini diharamkan sebagai tindakan pencegahan terhadap praktek riba nasi'ah. Misalnya seseorang menjual emas dengan berat tertentu untuk dibayar

¹⁷ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. IV, hlm. 671.

pada waktu tertentu, kemudian dibayar dengan emas pula dengan berat melebihi ukuran sebagai tambahan.

Riba *fadh*l dapat diberi definisi sebagai jual ribawi yang disertai adanya kelebihan atau penambahan pada salah satu barang yang ditukar. Pada dasarnya, penetapan barang ribawi bersumber dari hadis Nabi Saw sebagai sumber rujukan utama dalam penetapan hukum di samping Al-Quran. Diantara hadis yang sangat populer membahas tentang barang ribawi dan mekanisme transaksi adalah:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sepadan dan tunai. Maka siapa saja yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Yang mengambil dan pemberi sama saja.” (HR. Bukhori, Ahmad dan Muslim)

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sepadan dan tunai. Dan jika (transaksi) terjadi pada kelompok yang berbeda, maka juallah sekehendakmu jika memang (dilakukan) secara tunai.” (HR. Ahmad dan Muslim)

Dalam hadis tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu: emas, perak, gandum, jagung,, kurma dan garam.

Namun, apabila dilihat *'illat* dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi ada dua macam, yaitu: pertama, barang-barang yang biasa diatakar (*makilat*) dan barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*).

Dengan demikian, semua jenis barang yang bisa ditimbang dan diatakar termasuk dalam kelompok ribawi, apapun jenisnya seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya.

Dilihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi, ada dua macam: *pertama*, kelompok mata uang (*nuqud*), yaitu emas dan perak dan *kedua*, kelompok makanan, yaitu gandum, jagung, kurma dan garam.

Dari sini dapat difahami bahwa *'illat* diharamkannya riba dalam emas dan perak adalah karena keduanya merupakan mata uang/alat pembayaran. Sedangkan kelompok kedua karena barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan manusia. Dengan demikian mata uang lain selain emas dan perak hukumnya sama dengan emas dan perak. Jenis makanan lain hukumnya sama dengan gandum, kurma, jagung dan garam.

Oleh karena itu, berdasarkan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jika dua barang yang dipertukarkan *'illat* dan jenisnya sama, maka harus sama pula kuantitas dan kualitas keduanya, serta transaksi harus dilakukan dengan cara tunai/*cash*.
- b. Jika dua barang yang dipertukarkan *'illatnya* sama tapi jenis berbeda, maka kualitas dan kuantitas boleh tidak sama, namun transaksi tetap harus dilakukan saat ini pula (*cash*).
- c. Jika dua barang yang dipertukarkan tersebut *'illat* dan jenisnya berbeda, maka dibolehkan untuk tidak sama dalam hal kuantitas dan kualitas dan boleh transaksi dilakukan dengan tempo (tidak tunai).
- d. Jika dua barang yang ditukarkan bukan termasuk barang-barang ribawi, maka boleh diperjualbelikan dengan bebas.

Pada hadis di atas, secara jelas emas dikategorikan sebagai barang ribawi. Hal ini menjadikan emas sebagai barang yang tidak biasa. Ada ketentuan-ketentuan khusus dalam transaksinya. Berikut ringkasan pendapat para ulama terkait hal tersebut: ¹⁸

Pertama, Mazhab Hanafi. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *'illat* riba fadhil adalah takaran dan timbangan (*al-wazn*) pada komoditi sejenis. Jika *'illat* ini didapati maka tidak boleh ada pelebihan atau penundaan. Khusus untuk emas dan perak, *'illatnya* adalah timbangan dan sejenis. Namun, ada diantara beberapa ulama

¹⁸ Pendapat-pendapat ini disarikan Dr. Ahmad Hasan. Lihat Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), hlm. 169-172. Lihat juga Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. IV, hlm. 675-691.

Hanafi berpendapat bahwa *'illat* tersebut adalah *al-qadr* (ukuran secara umum) dan jenis. Akan tetapi pendapat kedua ini indikasinya akan melenceng dari sasaran, sebab yang namanya ukuran itu mencakup jumlah dan *al-madzru'* (ukuran panjang/pendek).

Al-Samarkandi mengatakan:

"illat riba fadhl adalah 'al-qadr' yang sesuai dengan jenis barang. Maksudnya, takaran untuk jenis barang yang diukur dengan takaran dan timbangan untuk 'al-atsman' dan mutsmanat (barang yang dianggap nilainya tinggi).

Kedua, *Mazhab Maliki*, Pendapat masyhur dari madzhab ini mengatakan bahwa *'illat* riba pada emas dan perak adalah *ghalabah al-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga). Oleh karena itu, *illat* ini tidak terdapat pada *fulus*. Ada juga pendapat lain yang mengatakan *'illatnya* adalah *mutlak al-tsamaniyah* (semata-mata harga) sehingga *fulus* termasuk ke dalam kategori riba ini.

Al-Adawi mengatakan:

"Ulama Maliki berbeda pendapat. Pendapat yang masyhur adalah yang pertama dan yang tidak masyhur adalah yang kedua. Maka, menurut pendapat pertama, uang kertas tidak termasuk benda riba. Akan tetapi, sebagian besar pendapat ulama Maliki mengatakan makruh hukumnya mentransaksikan uang emas."

Ketiga, *mazhab Syafi'i*. Menurut ulama Syafi'i, *'illat* riba pada emas dan perak adalah *jins al-atsman ghaliban* (jenis benda yang berharga) dan *'illat* ini *qashirah* (pasif), maksudnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengqiyaskan masalah yang lain dengan *'illat* tersebut.

Al-Nawawi mengatakan:

"Adapun emas dan perak, maka menurut ulama Syafi'i illat ribanya adalah 'jins al-atsman ghaliban. 'Illat ini adalah 'illat al-qashirah, tidak bisa

digunakan untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakan 'illat tersebut, sebab 'illat tersebut hanya ada pada emas dan perak."

Keempat, Mazhab Hanbali. Pendapat Hanabilah menghatakan 'Illat riba pada emas dan perak menurut pendapat masyhur pendapat madzhab Hambali ialah al-wazn. Riwayat lain dari madzhab Hambali sependapat dengan madzhab masyhur madzhab Maliki dan Syafi'i. Riwayat ini dikuatkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil tentang 'illat riba pada emas dan perak adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Jumhur ulama, yang terdiri dari ulama Syafi'i, Maliki (menurut pendapat yang masyhur), Hambali (menurut salah satu riwayat), berpendapat bahwa 'illat riba pada emas dan perak adalah *ghalabah al-tsamaniyah*.
- b. Madzhab Hanafi dan riwayat masyhur madzhab Hambali, berpendapat bahwa 'illat tersebut adalah *al-wazn* (yang ditimbang) dan *al-jins* (jenis).
- c. Madzhab Maliki menurut pendapat yang tidak kuat mengatakan bahwa 'illat tersebut *mutlak al-tsamaniyah*.

Atas kesimpulan di atas, muncul pertanyaan yang mengatakan bahwa jika memang jumhur Fuqaha menjadikan *ghalabah al-tsamaniyah* sebagai 'illat pada emas dan perak, sementara 'illat ini termasuk *qashirah*, apakah ini berarti, mereka tidak membenarkan mengqiyaskan hukum dokumen berharga (atau uang kertas) dengan emas dan perak? Kenyataannya memang tidak. Fakta yang ada tidak seperti yang dinyatakan dalam pertanyaan tersebut. Itu terbukti bahwa jumhur Ulama sekalipun mereka berpendapat bahwa 'illat pada emas dan perak sifatnya *qashirah*, juga membenarkan prinsip qiyas.

¹⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), hlm. 173.

Jumhur pun mengqiyaskan mata uang kertas kepada emas dan perak dan ini tidak bertentangan dengan prinsip *'illat al-tsamaniyah*. Sikap fuqaha yang menetapkan *'illat* ini berdasarkan tidak adanya benda yang bisa menandingi emas dan perak sebagai mata uang pokok. Mereka tidak bermaksud sama sekali untuk melarang qiyas. Sebab jika itu yang dimaksudkan, niscaya mereka menjadikan *'illat* riba pada emas dan perak adalah kebendaan emas itu sendiri. Akan tetapi mereka menjadikan *'illat* tersebut *jins al-atsman* atau *ghalabah al-tsamaniyah*, sebab inilah *'illat* yang *munasib*. Oleh karena itu, pada setiap benda yang mengandung *'illat* yang ada pada emas dan perak, maka boleh mengqiyaskan kepadanya.

Terkhusus menelaah pendapat ulama Hanafi yang menyatakan *'illat* emas dan perak adalah timbangan dan sejenis, pendapat ini terbantah dengan kenyataan adanya ijma' ulama yang membolehkan akad salam (pemesanan) pada barang-barang yang ditimbang. Seandainya semua barang yang ditimbang terkena riba, niscaya tidak diperbolehkan transaksi salam pada emas dibayar perunggu. Karena akad salam tidak dapat dilakukan pada dua item yang mempunyai kesamaan *'illat*. Sehingga ketika salam dapat dilakukan antara emas dengan sesuatu yang ditimbang/ditakar (perunggu misalkan), hal itu merupakan bukti bahwa *'illat* yang terdapat pada emas dan perak adalah *tsamaniyah* (harga atau nilai tukar).

Persoalan berikutnya adalah bagaimana ketetapan sifat uang pada emas. Setelah beberapa tahun, negara-negara di dunia meninggalkan sistem penopang emas (*gold standard*) terhadap uang kertas. Sehingga uang yang beredar sekarang dikategorikan *fiat money*. Dengan demikian uang cetakan dari emas dan perak tersisih. Tak ada satu negara pun di dunia yang memberlakukannya sebagai mata uang. Seluruhnya menggunakan uang kertas.

Fenomena ini yang kemudian memaksa para ulama untuk berpikir lebih lanjut posisi emas pada saat ini. Apakah masih dikategorikan sebagai barang ribawi atau bukan? Dan apakah dibolehkan pembelian emas dengan uang kertas secara angsuran

padahal kedua-duanya merupakan satu jenis dalam *'illat* yang sama? Berikut pendapat para ulama yang dapat dijadikan rujukan dalam menjawab pertanyaan di atas:

1. Pendapat Yang Membolehkan

Maksud membolehkan disini adalah menghukumi transaksi jual beli emas dengan cara angsuran sebagai transaksi yang mubah. Dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka beralasan bahwa emas pada saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Diantara para ulama yang menyatakan pendapat ini antaralain ²⁰

- a. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab Majmu' Al-Fatawa: "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*) dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai atau tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."
- b. Ibnu Qayyim menjelaskan: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan

²⁰Pernyataan ulama-ulama di bawah ini diambil dari konsideran yang dipakai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional* Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2010 M

sebagai harga dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”

- c. Syaikh Abdul Hamid Syauqy Al-Jibaly dalam *bai dzahab bi al-taqshit*: “Boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Fatwa ini berdasarkan pendapat ulama kontemporer, yaitu:
- Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
 - Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
 - Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang dan masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.”
- d. Syaikh Ali Jum'ah, mufti negara Mesir mengatakan: “Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam pertukarannya disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abi Said Al-Khudry bahwa Rasulullah saw bersabda: “*janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan*

saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR. Bukhari). Hadis ini mengandung ‘*illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘*illat* nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larang syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat secara diangsur.

2. Pendapat Yang Melarang

Maksud melarang disini adalah menghukumi transaksi jual beli emas dengan cara angsuran sebagai transaksi yang dilarang. Dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka beralasan bahwa emas pada saat ini masih dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Diantara para ulama yang menyatakan pendapat ini antara lain:

21

- a. Pendapat mayoritas ulama: “uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: *Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jual-belianlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.*”
- b. Imam Syafi’i dalam fiqh empat madzhab: “Semua yang bisa digunakan sebagai alat tukar bisa mengandung riba. Tidak ada perbedaan apakah alat tukar itu berupa mata uang, atau bukan berupa mata uang, seperti emas perhiasan dan bijih emas.”
- c. Imam Nawawi berpendapat: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa ‘*illat* keribawian emas dan perak adalah

²¹ Pernyataan ulama-ulama di bawah ini diambil dari konsideran yang dipakai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010* tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2010 M.

kelayakannya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan atau jika anda mau, anda dapat menyebutnya substansi materinya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan. Kedua ungkapan ini mencakup bijihnya, emas dan perak yang dicetak sebagai uang, perhiasan dan perkakas yang terbuat dari emas atau perak.”

- d. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* berpendapat: “Para ulama bersepakat bahwa (emas atau perak) yang dibentuk sebagai koin, bijihnya dan yang sudah dibentuk adalah sama dalam hal larangan menjual sesama jenis (emas atau perak) dengan berat yang berbeda berdasarkan hadis yang sudah lalu yang bersifat umum kecuali menurut pendapat Mu’awiyah. Beliau mengizinkan perbedaan berat antara (pertukaran) bijih (emas atau perak) dengan (emas atau perak) yang sudah dibentuk mengingat adanya nilai tambah (ekonomis) akibat proses pembentukan. (Maksudnya akibat adanya tambahan komponen biaya pencetakan dan pembentukan).”
- e. Syaikh Zakaria Al-Anshari mengatakan: “Riba diharamkan pada komoditi emas dan perak meskipun tidak dicetak sebagai alat tukar, seperti perhiasan dan bijihnya. Hal ini berbeda dengan komoditi lain seperti *fulus* (alat bayar yang terbuat dari selain emas dan perak) meskipun berlaku sebagai mata uang. Keharaman emas dan perak dikarenakan ‘*illat* nya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan, yang juga bisa disebut dengan substansi materinya sebagai mata uang atau alat tukar yang dominan. ‘*Illat* ini tidak ditemukan pada barang/mata uang selain emas dan perak.
- f. Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam *buhuts fi al-iqtishad al-Islamy*: “Status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan

dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama dan saling terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan.”

- g. Dr. Wahbah Zuhayli dalam *al-Muamalat al-Maliyah al-Muasharah* mengatakan: “Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang) dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

Berdasarkan pengelompokan di atas, pada hakikatnya para ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehan dan tidak dibolehkannya penangguhan pertukaran emas. Hal ini disebabkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami posisi emas sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, sehingga membuka pintu ijtihad bagi para ulama dalam menetapkan hukum pertukaran emas secara angsuran.

Sehingga dari analisa dari beberapa pendapat diatas dapat sebuah kesimpulan dengan poin-poin sebagai berikut:²²

- a. Terkait pendapat yang membolehkan transaksi jual tangguh emas dengan alasan bahwa uang emas dan perak sudah tersisih, ini merupakan pernyataan yang perlu dicermati. Benarkah di zaman modern ini emas sudah tersisih?

Fakta dalam dunia perdagangan internasional ternyata membuktikan hal kebalikannya. Emas masih digunakan sebagai uang dalam beberapa bentuk. Beberapa waktu lalu digunakan sebagai uang yang beredar, kemudian kini masih

²² Deni Purnama, “Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas Economic”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014.

digunakan sebagai cadangan devisa bank-bank dan pemerintahan. Emas juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan utang-utang internasional dan sebagai media penyimpanan nilai. Dr. Fuad Dahman yang dikutip pernyataannya dalam buku mata uang Islam menyebutkan: "Bentuk lahir kondisi ini (yakni peredaran uang kertas) memberi kesan fungsi emas sebagai uang sudah berakhir. Namun kenyataan sebaliknya, menghilang dari peredaran tidak menghalangi dua fungsinya yang penting yang masih ada. *Pertama*, bagi individu-individu emas masih tetap berfungsi sebagai barang simpanan dalam skala luas. Setiap orang semampunya berusaha untuk menjadikannya tabungan yang diyakini lebih baik dan lebih terjamin dari kertas bank. *Kedua*, emas masih digunakan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran luar negeri. Negara yang saldo anggaran pembayarannya negatif, mau tidak mau harus mengekspor emas untuk menutupi defisit anggaran pembayarannya."²³

- b. Hampir senada dengan poin pertama, para ulama kontemporer yang berpendapat bahwa emas hari ini telah menjadi *sil'ah* begitu juga halnya pada emas logam mulia, telah dibantah oleh pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa secara substansi materi, emas dinilai sebagai alat tukar/mata uang.

Disamping itu, jika emas dikatakan telah menjadi barang, kenapa Allah mengabadikan larangan penimbunan emas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi: "*Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkan nya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*" Bukankah ayat ini secara langsung menunjukkan bahwa emas merupakan materi berharga sebagai penyimpan nilai (salah satu fungsi uang)?

Para ulama ternama pun meyakini bahwa emas diciptakan sebagai standar nilai/harga, diantara mereka:

²³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), hlm. 74.

- Imam Al-Ghazali: “Allah menciptakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai *hakim* (pemutus) dan *mutawassith* (penengah, mediator) terhadap harta-harta yang lain untuk mengukur nilai atau harganya.”
 - Ibnu Khaldun: “Allah menciptakan dua logam emas dan perak sebagai nilai (*qimah*) bagi semua harta.”
 - Imam Sarkhasi: “Emas dan perak (seperti apapun bentuknya) diciptakan Allah sebagai substansi harga.”
- c. Para ulama kontemporer melandasi argumennya tentang dikeluarkannya posisi emas dari barang ribawi sehingga membolehkan jual tangguh emas dengan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Kedua ulama ini menyatakan bahwa perhiasan emas tidak termasuk barang ribawi, karena statusnya telah berubah menjadi jenis pakaian dan barang. Hemat penulis, merupakan kekeliruan jika pendapat ini yang dipakai dalam memutuskan dibolehkannya jual tangguh emas. Karena dalam prakteknya, emas yang banyak beredar dan dipakai untuk bisnis jual beli dan investasi bukan berbentuk perhiasan, melainkan emas batangan.

Murid Ibnu Taimiyyah, yaitu Ibnu Al-Qayyim (yang dikenal sebagai penjelas ungkapan sang guru), beliau mengungkapkan dengan terang maksud dari gurunya: “Perhiasan yang pemanfaatannya diijinkan termasuk kategori pakaian dan barang, bukan kategori uang. Itu sebabnya mengapa perhiasan seperti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk itu tidak ada istilah praktek riba dalam pertukaran antara perhiasan tersebut dengan mata uang. Hukumnya seperti layaknya yang berlaku dalam praktik pertukaran antara uang dengan barang non ribawi lain meskipun dari jenis yang berbeda. “

Argumen Ibnu Taimiyyah (sebagaimana telah dijelaskan oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim) memasukkan perhiasan ke dalam jenis pakaian mempunyai maksud yang dalam. Yaitu bahwa antara perhiasan dan pakaian memiliki fungsi yang

sama yaitu untuk dipakai. Dan ini berbeda dengan motif pembelian emas batangan, yang tidak dimaksudkan untuk perhiasan yang dipakai. Dari sisi kewajiban zakat pun berbeda, ketika perhiasan emas dikategorikan sebagai pakaian dan barang, maka tidak ada kewajiban zakat bagi emas perhiasan. Oleh karena itu, perhiasan emas adalah sebuah pengecualian dan tidak bisa hukumnya digeneralisir untuk seluruh bentuk emas, terlebih lagi dijadikan alasan untuk mengeluarkan emas dari barang ribawi yang enam.

Walhasil Beberapa syarat pokok yang membedakan antara mazhab konvensional dan ekonomi Islam tentang benda yang boleh dijadikan uang yaitu, syarat bendanya jarang ada (carity), tahan lama dan uang itu dibuat dari benda yang sangat berharga. Ketiga syarat hanya ada pada emas (dinar) dan perak (dirham) yang dalam sejarah telah digunakan oleh Nabi Muhammad dan beberapa khalifah sesudahnya. Muhammad pun sebagai penerima wahyu terakhir mengadopsi mata uang dinar dan dirham dari warisan kerjaan Romawi dan Persia, karena kedua mata uang tersebut telah memenuhi tiga syarat tersebut. Sementara mazhab konvensional menitikberatkan hal-hal tidak ada dalam benda yang terpenuhinya ketiga syarat tersebut, padahal akibatnya adalah sangat rentan inflasi dan penindasan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah dan penindasan pelaku-pelaku ekonomi yang menguasai informasi sementara pelaku-pelaku ekonomi yang tidak ada akses informasi maka akan menjadi mangsa karena ketidak-tahuannya. Islam sebagai agama pembawa rahmat, tidak sekedar slogan pembawa keadilan harus dengan alat dan terukur keadilannya yaitu diantara diharuskannya uang yang berbasis komoditi agar ketidakadilan itu dapat diantisipasi.

Penerapan Mata Uang Dinar dan Dirham di Indonesia.

Dinar dan Dirham merupakan salah satu alat transaksi yang cukup stabil. Kestabilan uang Dinar dan Dirham, sebenarnya juga

telah diakui dunia. Contohnya, ketika Amerika Serikat menggunakan uang standar emas tahun 1879, tingkat inflasi menurun drastis menyamai tingkat inflasi tahun 1861.

Uang kertas dan logam yang digunakan di Indonesia dan negara-negara di dunia saat ini tidak didukung dengan ketersediaan emas, maka alat tukar tersebut nilainya tidak pasti dan bergantung pada penerbitan uang tersebut. Hal ini juga memberikan peluang besar bagi pemain di pasar uang untuk memanipulasi yang dapat menyebabkan krisis moneter berkepanjangan. Penggunaan Dinar dan Dirham yang memiliki nilai seperti emas dan perak, membuat harga atau nilai Dinar dan Dirham ditetapkan berdasarkan permintaan logam tersebut. Nilai Dinar dan Dirham akan dikendalikan harga emas dan perak dunia. Walaupun terkadang terjadi kenaikan dan penurunan nilai mata uang, akan tetapi naik dan turunnya relatif kecil dan tetap memiliki nilai instristik yang jelas dan pasti.

Alasan kuat juga dijelaskan dalam Ekonomi Makro Islam, yang mengatakan bahwa Dinar dan Dirham memiliki kelayakan untuk digunakan sebagai mata uang dan dapat memperlancar stabilitas system moneter. Berikut uraian tentang Dinar dan Dirham dalam Ekonomi Makro Islam:

1. Dinar dan Dirham adalah uang yang stabil.

Perbedaan yang mendasar mengenai mata uang Dinar dan Dirham dengan Uang fiat adalah nilai tingkat kestabilan. Setiap mata uang dinar mengandung 4.25 gram emas 22 karat dan tidak ada perbedaan ukuran emas yang dikandung dinar pada setiap negara. Uang dinar tidak mengalami inflasi semenjak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh professor Roy Jastram dari Berkeley University dengan menulis buku tentang *The Goldent Constant*. Ia melakukan penelitian harga emas terhadap beberapa komoditi untuk waktu 400 tahun hingga 1976, dari hasil penelitiannya adalah harga emas adalah konstan dan stabil. Sekalipun selama waktu tersebut telah terjadi krisis, perang dan bencana alam nilai emas relatif stabil.

2. Dinar dan Dirham Alat tukar yang tepat.

Nilai dinar dan dirham yang stabil dan memiliki standard yang sama di setiap Negara, akan memberikan kemudahan bagi pengguna dan atau masyarakat untuk melakukan transaksi. Dinar dan Dirham adalah dua mata uang yang memiliki nilai tetap dan stabil, berbeda dengan mata uang fiat (*fiat money*) yang masih membutuhkan pengesahan berupa hukum dari pemerintah yang mencetak. Uang dinar dan dirham tidak perlu ada penghalalan dan pengesahan sebagai uang, namun perlu adanya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah untuk menggunakan Dinar dan Dirham.

3. Dinar dan Dirham meminimalisir tindakan Spekulasi dan Manipulasi.

Nilai Dinar dan Dirham yang sama dapat mengurangi tindakan spekulasi dan manipulasi di pasar valuta asing, karena kemungkinan perbedaan nilai tukar semakin sulit terjadi. Apabila Dinar dan Dirham menjadi "*single currency*" yang sama di setiap negara, maka tidak ada perbedaan nilai Dinar dan Dirham di setiap negara yang memberikan keuntungan yang besar kepada para spekulator-spekulator tersebut.

4. Dinar dan Dirham transaksi sektor riil.

Penggunaan Dinar dan Dirham dapat mengeliminir penurunan ekonomi atau *economic downturn* dan *resesi*. Karena transaksi Dinar dan Dirham tidak terpengaruh terhadap tingkat inflasi dan pengaruh moneter lain. Penggunaan Dinar dan Dirham akan menciptakan sistem moneter yang adil dan berjalan secara harmonis dengan sektor riil. Sektor riil yang tumbuh bersamaan dengan perputaran uang Dinar dan Dirham, akan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat.

5. Dinar dan Dirham mengatasi berbagai masalah sosial.

Permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan akan dengan sendirinya menurun atau bahkan menghilang. Karena stabilnya tingkat perekonomian, sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Kemakmuran negara membuat kesetabilan ekonomi.

Krisis moneter atau krisis mata uang yang menjadi pintu masuknya kapitalis-kapitalis asing untuk menguasai perekonomian negara tidak akan pernah bisa masuk ke negara. Ini disebabkan kuatnya perekonomian dan dukungan pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dengan menggunakan Dinar dan Dirham

7. Dinar (emas) dan Dirham (perak) bisa menjalankan fungsi uang modern dengan sempurna.

Yaitu fungsi alat tukar *medium of exchang*, fungsi satuan pembukuan *unit of account* dan fungsi penyimpanan nilai *store of value*.

Saat ini di Indonesia sudah berdiri perusahaan dan instansi yang bergerak dalam penyediaan dan pendistribusian dinar dan dirham. PT.Antam (Persero) tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan, pengolahan dan percetakan Emas dan perak di Indonesia. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Antam adalah Dinar Emas dan Dirham Perak. Dalam pembuatannya PT. Antam membentuk Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia, sehingga Dinar dan Dinar yang dihasilkan aman, teruji dan terhindar dari Riba. Sedangkan Wakala Induk Nusantara adalah badan otoritas serta pusat penyebaran, sosialisasi dan penerapan mu'amalah, penyedia Dinar dan Dirham Islam di Indonesia. Wakala Induk Nusantara menjadi salah satu pioner penegakan mu'amalah syariah di Indonesia.

Dinar dan Dirham adalah koin Emas dan Perak yang memiliki kelayakan sebagai mata uang karena memiliki syarat dan ciri khusus dari mata uang. Koin Dinar dan Dirham juga memiliki kelayakan sebagai alat transaksi karena dapat difungsikan oleh seseorang, sekelompok, atau golongan tertentu dalam transaksi jual beli, hutang piutang, mahar, zakat, jaminan dan lainnya.

Melalui dua pendekatan diatas, Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Dalam melaksanakan peran dan fungsi ekonomi, pemerintah Indonesia dapat menerapkan mata uang Dinar dan Dirham sebagai alat transaksi.

Pada prinsipnya penggunaan mata uang Dinar dan Dirham bukan menjadi solusi utama untuk mengatasi pergolakan perekonomian di Indonesia, masih banyak solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi.

Dinar dan Dirham layak untuk digunakan sebagai alat transaksi karena dua koin mata uang tersebut memiliki nilai dan unsur yang stabil. Ibnu Khaldun mengungkapkan dalam Ekonomi Makro Islam, bahwa suatu negara tidak akan mungkin dapat melakukan pembangunan secara *sustainable* tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Artinya bahwa stabilitas harga memiliki jaminan keadilan uang dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi stabil.

Secara garis besar mata uang Dinar dan Dirham memiliki peran dan fungsi sangat penting di Indonesia, diantaranya:

1. Menjaga kestabilan ekonomi secara mikro dan makro
2. Menjaga asset dan/ sektor riil terhadap sistem moneter
3. Menjadi fungsi perekonomian moderen dengan standar emas
4. Mengatasi masalah sosial ekonomi di masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan Dinar dan Dirham dapat digunakan sebagai Mata Uang dan alat transaksi di Indonesia. Yaitu:²⁴

1. Dinar dan Dirham apabila ditinjau dari Syarat dan ciri-ciri uang, sudah memenuhi standar untuk dapat dijadikan sebagai mata uang. Pada saat Dinar dan Dirham telah memenuhi standar mata uang, maka saat itu Dinar dan Dirham layak untuk dijadikan sebagai mata uang. Karena secara entitas dan nilai dari Dinar dan Dirham yang berasal dari Emas dan Perak,

²⁴Muhammad Bahrul Ilmi, *Analisis Kelayakan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang terhadap transaksi di Indonesia*, Pendidik dan Pengamat Ekonomi Syariah.

sehingga sangat stabil untuk standar mata uang. Namun negara mencetak Dinar dan Dirham masih dalam jumlah sedikit, karena kebutuhan Dinar dan Dirham belum banyak dan peredaran uang fiat masih sangat tinggi.

2. Dinar dan Dirham untuk masyarakat dari kelompok/golongan tertentu dapat digunakan sebagai transaksi seperti jual beli, hutang piutang, jaminan, mahar, zakat dan lainnya. Namun untuk masyarakat secara umum, Dinar dan Dirham belum dapat digunakan sebagai alat transaksi, karena masyarakat umumnya masih sangat langka terhadap pengetahuan tentang Dinar dan Dirham. Apabila ada sebagian masyarakat mengetahui tentang Dinar dan Dirham, mereka masih enggan menggunakan sebagai alat transaksi. Karena mereka masih ragu untuk memperolehnya dan bagaimana cara menggunakannya.

Pada prinsipnya Dinar dan Dirham memiliki kelayakan sebagai mata uang dan digunakan sebagai alat transaksi, namun masih sangat kurang dukungan dari pemerintah sebagai aparatur negara dan pengelola kebijakan ekonomi. Apabila pemerintah berani ambil sikap untuk melakukan *research* tentang Dinar dan Dirham, maka pemerintah telah berupaya untuk membangun perekonomian yang stabil dan bebas riba. Di Indonesia masih dikuasainya oleh ekonomi kapitalis liberal, akan menerima konsekuensi dari segala inflasi dan kesenjangan yang tidak diduga akibat dari penggunaan mata uang yang tidak berbasis komoditi seperti emas dan perak.

F. Kekayaan, Kemiskinan dan Kefaqiran

Dalam mazhab konvensional, Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan

berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya

sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Dalam Islam, status manusia dari sisi materi ada *al-aghniya* (orang-orang kaya), *al-masakin* (orang-orang miskin) dan *al-fuqara* (orang-orang fakir). Dari ketiga istilah berbeda penggunaannya terutama antara *al-masakin* dan *al-fuqara*. Istilah *al-fuqara* adalah digunakan untuk orang-orang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (*al-dharuriyyat*). Bila dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya namun kebutuhan sekundernya (*al-hajiyat*) maka dinamakan *al-masakin*. Sementara untuk penggunaan istilah *al-aghniya* adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyat*) dan perbedaan yang lain adalah orang-orang kaya adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat sementara orang-orang miskin walaupun sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya namun mereka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Berbeda dengan mazhab Konvensional, Dalam Islam kemiskinan berasal dari kata *sakana*, yang berarti ketenangan jadi, orang miskin akan mendatangkan ketenangan hidup. Sementara istilah *al-fuqara* terambil dari kata *faqara* yang berarti sangat membutuhkan *al-hajaah al-shadidah* (kebutuhan sangat) yaitu sangat membutuhkan kebutuhan pokoknya. Di sinilah akar perbedaan antara mazhab Islam dan Konvensional. Mazhab konvensional menggunakan kata miskin setara dengan kata *faqir* dalam Islam. Dalam mazhab konvensional termasuk istilah yang digunakan di

Indonesia kata-kata miskin semacam sesuatu rendah dan harus dihindari, dalam Islam kemiskinan adalah sesuatu yang membawa berkah, ladang amal dan membawa semangat untuk memenuhi kebutuhan hidup, Akan tetapi memang berbeda dengan fakir. Penggunaan kata faqir sangat identik dan berkonotasi kurang baik, hal ini bisa dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٨﴾

268. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[170]. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.

Dalam ayat itu disebut dengan kata-kata al-faqr bukan kata al-miskin. dalam sebuah hadis jagan nabi pernah berdoa agar dijauhkan dari kefaqiran sebagaimana sabdanya:

اللهم أعوذ بك من الفقر والدين

Artinya: "Ya Allah aku berlindung dari kefakiran dan hutang-piutang...."

Baik dalam al-Quran dan hadis penggunaan istilah *al-faqir* adalah berkonotasi negatif dan tidak dianjurkan. Berbeda dengan kata al-miskin, penggunaan kata miskin berkonotasi positif dan ada indikasi anjuran, Hal ini bisa dilihat dari salah satu doa Nabi Muhammad saw untuk hidup miskin;

اللهم أحينا مسكينا وأمنا مسكينا واحشرنا مع زمرة المساكين

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "ya Allah hidupakanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku dengan golongan orang-orang miskin"

Secara filosofis-psikologis, Orang dengan hidup miskin, dapat menjauhkan diri dari sifat kesombongan, lupa diri dan sering ingat Tuhan. Berbeda dengan orang-orang kaya yang cenderung membawa sifat sifat tercela seperti angkuh, cepat lupa Tuhan, tidak empaty, gila hormat dan lain-lain. Namun di sisi lain Nabi saw. juga tidak pernah berdoa untuk menjadi kaya, dengan kata lain Nabi ingin menjadi orang yang berada di tengah-tengah antara orang-orang kaya dan orang-orang faqir. Sebab orang-orang kaya lebih cepat membawa kesombongan, lupa Tuhan dan lain-lain, namun di sisi lain tidak mau juga termasuk kepada orang faqir karena orang-orang faqir akan membawa kelemahan dan beban orang banyak dan akan membawa kekufuran. Nabi berdsabda:

كاد الفقر أن يكون كفرا

Artinya: "*kefaqiran hampir saja membawa kekufuran*"

Kefaqiran tidak sama dengan kemiskinan apalagi dengan kemewahan (*al-aghniya*).

Berbeda dengan mazhab konvensional kemiskinan adalah kesialan, kutukan, musibah dan kata-kata lain yang disematkan sebagai konotasi negatif dan rendah. Menurut mazhab ini kekayaan adalah simbol kesuksesan dan kejayaan hidup seseorang, hidup dengan kekayaan melimpah dan semakin kita tidak bekerja asalkan mendapatkan uang dengan mudah atau dengan cara tidak bekerja keras adalah sesuatu yang dianjurkan, makanya orintasinya mazhab ini akan memproduksi manusia-manusia bukan pekerja dalam sektor-sektor yang real apalagi untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti padi, jagung, sagu, ikan, tempe dan lain-lain. Tujuan hidup lebih terhormat dan menjadi kesuksesan jika menghasilkan barang-barang mewah (*tahsiniyyat*) namun tidak untuk barang pokok-pokok.

Dalam dunis Islam sipritual (*sufistik*) bahkan kekayaan adalah sebagai fitnah dan beban hidup. Dengan kekayaan seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak begitu penting, mereka mengumpamakan mengumpulkan kekayaan seperti halnya sese-

orang yang merantau ke suatu daerah akan tetapi sibuk dengan barang bawaan yang melimpah sehingga di perjalanan dia bersusah payah mengurus bekal-bekal yang berlebihan sehingga untuk mempersiapkan perjalanan yang dituju tidak dihiarukan, begitu juga orang-orang yang sibuk dengan kekayaan, mereka sibuk dengan harta benda setiap hari namun mereka melupakan sesuatu yang sangat penting yaitu beribadah dan mengingat Tuhan. Bahkan menurut al-Syaibani, keadaan faqr²⁵ (sifat kekuarangan) lebih baik dari pada seseorang seorang dalam keadaan kaya. Karena kekayaan bisaanya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan.

Konsep Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Ekonomi Islam.

Konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Islam lebih dalam dari semua itu. Ia lebih menyentuh secara mendalam pada pokok persoalan yang hakiki. Bagi Islam, pembangunan yang dilakukan oleh manusia hanya mengejar satu tujuan yang utama, yaitu kesejahteraan umat. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita. "Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Al-Anbiyâ'/21: 107) ".... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Al-Baqarah/2: 185)

"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." (Al-Mâ'idah/5: 6).

Oleh karenanya konsep pembangunan dalam Islam dapatlah dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan

²⁵Namun al-Syaibani memberikan catatan bahwa keadaan *faqir* di sini adalah dalam keadaan kifayah (mencukupi kebutuhan hidup) bukan dalam keadaan kafayah (membena orang lain). Lihat al-Syaibani, al-Iktisab Fi-al-Rizq al-Mustathob, h. 40-44.

masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya dalam ridla Allah swt. Ada lima prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam pembangunan:

1. Prinsip Tauhid dan Ukhuwah

Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang serba berkecukupan itu untuk sebesar-besar kemaslahatan umat, bukan untuk perorangan, karena setiap insan yang beriman mengakui bahwa kepemilikan mutlak adalah pada Allah swt. Dalam prinsip tauhid juga berarti semua kegiatan seorang muslim harus diniatkan mencari keuntungan semata namun harus diorientasikan pada prinsip pahala dan ibadah kepada Allah swt. Dengan prinsip pembangunan akan meminimalisi penindasan kepada mereka-mereka yang selalu menjadi korban pembangunan.

Untuk mewujudkan prinsip Tauhid dan Persaudaraan, Islam melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya. Secara tauhid, Allah swt sebagai pemilik sumber daya ekonomi telah menentukan bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan semua manusia. Dalam kerangka transaksi dicerminkan para pihak yang terkait bukan hanya menjamin kepentingan satu pihak yang terkait, bukan hanya menjamin kepentingan atau pihak seperti pemilik modal saja.

2. Prinsip Kerja dan Produktivitas

Kerja adalah hak sekaligus kewajiban setiap orang, berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan kebutuhan setiap individu, hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam UUD'45 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap insan. Dalam berproduksi, aktor mu'amalah ini mengelola input produksi berupa tenaga kerja, modal kerja dan

investasi. Keluarannya berupa barang atau jasa yang berharga ketika dipertukarkan di pasar. Ia memperoleh nilai lebih dari hasil usahanya itu.

Dalam Islam, kerja dan produktivitas adalah sebuah kewajiban. Adapun hasil tidak menjadi kewajiban. Sebab dengan berusaha dengankerja pahala dan pengabdian kepada Tuhan sudah menjadi keuntungan, sementara keuntungan duniawi adalah sebab akibat dari usaha. Berbeda dengan paradigma konvensional, hasil (keuntungan duniawi) menjadi prioritas bila seseorang sudah mendapatkan harta dan tidak membutuhkan barang dan tidak kerja asalkan keuntungan didapat hal itu tidak menjadikan masalah, karena keuntungan adalah sebuah tujuan.

Kemudian disempurnakan oleh Murasa Sarkaniputra dalam bentuk Santun Lingkungan (*Al-Shalâh*).²⁶ Tugas asasi manusia di bumi adalah menciptakan kemakmuran global ('imarat al-kaun). Dalam kerangka ini, sasaran berdakwah yang berarti upaya menyampaikan hidayah untuk melaksanakan 'amar ma'ruf nahi munkar adalah menghilangkan kerusakan di muka bumi. Beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan larangan membuat kerusakan di muka bumi setelah alam ini disiapkan oleh Allah dalam kondisi yang serba baik, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 205:

Nilai-nilai ekonomi Islam secara keseluruhan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dalam artian terpenuhinya kebutuhan pokok (al-dharuriyyah) yang dalam Islam dinamakan *al-faqir* dan menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia dengan kehidupan saling mambantu dan tolong menolong. Sistem ekonomi Islam memiliki seperangkat nilai instrumental dalam mengentaskan kemiskinan dan harus didasarkan pada prinsip produktivitas dan kinerja. Diceritakan bahwa nabi Dawud yang seorang Raja, bahkan kerajaannya membawahi kerjaan jin dan manusia namun, seorang Nabi ini tidak mau memakan dari hasil kerja orang lain, dia hanya memakan dari hasil dari jerih payah dana keringat sendiri dengan menjual baju besi, padahal seorang raj abisa

²⁶Murasa Sarkaniputra dkk, *Tauhidi Epistimologi*, (Jakarta, 2003)

saja mengambil keuntungan dan bagian dia dari pajak dan makan dan keringat orang lain karena kekuasaanya.

3. Kerjasama ekonomi

Kerjasama merupakan karakter yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Nilai kerjasama ekonomi ini harus dapat dicerminkan dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Doktrin kerjasama dalam bidang ekonomi ini akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata dan melindungi kepentingan ekonomi dari pihak atau golongan ekonomi lemah. Implikasi dari kerjasama ekonomi ini adalah aspek sosial politik, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama, negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Islam, kerjasama adalah transaksi kepercayaan terutama antara si pemilik modal (*al-ghani*) dan orang yang lemah (*al-faqir*) yang akan menumbuhkan kemakmuran dan pertumnuhan harta (*al-numu fi-al-amwal*). Persamaan hak untuk mengemukakan ide dan usulan yang dituangkan dalam transaksi antara si pemilik modal dan pengelola (*al-mudharib*) adalah sama, padahal menurut mazhab konvensional posisi si pemilik modal selalu diatas daripada si pengelola atau bagi mereka yang membutuhkan modal. sehingga ketidaksamaan dalam status sosial itu maka si yang lemah harus mengikuti dan tunduk kepada keinginan dan usulan yang dikemukakan oleh si pemilik modal, jika tidak maka si pemilik modal mencari kepada orang mau mengikuti peraturan dan usulan yang dia buat.

4. Zakat

Di dalam agama Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara islam yang mana memiliki implikasi transformasi yang jelas di

bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai instrumen khas Islam dalam menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang berada di pundaknya. Dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumbangan wajib yang memiliki nilai penting bagi perbendaharaan negara Islam. Apalagi orang kaya dalam artian dia sangat produktif menghasilkan kekayaan, dia memberikan kekayaannya sebagian besar untuk kepentingan dan kemaslahatan umat sementara untuk dirinya dan keluarganya disisakan hanya sekedarnya saja, maka kemulyaannya akan melebihi orang-orang kaya yang hanya mengeluarkan zakatnya saja sebagai kewajiban dia kepada Tuhannya.

5. Pelarangan Riba

Hakekat pelarangan riba adalah penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Dalam bahasa lain, penolakan riba adalah penolakan jenis transaksi apa saja yang menyebabkan bahaya terhadap satu pihak, tetapi memberikan keuntungan kepada pihak yang lain. Riba mencakup seluruh jenis rente, juga mencakup keuntungan-keuntungan kredit uang atau benda tetap. Baik kredit konsumtif maupun produktif. Dengan tingkat bunga tinggi maupun rendah. Bagi islam, riba adalah perbuatan yang sangat dilarang. Riba, bagaimanapun bentuknya tetap membawa dampak buruk bagi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya hutang. Hal itu karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah adanya suku bunga. Semakin tinggi suku bunga semakin tinggi pula harga barang. Dampak lainnya, bahwa dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya suku bunga akan menyebabkan peminjam

sulit keluar dari ketergantungan, apalagi sebagaimana lazimnya bahwa bunga atas hutang tersebut dibungakan (bunga berbunga).

Adapun dampak bagi sosial kemsyarakatan adalah karena riba merupakan pendapatan yang diperoleh dengan tidak adil. Hal ini karena para pelaku riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya lebih tinggi dari jumlah uang yang dipinjamkan. Padahal tidak ada jaminan bahwa usaha yang dijalankan orang tersebut akan mendapatkan keuntungan melebihi jumlah uang yang harus dibayarnya.²⁷

Oleh karena demikian mengerikan dampak riba, maka semua agama samawi: Islam, kristen dan yahudi melarang riba. Hanya saja yang perlu dicatat, dari sekian agama samawi, hanya agama Islam yang sampai sekarang secara tegas dan konsekuen meneriakan larangan riba, sebagaimana yang tercermin dalam ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Hal ini dikarenakan secara tekstual al-quran yang memberikan kemurnian dan jaminan Tuhan terhadap tekst tersebut dan adanya penafsiran para ulam mujtahid dalam menfsirkan tekst-tekst itu.

G. Keadilan dan Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab *al-'adl*. Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah,

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), cet. Ke-1, hal. 95)

tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*).²⁸

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.²⁹

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.³⁰

Al-Qur'an merupakan dasar konstitusi demi terwujudnya kepribadian manusia, yang dilandasi dan dipenuhi tatanan kehidupan yang ramah dan damai dan berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan. Bukti adanya keadilan dari Allah yaitu adanya kebaikan dan karunia terhadap manusia dengan diutusnya para Nabi, yang di

²⁸ <http://ibnuanwarudin.blogspot.com/2010/11/konsep-keadilan-dalam-islam.html>

²⁹ Qutb Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1994. Hal: 37

³⁰ <http://puzzleminds.com/ekonomi-islam-dan-keadilan-sosial/>

satu sisi mempunyai misi menyeru manusia kepada penyerahan diri, patuh-tunduk pada Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah al-Hadid [57]: 25 yang artinya:

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia bisa melaksanakan keadilan” (QS. al-Hadid [57]: 25).

Ayat tersebut menegaskan bahwa menegakan keadilan adalah tujuan dan misi utama kenabian. Dengan demikian terdapat dua tujuan utama misi kenabian, yaitu, mengajak manusia untuk menyembah Allah, sekaligus memberantas kemusyrikan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memberantas kezaliman.

Kesatuan umat, persaudaraan dan prinsip keadilan sosial ekonomi adalah unsur-unsur keadilan untuk mencapai sistem kepercayaan kepada Allah SWT (tauhidullah).

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh berbuat adil atau bahwa Dia adalah Pelaku keadilan. Pernyataan ini merupakan persoalan asasi yang di atasnya agama-agama samawi membangun hubungan manusia dengan Allah SWT. Kemudian, perintah Allah SWT untuk mendirikan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip (keesaan Tuhan) yang sesuai dengan ajaran Islam (tauhid).

Kesamaan derajat manusia yang dilandaskan atas kualitas ketaqwaan, telah begitu kuatnya mengikat mereka dalam kesadaran moralitas persaudaraan secara masif dan universal. Seperti ditegaskan oleh Wahbah Zuhailiy bahwa persaudaraan, kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan, yaitu taqwa kepada Allah, melaksanakan hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara menyeluruh bagi kemanusiaan.³¹

³¹Muhammad Rawwas Qalahji, *Mabahis Fi Al-Iqtishad Al-Islami Min Ushulih Al Fiqhiyah*, www.pkes.org

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa di satu sisi pengertian keadilan sosial erat sekali hubungannya dengan ajaran persamaan dan perbedaan di sisi lain. Hal yang sedemikian itu karena dalam pandangan al-Qur'an perbedaan sesama manusia adalah suatu hal yang alami, juga sekaligus mengandung banyak manfaat. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaannya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial.

Begitulah, penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosial ekonomi. Maka, sangatlah keliru klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan, "*Hanya ideologi kami yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan. "Setidaknya hanya kamilah yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan"*. Itulah klaim yang dilontarkan berbagai komponen masyarakat dunia dalam kerangka memperlihatkan keunggulan ideologi atau kepercayaan yang mereka anut.

Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosial ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok yang tertindas sehingga ada kesan sebagai pencitraan. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosial ekonomi yang berdasarkan nilai spritual dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar.

Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosial ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak. Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha dan para pejabat pajak bersama kelompok-kelompoknya.

Jadi, konsep keadilan sosial ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (al-dharuriyyat), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.³² Kesemua tindakan yang ditawarkan oleh Islam tidak lain muaranya adalah

³² Sayyid Qutb, *op. cit.*, h. 40

kesejahteraan untuk dunia dan akhirat. Walaupun dalam kesejahteraan antara konvensional dan Islam berbeda.

Dalam Mazhab Konvensional, kesejahteraan adalah tercukupinya kebutuhan material manusia. Ada sebuah adigum di kalangan mazhab konvensional bahwa materi adalah sarana pencapaian kesejahteraan hidup yang utama. Sejahtera dan tidaknya kehidupan diukur dengan kepemilikan seberapa besar kepemilikan pada materi. Dalam mazhab konvensional Kapitalisme, yang disebut adil adalah jika seseorang mendapatkan apa yang telah dia usahakan, sementara menurut mazhab konvensional sosialisme menyebutkan bahwa adil jika tidak ada orang yang lebih kaya dan tidak ada orang yang lebih miskin (*no one has privilege to get more than others*) atau dengan kata lain sama rasa sama rata. Bagaimana keadilan menurut Islam?

Keadilan menurut Islam, sangat kondisional, misalnya ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang diusahakan lalu dia mendapatkan dengan yang diusahakannya, namun dia memberikan rasa yang tidak menyenangkan kepada orang lain, menzalimi orang lain, menindas, baik secara fisik atau non fisik maka dia juga tidak adil. Dalam operasionalnya, seseorang bisa saja mendapatkan harta dengan mudahnya lalu dia menikmati hasil usahanya tanpa didistribusikan kepada yang lain maka dia pada hakikatnya telah menzalimi orang lain. Oleh karena dalam Islam kesenjangan antara orang-orang kaya dan miskin harus seminimal mungkin dihindari agar kekayaan itu tidak boleh beredar di segelintir orang-orang kaya (*al-aghniya*) lihat QS. Al-Hasyr ; 7. Berbeda dengan mazhab konvensional yang memberikan keleluasan kepada orang-orang kaya untuk menikmati kekayaannya tanpa melihat perasaan dan tanpa empaty kepada orang-orang miskin (*mustad'afin*).

Namun dalam Islam juga sama rasa dan sama rasa juga tidak bisa dibenarkan, karena akan menafikan usaha-usaha orang yang produktif dan menafikan untuk orang-orang yang ingin memperbanyak pahala dengan memberikan kekayaannya kepada orang lain. Satu sisi kapitalisme akan mengakibatkan kesenjangan antara

orang kaya dan orang miskin, sementara kelemahan sosialisme memberikan dampak negatif kepada seseorang yang ingin produktif dan mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Pemikiran sosialisem itu dipengaruhi karena mereka tidak mempercayainya pahala dan kehidupan akhirat yang abadi sesudah mati. Lagi-lagi sosialisme yang menjadikan ukuran kesejahteraan adalah ukurannya materi sehingga keadilan didefinisikan dengan sama rasa dan sama rasa.

H. Pasar vis a vis Tempat Ibadah

Pasar merupakan sesuatu yang amat urgen dalam sistem ekonomi bebas. Dalam paradigma kapitalis yang menitikberatkan pada sistem liberal, pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah yang hendak di produksi di pasaran. Dalam keadaan demikian konsumen merupakan faktor yang menentukan dalam memilih barang dan jasa yang mereka kehendaki. Disamping itu, pengusaha sebagai penyuplai barang akan memainkan peranan penting pula dalam menentukan jenis dan jumlah barang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan demikian antara konsumen dan pengusaha (produsen barang mempunyai ketergantungan satu sama lain.

Dalam mazhab konvensional, konsumen tindak tanduknya selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan mereka yang dinamakan konsep *utility* (kepuasaan yang bersifat kebendaan). Sementara dalam Islam, di samping kepuasan terhadap kebendaan juga kepuasan harus mengacu pada nilai-nilai spiritual, sehingga timbul rasa *qana'ah*, sikap yang merasa cukup dan puas terhadap apa yang dikonsumsinya dan tidak berlebih-lebihan (*israf*), bahkan dalam Islam dianjurkan sesuatu tindakan konsumsinya harus dilandaskan pada nilai-nilai spiritual yaitu semuanya didasarkan karena rasa ingin mendapatkan pahala sehingga dapat diraih *maslahah* dunia dan akhirat.

Bagi pengusaha, Islam sangat melarang usaha memak-simumkan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan pengusaha.

Islam tidak mengizinkan seorang pengusaha untuk mengejar keuntungan yang membabitnya dengan mengorbankan pihak lain yaitu konsumen bahkan menindas pesaingnya agar tidak ada saingan di antara mereka. Bahkan, dalam Islam dianjurkan agar tujuan pengusaha dapat memberikan dukungan dan kemaslahatan kepada konsumen bukan sebaliknya menindas konsumen. Di samping itu pula dalam Islam, pengusaha harus menciptakan pesaing-pesaing sehingga mendatangkan pada diri pengusaha sendiri rasa persaingan yang sehat dan fair, hal ini dapat mengakibatkan dirinya selalu untuk memperbaiki diri baik dalam kualitas pelayanan dan produk dan lain-lain. Hal inilah yang dianjurkan ekonomi Islam yaitu berlomba dalam kebaikan dan pelayanan yang prima dan amal salih.

Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai-nilai spiritual dan material, Nabi dalam menciptakan pasar selalu diiringi dengan adanya mesjid dan begitu pula sebaliknya, ketika membangun mesjid dibangun pula pasar di sebelahnya. Bagi doktrin Islam, mesjid dan pasar dalam kedudukan yang sama, dengan kata lain, sama-sama untuk mencari pahala yang bernilai ibadah dan sama-sama untuk memenuhi kebutuhan. Bedanya kalau di mesjid untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan di pasar untuk memenuhi kebutuhan material. Keduanya sangat dibutuhkan oleh manusia, karena manusia di samping ada unsur fisik dan kebendaan juga mempunyai unsur jiwa atau spiritual (terpenuhinya kebutuhan jiwa dan raga. Jika salah satunya tidak terpenuhi kebutuhannya maka dia akan mengalami masalah.³³

Kalau salah satu dikesampingkan, misalnya seseorang hidupnya hanya menitikberatkan pada kehidupan materi dan keuntungan belaka maka dia akan hidup dalam lingkaran materialisme, hidup

³³Nabi bersabda "sunanahku di Pasar seperti Sunnahku di Mesjid", artinya dalam pasar pun persaingan dalam tempat untuk mendapatkan di tempat yang strategis dan ketentuan -ketentuan lain, seperti tidak boleh di pungut pajak, disewakan, dan di bangun untuk permanen tempat berjualan tidak dibenarkan. Oleh karena hal itu tidak mendatangkan keadilan bagi pesaing yang lain terutama bagi orang-orang yang lemah yang kurang modal.

dalam kebenaran. Sebaliknya jika seseorang hanya menitik-beratkan pada kehidupan akhirat dan spiritual tanpa mempedulikan bahkan mengorbankan kewajiban-kewajiban dirinya serta mengorbankan hak-hak orang lain misalnya anak dan isterinya maka dia berada dalam kehidupan ruhbaniyah yang hal ini juga mendapat celaan dari Islam.

I. Penetapan Harga yang Adil

Dalam pebetuan harga barang produksi, faktor terpenting yang paling berpengaruh adalah penawaran dan permintaan. Kenaikan penawaran dan penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga dan begitu sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat mencolok akan merugikan produsen barang yang lain atau pesaing yang lain serta mendorong mereka untuk keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang terlalu mencolok akan menyusahkan dan merugikan konsumen. Harga yang adil sangat diharapkan oleh kedua pihak, karena dengan harga yang adil dapat memungkinkan para pedagang dan produsen mendapatkan tingkat pengembalian yang sesuai dan ditoleransi oleh pasar dan begitu dapat memberikan gairah pasar sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan kemakmuran. Namun harga yang lebih rendah yang sesuai tentu lebih dibutuhkan dengan syarat masih didapatkan keuntungan yang wajar, karena hal itu akan memberikan kelapangan kepada masyarakat yang mayoritas terutama kaum miskin.

Karena menganut pasar bebas dan liberal, dalam mazhab konvensional, menentukan harga diserahkan kepada pasar, penentuan harga setingginya ataupun serendah-rendahnya tanpa mempedulikan konsumen yang terzalimi atau pihak produsen dan para pesaing yang lain yang terzalimi dianggap tidak bermasalah. Si pedagang boleh menentukan harga setingginya selama pihak konsumen tidak tahu menahu harga sebenarnya, begitupun pihak konsumen boleh menawar harga barang serendah-rendahnya

selama pihak pedagang memberikan harganya walaupun pada waktu itu pula pedagang dalam keadaan yang sangat membutuhkan barang tersebut (jual butuh). Padahal dengan harga yang terlalu mencolok dapat merugikan pihak konsumen dan harga yang terlalu rendah dapat merugikan pedagang atau produsen lainnya.

Berbeda dalam Islam, misalnya Menurut Ibnu Taiymiyah dalam kitabnya *al-Hisbah* menjelaskan tentang maksud harga yang adil yaitu:³⁴

“jika seseorang memperjual-belikan barang daganannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang terzalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah swt. Maka dalam hal demikian,memaksa para pedaganag untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan”

Oleh karena itu, ketika Nabi diminta untuk menentukan harga barang-barang yang melonjak tinggi di pasar, Nabi menolaknya karena hal itu suatu kezaliman dan keinginan Allah. Bahkan Nabi khawatir jika harga yang tinggi di pasar lalu ditentukan pada harga tertentu, mereka akan menuntut di akhirat nanti. disini pula dalam ekonomi Islam prinsip kebebasan diterapkan dalam waktu dan tempat tertentu. Namun di sisi lain jika kenaikan harga karena intervensi tangan-tangan hitam maka pemerintah harus interevensi demi menstabilkan harga.

³⁴Ibnu Taiymiyah, *Al-Hisbah fi-al-Islam*, (Libanon; Dar-al-Kitab- al-Islamiyyah, 1996), h. 24. Dalam hal ini ada hadis Nabi dari Anas Bin Malik ra. Dia menceritakan bahwa:“ orang-orang berkata,”ya rasulullah harga-harga telah naik, tolong tentukan harganya ya Rasulullah,”?, lalu Rasululllah menjawab, “sesungguhnya hanya Allah yang menentukan harga, Dia Maha penahan, Dia Yang Maha Pelepas, Dia maha Pemberi Eizki, Dan Sungguh saya tidak Ingin menmeui Allah nanti ada salah seorang dari-mu yang menuntut-ku karena masalah darah (nyawa) dan Harta. “ (HR. Turmuzi, Sunan Turmuzi, No. 1314 dan HR Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 3.451)

Pada intinya, harga yang adil adalah harga nilai harga dimana orang-orang menjual barang-barangnya dapat diterima secara lumrah sebagai hal yang sepadan dan wajar dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu dan bersamaan.³⁵

³⁵<http://yanasatia.wordpress.com/2018/12/31/teori-islam>.

BAB VI

PENUTUP

Nilai-Nilai (dalam ekonomi Islam) sejati haruslah berdasarkan kepada agama. Malahan Nilai-Nilai itu terkandung dalam kajian agama. Apabila nilai-nilai itu tidak berdasarkan kepada agama dan hanya semata-mata berdasarkan atas akal pikir saja, maka nilai-nilai tersebut tidak akan memuat kebenaran obyektif karena yang memberikan pandangan dan putusan adalah akal pikiran. Sedangkan kesanggupan akal pikiran itu terbatas, sehingga cara berfikir yang hanya berdasarkan kepada akal pikir semata-mata tidak akan sanggup memberi kepuasan bagi manusia, terutama dalam tingkat pemahamannya terhadap yang ghaib dan hikmah.

Sementara itu, ilmu pengetahuan terbukti telah membedakan martabat manusia dan derajatnya dimata Tuhan. Bagi orang Islam, Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Itu artinya, Ilmu pengetahuan benar-benar akan membedakan antara yang bodoh dengan yang pintar.

Islam mengajarkan kepada manusia, sebagai khalifah dimuka bumi berkewajiban menuntut ilmu, namun bersamaan dengan itu manusia juga harus berserah diri kepada kekuasaan Allah dalam pengertian beriman. Manusia diwajibkan berusaha dengan segala kemampuannya, tetapi hasilnya tergantung pada izin Allah.

Salah satu bentuk ilmu yang harus dikuasai oleh muslim adalah ekonomi Islam yang menjadi bahasan penting di zaman sekarang. Di dunia keuangan, lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah dikembangkan sebagai salah satu bentuk dari ekonomi Islam. Begitu juga dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh

masyarakat diarahkan berbasis syariah sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam. Euforia dan tren terkait ekonomi Islam ini jangan sampai menghilangkan muatan penting dan urgensi ekonomi Islam itu sendiri. Agar urgensi ekonomi Islam dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak hanya menjadi euforia, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa sebenarnya ekonomi Islam.

Kajian nilai-nilai filosofis dalam doktrin ekonomi Islam merupakan perpaduan antara ilmu, filsafat dan agama yang secara komprehensif mengkaji filosofi ilmu ekonomi berbasis ajaran agama Islam. Dalam konteks doktrin ekonomi Islam, ekonomi Islam didasarkan pada sejumlah prinsip dan doktrin yang dibagi tiga prinsip besar, yaitu:

1. Prinsip *Tawhid*; prinsip ini berarti seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada *tawhid ilahiyah* yaitu apa yang dilakukan dalam mencari kebutuhan hidup (kegiatan ekonomi) sebagai ibadah dan sebagai pencarian pahala. Di samping itu pula seorang muslim harus bersandar pada *tawhid rububiyah* yaitu kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dalam rangka menolong seorang muslim lainnya agar keberlangsungan hidup berjalan sebagai mana mestinya (khalifah Allah di muka bumi).
2. Prinsip Etika (moral); prinsip ini menuntut seorang ekonom muslim mempunyai landasan berfikir bahwa kegiatan ekonomi harus mempunyai implikasi keadilan, keseimbangan, persaudaran, kesetaraan sosial, tolong-menolong, persamaan hak dan lain-lain.
3. Prinsip hukum: yaitu prinsip tidak *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. Sifat jiwa *maysir* adalah mencari keuntungan dengan tidak susah payah, mengingkin keuntungan dengan santai yang mendahulukan hasil bukan proses, padahal Islam menganjurkan kepada kerja nyata bukan ilusi dan real. Sifat *gharar* adalah sifat ketidakjelasan objek atau tindakan yang berakibat pada kerugian pada salah satu pihak. Merugikan salah satu pihak

pada yang berbisnis dan memberikan kerugian pada orang lain dan diri sendiri adalah kegiatan yang zalim yang dilarang dalam Islam. Sifat Riba adalah sifat yang memberikan penindasan terukur dalam penambahan utang-piutang yang bersifat konsumtif. Peminjaman yang bersifat produktif dengan jalan *mudharabah* yang keuntungan ditentukan kemudian sehingga tidak ada salah satu dari pihak yang bertransaksi dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdal-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûlal-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, 1968.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Abduh, M., *Risalah Tauhid*, terj. Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Achmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995

Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid,inda al-imam Ash-Shatibi*, Beirut: al- Maahad al-Alamilial-Fikral-Islâmi,1992.

Al-Ghazâli, *Al-Mustashfâmin 'Ilmal-Ushul*, Beirut:Dâr al-Fikr,tth.

, *Ihya' 'Ulumuddin*, terj. Moh. Zuhri, dkk., Semarang: CV Asy Syifa, 2003, Jil. 1.

Al-Faruqi, Isma'il Raji, *al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1992.

Al-Izz bin Abdul as-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlihi al-Anâm*, Beirut: Dâr al- Kutubal-Ilmiyyah, 2001.

Allal Al-Fasy, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, KSA:Dâarul GarbAl-Islamy, 1993.

Al Muwwafaqatfi dan Al-Shatibi, *Ushul al-Shari'ah*, Jilid I, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th..

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005)

Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Antonio, Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), cet. Ke-1,
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut ash-Shâtibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ash-Shâtibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh-al- Haditsah, tth.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: LESFI, 2001.
- , *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LESFI, 2015.
- Athoillah, M. Anton dan Bambang Qamaruzzaman, *Filsafat Ekonomi Islam*, Bandung: Sahifa, 2013.
- Audi, Robert, *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, New York: Routledge, 2003.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, England: John Wiley & Sons, 2007.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Bakar, Osman, *Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic Philosophies of Science*, Cambridge, Islamic Texts Society, 1998.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Barrow, John D., *Impossibility: The Limits of Science and the Science of Limits*, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Berten, K., *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Carrier, James G., *A Handbook of Anthropology*, Cheltenham: Edward Elgar, 2005.
- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin B., Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- , *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta:Tazkia Institut dan GIP, 2000)
- Clayton, Philip and Zachary Simpson, *Religion and Science*, (Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah. Cet. 2, 2011
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- El Ashker, Ahmed and Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, Leiden: Brill, 2006.
- El Ghattis, Nedal, "Islamic Banking's Role in Economic Development:-Future-Outlook," www.cba.edu.kw, akses 05 April 2014.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2012)
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat, Pengantar Kepada Teori nilai*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ghazanfar, S.M. and A. Azim Islahi, "Economic Thought of an Arab-Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali," in Ghazanfar, *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*, London: Routledge Curzon, 2003.
- Gripaldo, Rolando M., "Religion, Ethics and the Meaning of Life," *Kemanusiaan*, 15, 2008.
- Gurdjieff, G.I., "Self-Knowledge and Understanding," www.lightwinnipeg.org, akses 30 Januari 2016.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005),
- Hausman, Daniel M. (ed.), *The Philosophy of Economics: An Anthology*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

- Heilbroner, Robert L. dan William Milberg, *The Making of Economic Society*, New Jersey: Pearson Education, 2012.
- Hourani, George F., *Reason and Tradition in Islamic Ethics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Iannone, A. Pablo, *Dictionary of World Philosophy*, London: Routledge, 2001.
- Ibn Qayyim-al-Jauziyyah, *I'lâmal-Muwâqqi'în*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Idi, Abdullah dan Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan:Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Irijanto, Tubagus Thresna, dkk., "The Thoughts of Economic Growth Theories of Classical Muslim Scholars: A Contribution," *Trikonomika*, Vol12, No.2, Desember 2013.
- Irkhani, Nafis, *Woerldview dan Epistemologi*
- Karim, Adiwarmanto K., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- , *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- , *Ekonomi Islam; Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001)
- Kartanegara, Mulyadi, *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*, Jakarta: Baitul Ihsan, 2006.
- Katzner, Donald W., *Culture and Economic Explanation: Economics in the US and Japan*, New York: Routledge, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir al-Qur'an Tematik, Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Kenny, Anthony, *Ancient Philosophy: A new History of Western Philosophy*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Khairul Umam, *Ushûl Fîqih*, Bandung:Pustaka Setia, 2001.

- Khan, Fahim, "Fiqh Foundations of the Theory of Islamic Economics: a Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Relevant Subjects of Fiqh," dalam Ahmed, *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, Jeddah: King Fahd National Library Catalog, 2002
- Khan, Muhammad Akram, *Islamic Economics and Finance: a Glossary*, New York: Routledge, 2003.
- Loghod, Hadeel Abu, "Do Islamic Banks Perform Better than Conventional Banks?: Evidence from Gulf Cooperation Council Countries," www.arab-api.org, akses 04 April 2014.
- Machamer, Peter, "Philosophy of Science: An Overview for Educators," *Science & Education*, 7, 1998.
- Mahmud Syaltout, *Islâm: 'Aqîdah wa Syari'ah*, Kairo: Dâr al-Qalam, 1966.
- Mannan, Abdul, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970)
- Ma'shum, Zein Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah. Cet 1, 2008.
- McFall, Liz, *Advertising: a Cultural Economy*, London: Sage Publication, 2004.
- Mishbah Yazdi, Muhammad Taqi, *Buku Daras Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Mohammad al-Tahir al-Misawi, *Ibn Asyur wa Kitâbuhu Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Kuala Lumpur: Al-Basyairli al-Intajal-Ilmi, 1998.
- Mubyanto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta; LP3ES, 1998)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

- Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islâmiyah wa Al aqâtuha bi al-Adillah asy-Syar'îyyah*, KSA: Dâr al-Hijrahlian-Nasyrwa at-Tauzi', 1998.
- Mulyana, *Filsafat Agama, Diktat Kuliah Filsafat Agama UIN Bandung*, Bandung: Fak Ushuluddin, 2001.
- Murata, Sachiko dan Wiliam C. Chittick, *Trilogi Islam: Islam, Iman dan Ihsan*, terj. Ghufron A, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mustafa, Daud A., Hashir A. Abdulsalam dan Jibrail B. Yusuf, "Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah," *SAGE Open*, Oktober-Desember 2016.
- Nejatullah, M Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Terj. Anas Basri, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1995)
- Nuruddin Mukhtar, *al-Ijtihad al-Maqâshidi*, Qatar: Dâr al-Muassasah, 1998.
- OJK, "Statistik Perbankan Syariah Juni 2013," *www.ojk.go.id*, akses 23 Februari 2014.
- Oslighthton, Paul, "A Theological Economics," *www.case.edu.au*, akses 29 Mei 2015.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima. cet 2, 1997.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, cet. II, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Reiss, Julian, *Philosophy of Economics: A Contemporary Introduction*, New York: Routledge, 2013.
- Resnik, David B., *The Ethics of Science: An Introduction*, London: Routledge, 1998.
- Rivai, Veithzal and Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Rosenthal, Franz, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*, Leiden: Brill, 2007.
- Runes, Dagoberd D., *The Dictionary of Philosophy*, New York: Philosophical Library, tt..
- Rutherford, Donald, *Routledge Dictionary of Economics*, New York: Routledge, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad, *FILSAFAT ILMU (Kontemplasi Filosofis tentang Seluk Beluk Sumber dan Tujuan Ilmu Pengetahuan)*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Satria Effendi, *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sunan al-Turmuzi dan Sunan Ibn Majah*
- Supena, Ilyas, *Pengantar Filsafat Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Solomon, Robert C dan Kathleen M. Higgins, *The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy*, USA: Wadsworth, 2010.
- Sudarsono, Imron dan Aninndya. *Epistimologi Ekonomi Islam*
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: PT Total Grafika Indonesia, 2003.
- Syadali, Ahmad, *Filsafat Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- al-Syaibani, *al-Iktisab Fi-al-Rizq al-Mustathob*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2003).

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 3, 2005
- Syukri, Muhammad Al-Bani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Taiymiyah, Ibnu, *Al-Hisbah fi-al-Islam*, (Libanon; Dar-al-Kitab- al-Islamiyyah, 1996)
- Triono, Dwi Condro, *Ekonomi Islam Madzhab HAMFARA: Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Irtikaz, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushûlal-Fiqhal-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea. Cet 7, 2011.
- Yûsuf al-Qaradhawi, *Fîqih Maqâshid asy-Syarî'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Oleh Didin Hafifuddin, (Jakarta; Robbani Press, 2004)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. IV.

B. Jurnal, Majalah dan Blog.

- Amalia, Euis, "Kesesuaian Pembelajaran ekonomi islam di PT dengan kebutuhan SDM pada Industri keuangan Syariah di Indonesia" *Jurnal Inferensi* (STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 1, Juni 2013
- Boutayeba, Faical, Mohammed Benhamida dan Souad Guesmi, "Ethics in Islamic Economics," *Annales: Ethics in Economic Life*, Vol.17, No., Desember 2014, 111-121.
- Fadhlan, *Jurnal Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam dalam Merespon Sistem Ekonomi konvensional*, Vol.7, No.1 Juni 2012,

- Haneef, M. Aslam, "Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa yang Salah?" *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: ISLAMIA*, Thn. I, no. 6, Jakarta:Penerbit Khairul Bayan, 2005.
- Hamid, Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia,2007).
- Haro, Sebastian de, "Science and Philosophy: A Love-Hate Relationship," *www.unav.es*, akses 28 April 2016.
- Hilal, Syamsul, "Urgensi Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Al-'Adalah*, Vol.X, No.1, Januari 2011
- Hashi, Abdurezak A., "Islamic Ethics: an Outline of Its Principles and Scope," *Revelation and Science*, Vol.01, No.03, 2011.
- Iswandi, Muhammad, "Ekonomi Islam: kajian Konsep dan Model Pendekatan", *Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
- Javid, Omar and Mehboob ul-Hasan, "A Comparison of Islamic and Capitalist Conception of Economic Justice," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 21, No. 1, 2013, hal. 1-31.
- Khalid, Fazlun M., "Islam and the Environment," *Encyclopedia of Global Environmental Change*, Vol.5, 2002, hlm. 332-339.
- Mughits, Abdul, *Epistimologi Ekonomi Islam*, *Hemwiia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003:173-195
- Mohamad, Mustafa Omar dan Syahidawati Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Shariah: a Critical Review," *Middle East Journal of Scientific Research* 13, 2013.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, "The Dimensions of an Islamic Economic Model," *Islamic Economic Studies*, Vol. 4, No.2, May 1997.
- Nelson, Robert H., "What is Economic Theology?" *The Princeton Seminary Bulletin*, Vol.XXV, No.1, 2004, hlm. 58-79.

- Noland, Marcus, "Religion and Economic Growth," *World Development*, Vol.3, No.8, 2005, hlm. 1215-1232.
- Purnama, Deni, "Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas Economic", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014
- Qalhaji, M Rawwas, *Mabahis Fi Al-Iqtishad Al-Islami Min Ushulih Al Fiqhiyah*, www. pkes.org
- Rafiki, Ahmad dan Kalsom Abdul Wahab, "Islamic Values and Principles in the Organization: a Review of Literature," *Asian Social Science*, Vol.10, No.9, 2014.
- Setia, Adi, "Epistemologi Islam menurut Al-Attas: Satu Uraian Ringkas," *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: ISLAMIA*. Thn. I, No. 6, Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2005.
- Sohrah, "Prinsip Ekonomi dalam Islam", *Jurnal al-Qada-U: Peradilan dan hukum keluarga Islam*, Vol.1, No. 2, 2014.
- Waluya, Atep Hendang, "Urgensi Fiqih Muamalah dalam Berekonomi," *Majalah Tabligh*, No.6/XIV, 2016.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Iiz Izmuddin, M.A. lahir di Pandeglang, alumnus MTs. Caringin Labuan Pandeglang (1992), MAPK (1994) Darussalam Ciamis dan alumnus S-1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab (1999) dan Alumnus S2 Pengkajian Islam Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2005) konsentrasi Syariah. Serta alumnus S3 Kosentrasi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015). Semenjak tahun 2002 berprofesi sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Setahun sebelumnya Pernah menjadi Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001-2002).

Loni Hendri, SEI.MEI. Lahir di Bukittinggi, alumnus MTsN 1 Bukittinggi (2001), MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang, Sumatera Barat (2007), S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan Islam (2011), S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah (2015). Tahun 2015 hingga awal 2016 pernah menjadi Dosen Luar Biasa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di IAIN Bukittinggi (2016). Tahun 2016-2017 berprofesi sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bukittinggi.



BUATBUKU.COM

----- BUAT AJA DULU-----